



TEORI AKUNTANSI

Penulis :

- Dini Haryati
- Zul Azmi
- Asriani Junaid
- Rita Dwi Putri
- Rosanna Purba
- Nanang Qosim
- Renika Hasibuan
- Rihfenti Ernayani
- Maryam Nurdin

ISBN 978-623-8004-78-2



TEORI AKUNTANSI

**DINI HARYATI
ZUL AZMI
ASRIANI JUNAID
RITA DWI PUTRI
ROSANNA PURBA
NANANG QOSIM
RENIKA HASIBUAN
RIHFENTI ERNAYANI
MARYAM NURDIN**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

TEORI AKUNTANSI

Penulis:

Dini Haryati
Zul Azmi
Asriani Junaid
Rita Dwi Putri
Rosanna Purba
Nanang Qosim
Renika Hasibuan
Rihfenti Ernayani
Maryam Nurdin

ISBN: 978-623-8004-78-2

Editor: Diana Purnama Sari, M.E.

Penyunting: Yuliatrini Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id

Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga buku kolaborasi dengan Judul Teori Akuntansi dapat diselesaikan. Keberhasilan penyusunan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penerbitan buku ini. Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, kami mohon maaf setulusnya. Kritik & saran akan selalu kami terima dengan tangan terbuka.

Penulis, Oktober 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I AKUNTANSI DAN TEORI AKUNTANSI.....	1
1.1 Pegertian Akuntansi	1
1.2 Akuntansi Sebagai Seni, Sains, atau Teknologi.....	6
1.3 Pengembangan Akuntansi	7
1.4 Pengertian Teori.....	10
1.5 Pengertian Teori Akuntansi	13
1.6 Aspek Tataran Semiotika	15
1.7 Verifikasi Teori Akuntansi.....	17
BAB 2 PENALARAN	21
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Pengertian Penalaran	21
2.3 Komponen Penalaran	22
2.4 Jenis Asersi	24
2.5 Identifikasi Argumen.....	24
2.6 Argumen Deduktif.....	27
2.7 Argumen Induktif	30
BAB 3 PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN.....	33
3.1 Laporan Keuangan Dan Pelaporan Keuangan	33
3.2 Proses Perekayasaan	35
3.3 Perekayasaan Sebagai Proses Deduktif	39
3.4 Siapa Merekayasa	42
3.5 Aspek Semantik Dalam Perekayasaan.....	46
3.6 Proses Saksama.....	48
3.7 Konsep Informasi Akuntansi	49
3.8 Simpulan	52
BAB 4 ASET	55
4.1 Definisi Aset.....	55
4.2 Karakteristik Aset.....	56
4.2.1 Karakteristik utama aset.....	56
4.2.2 Karakteristik aset yang didukung.....	58
4.3 Pengukuran dan Penilaian Aset.....	60

4.4 Pengakuan Aset.....	66
4.5 Pengungkapan dan Penyajian Aset.....	69
BAB 5 KEWAJIBAN.....	73
5.1 Asumsi Dasar.....	73
5.2 Definisi Kewajiban.....	73
5.3 Karakteristik Kewajiban.....	75
5.4 Pengelompokan Kewajiban.....	76
5.5 Klasifikasi Kewajiban.....	77
5.6 Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian.....	78
5.7 Pelunasan/Penyelesaian.....	84
5.8 Penyajian.....	89
BAB 6 PENDAPATAN.....	93
6.1 Pendahuluan.....	93
6.2 Pengertian Pendapatan.....	95
6.2.1 Karakteristik Pendapatan.....	99
6.2.2 Jenis-jenis Pendapatan.....	100
6.3 Kriteria Pengakuan Pendapatan.....	101
6.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan.....	103
BAB 7 BIAYA.....	107
7.1 Pendahuluan.....	107
7.2 Pengertian Biaya.....	109
7.3 Karakteristik Biaya.....	110
7.4 Pengukuran dan Pengakuan biaya.....	113
7.5 Konsep Penandingan.....	115
7.6 Basis Asosiasi Biaya.....	118
7.7 Penyajian Biaya.....	119
BAB 8 LABA.....	121
8.1 Pendahuluan.....	121
8.2 Pengertian Laba.....	121
8.3 Unsur-Unsur Laba.....	122
8.4 Jenis-Jenis Laba.....	124
8.5 Faktor yang Mempengaruhi Laba.....	126
8.6 Kegunaan Laba.....	127
8.7 Perubahan Laba.....	127
8.8 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Laba.....	128

Bab 9 Pengungkapan dan Sarana Interpretif.....	135
9.1 Kualitas, Pengungkapan, dan Interpretasi dalam Laporan Keuangan.....	135
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk Indikator Premis & Konklusi	26
Tabel 5.1 Dasar atau Atribut Penilaian Kewajiban.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 tiga aspek dasar dalam pengembangan akuntansi.....	10
Gambar 2.1. Teori Akuntansi Berdasarkan Metodologi Deduktif	29
Gambar 3.1 Proses Prekayasaan	40
Gambar 3.2 Struktur Akuntansi: Perencanaan dari Praktik	51

BAB I

AKUNTANSI DAN TEORI

AKUNTANSI

Oleh Dini Haryati

1.1 Pengertian Akuntansi

Upaya untuk mengatur kebutuhan manusia yang sangat banyak dan tidak terbatas itu dapat dipenuhi dengan barang dan jasa yang terbatas, maka munculah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini antara lain mengatur cara membagi kebutuhan yang terbatas itu kepada manusia yang membutuhkannya idealnya secara damai. Sistem kapitalisme menawarkan cara di mana barang yang terbatas itu di produksi oleh pemilik modal dan nanti hanya bisa di nikmati oleh yang memerlukannya berdasarkan kemampuan “*demand*”.

Mekanisme perolehannya dilakukan melalui mekanisme persetujuan atau pertemuan antara *demand* dan *supply* yang akan melahirkan harga yang disebut pasar.pasar disini bukan tempat, tetapi gambaran dari persetujuan antara kekuatan “*demand*” yang memerlukan dan yang memiliki barang kebutuhan itu. Menurut konsep kapitalisme jika pemilik modal diberikan keleluasaan untuk melakukan kegiatan ekonomi, memproduksi barang dan jasa kebutuhan manusia makan barang di pasar akan tersedia. Akan terbuang kesempatan kerja yang akan memberikankenaikan penghasilan bagi pekerja yan akhirnya menambah tabungan dan akan terus bergulir dan menjadi pendorong untuk melakukan kegiatan ekonomi yang semakin kencang.perputaran ekonomi ini akan

mengekselerasikan kenaikan “income” masyarakat yang akan melahirkan kue pendapatan yang diasumsikan akan menetes (*trickle down*) ke bawah. Kegiatan ekonomi di dorong oleh adanya pendapatan sehingga diasumsikan secara “*economic retional*” semua orang akan bekerja habis-habisan, berkompetisi untuk mendapatkan kue itu baik melalui jalur pekerja atau investor.

Semua manusia dianggap memiliki kekuatan yang sama dan tidak diperhatikan mereka yang lemah, *disable* atau yang menyandang cacat lainnya. Manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang produktif, manusia yang tidak produktif harus di kurangi dengan berbagai kebijakan kependudukan. Yang di maksud dengan “kue” di sini sebenarnya harta, kekayaan yang bernilai uang. Oleh karena itu, sistem kapitalis itu berupaya memperbanyak harta untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Kegiatan ekonomi yang cepat berkembang dan lembaga ekonomi yang melakukan aktifitas ekonomi semakin besar, tentu diperlukan berbagai alat untuk mencapainya. Salah satu alat itu adalah ilmu manajemen. Ilmu manajemen ini merupakan ilmu yang memberikan pedoman bagaimana cara mengatur manusia agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan memelihara kekayaan atau harta.

Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis. Ilmu akuntansi ini mmemberikan informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbernya. Hutang Atau Modal (Neraca), berapa kenaikannya secara periodik (Laporan Laba Rugi). Akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus sistem informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat-sifat yang sudah maju bukan aktivitas ekonomi yang masih kuno misalnya masih menggunakan sistem barter. Cara mengukurnya juga menggunakan unit moneter yang anggap stabil dan menggunakan *historycal cost*.

Dari sini jelas diketahui bahwa akuntansi adalah “*tool of managent*,”alat kapitalitas untuk mengumpulkan harta dan memeliharanya agar proses akumulasi kekayaan berjalan lancar dan penguasaannya tetap ditangan kapitalis. Akuntansi tepatnya akuntansi keuangan kapitalis atau ada juga yang menyebut Accounting adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, hutang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu-waktu atau periode tertentu. Dengan informasi ini pembaca laporan tidak perlu lagi mengunjungi suatu perusahaan atau melakukan interview untuk mengetahui keadaan keuangannya, hasil usahanya maupun memprediksi masa depan perusahaan ini, cukup dari membaca laporan keuangan.

Pengertian Akuntansi berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, atau antara literatur satu dengan literatur lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena pendekatan yang digunakan berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa akuntansi adalah seni, ada juga yang berpendpaat bahwa akuntasi sebagai bahasa bisnis; ada pula yang berpendapat bahwa akuntansi sebagai catatan historis. Ada pula pendapat bahwa akuntansisebagai ilmu, akuntansi sebagai informasi yang dikomunikasikan sebagai bahan pengambil keputusan, akuntansi sebagai beda ekonomi dan seterusnya (Godfrey et al, 1994). Banyaknya pengertian mengenai akuntansi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang yang berbeda akuntansi mempunyai pengertian yang berbeda-beda pula.

Untuk menambah wawasan mengenai pengertian akuntansi berikut ada beberapa definisis akuntansi dari berbagai literatur yaitu:

1. Menurut Committee on Terminology dari AICPA

Pada tahun 1941 AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai seni yang secara lengkap berbunyi sebaga berikut:

“ Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan peringkasan dalam suatu cara yang signifikan dan dalam ukuran uang, transaksi -transaksi dan peristiwa-peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan, dan penginterpretasian hasil-hasilnya” (AICPA, 1953, par. 9).

Dalam definisi tersebut, dimulai bahwa akuntansi sebagai seni. Definisi seperti ini mungkin karena pada waktu itu akuntansi belum dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang utuh. Akuntansi didefinisikan sebagai seni karena pada waktu itu karakteristik pengetahuan akuntansi tidak disamakan sebagai pengetahuan ilmiah (Suwardjono, 1992).

2. Menurut Paul Grady

Paul Grady mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“ Accounting is the body of knowledge and functions concerned with systematic originanting, authenticating, recording, classifying, processing, summerizing, analyzing, interpreting, and supplying of dependable and significant information covering transactions and events which are, in part of least, of financial character, required for the management and operation of an entity and for reports that have to be submitted thereon to meet fiduciary and other responsibilities” (1965, p.2)

3. Menurut American Accounting Association (AAA)

AAA mengemukakan definisi akuntansi sebagai berikut:

“ Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi agar dapat memberikan bahan pertimbangan yang relevan bagi para pengambil keputusan” (AAA, 1996, p.1)

4. Menurut Suwardjono

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaannya penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik”

5. Menurut Harold Q. Langenderier

“Akuntansi adalah sistem pengukuran dan pengkomunikasian untuk menyediakan informasi ekonomik dan sosial suatu unit organisasi (kesatuan) untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam membuat pertimbangan (*judgement*) dan keputusan yang beralasan (*informed*) untuk mengendalikan alokasi sumber ekonomik yang optimal dan pencapaian unit organisasi”.

Beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa akuntansi dapat diartikan berbeda-beda menurut penulis ataupun literatur-literatur lainnya. Definisi akuntansi berbeda-beda tergantung sudut pandanfnya ada yang mendefinisikan akuntansi dari sudut bidang pekerjaan atau proses komunikasi ada pula definisi dipandang dari sudut bidang studi. Perbedaan dan perubahan pengertian tersebut dipengaruhi oleh waktu, persepsi dan latar belakang masing-masing penulis dan perkembangan lingkungan akuntansi. Pengertian akuntansi mengalami proses evolusi, berubah secara perlahan bermula dari akuntansi diartikan sebagai seni pencatatan berubah sebagai ilmu pengetahuan kemudian ke arah penyedia informasi ekonomik dan non ekonomik untuk menjalankan fungsi manajemen dan akhirnya ada yang mengartikan bahwa akuntansi sebagai sebuah rekayasa informasi.

Secara makro akuntansi juga dapat mempengaruhi para pengambil keputusan ekonomik dalam suatu negara dalam mengalokasikan sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Pengambil keputusan dapat mengendalikan alokasi sumber daya ekonomik tersebut secara baik apabila didukung oleh informasi-informasi yang handal yang disediakan oleh akuntansi. Namun harus juga disadari bahwa akuntansi hanyalah merupakan salah satu alat untuk pengendalian alokasi sumber daya ekonomik tersebut. Secara makro peran kebijakan pemerintah dalam pengendalian alokasi sumber daya ekonomik tetap relevan, akan tetapi kebijakan tersebut menjadi lebih baik apabila didukung dengan dasar informasi yang relevan dan handal. Secara mikro dalam sebuah perusahaan pengambil keputusan baik manajemen maupun pihak ekstern secara rasional akan mendasarkan keputusannya pada informasi yang rasional salah satu sumber informasi ekonomik maupun non ekonomik itu dari akuntansi.

1.2 Akuntansi Sebagai Seni, Sains, atau Teknologi

Beberapa definisi terdahulu mendefinisikan akuntansi sebagai suatu seni dalam hal pembukuan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang dilakukan oleh para akuntan. Namun seiring berjalannya waktu, definisi tersebut sudah tidak relevan lagi. Pasalnya, dengan perkembangan akuntansi yang ada, akuntansi sudah dipandang sebagai seperangkat ilmu pengetahuan. Di lain sisi, beberapa ahli berpendapat bahwa ilmu pengetahuan menjelaskan suatu masalah secara pasti dan tidak terpengaruh faktor-faktor lain. Dalam arti lain, sains tidak ditujukan untuk membahas permasalahan yang bersifat ekonomis dan tidak ditujukan

untuk menghasilkan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu sains adalah cabang pengetahuan yang memiliki tujuan mencari kebenaran mengenai suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Sehingga, dengan melihat paparan di atas, sebenarnya akuntansi tidak dapat disebut sebagai sains.

Selain diartikan sebagai seni dan juga sains, akuntansi kerap diartikan sebagai suatu teknologi. Teknologi sendiri merupakan sarana pemecahan suatu fenomena yang tampak nyata dalam suatu lingkungan tertentu yang juga memiliki tujuan tertentu. Adanya praktik pengolahan data menjadi suatu informasi menjadikan akuntansi dipandang menjadi suatu teknologi. Selain itu pandangan lain yang menyebut akuntansi sebagai suatu teknologi adalah bahwa akuntansi dapat digunakan dalam perekayasaan laporan keuangan, yang mana perekayasaan sendiri mengandung arti suatu proses yang terencana dan sistematis yang melibatkan serangkaian pemikiran dan pertimbangan, dengan menggunakan konsep dan teori untuk menghasilkan suatu produk. Hal tersebut merepresentasikan suatu sistem pelaporan keuangan yang mana melibatkan suatu proses kerja dari mulai pengakuan hingga penyajian yang sistematis, melibatkan pertimbangan, dan menggunakan kerangka konseptual untuk menghasilkan suatu laporan keuangan.

1.3 Pengembangan Akuntansi

Dalam pembukaan tulisannya, (Carnegie and Napier 2012) menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, akuntansi merupakan interaksi antara dua pihak yaitu individu dan organisasi. Baik individu maupun organisasi tersebut merupakan “pembelajar” yang mana tindakan mereka didasari pada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kejadian masa depan. Baik informasi maupun praktik terdahulu

merupakan produk dari pengalaman tersebut. Hal tersebut yang mendasari bahwa terdapat dua pandangan akuntansi, yaitu sebagai ilmu profesi (praktis) dan sebagai ilmu pengetahuan yang dilihat dari perkembangannya.

Akuntansi dapat dipandang dalam dua perspektif, yaitu sebagai ilmu profesi akuntan yang menerapkan pengetahuan akuntansi dalam dunia profesional, dan juga sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dipelajari. Sebagai ilmu profesi, akuntansi menyediakan serangkaian metode dan teknik beserta panduan dalam menjalankan tugas seorang akuntan. Sementara sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dipelajari, akuntansi kembali dibagi dua menjadi teori dan praktik. Pada perspektif ini, peran akuntansi berorientasi dalam memberikan penjelasan dan deskripsi yang memadai mengenai praktik dan fenomena akuntansi yang terjadi. Keduanya merupakan cakupan dari teori akuntansi.

Sebuah institusi pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu akuntansi, dimana seorang akademisi diharapkan dapat mengembangkan teori terhadap perkembangan praktik akuntansi dan juga menjelaskan mengenai praktik akuntansi yang baik. Hal tersebut didukung oleh Hendriksen dalam (Coetsee 2010) yang menyatakan bahwa,

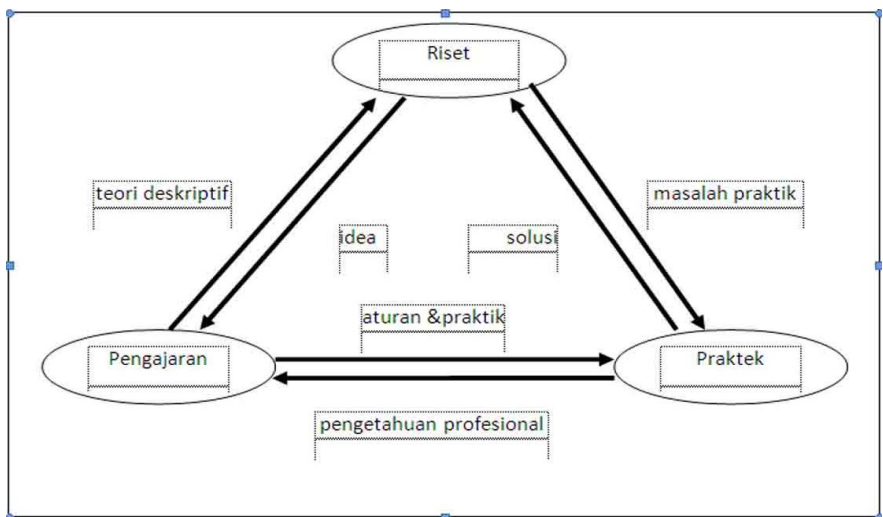
Accounting theory may also be used to explain existing practices to obtain a better understanding of them. But the most important goal of accounting theory should be to provide a coherent set of principles that form the general frame of reference for the evaluation and development of sound accounting practices.

Selain itu, institusi pendidikan juga bertugas dalam mempersiapkan peserta didiknya agar cakap dan terampil dalam melakukan praktik akuntansi di dunia profesional. Meskipun terdapat perbedaan orientasi, tetapi sudah menjadi

keharusan bahwa kedua perspektif ini berjalan secara harmonis dan saling melengkapi.

Beberapa tahun belakangan ini, orientasi akuntansi sebagai ilmu pengetahuan lebih berkembang dengan banyaknya penelitian di bidang akuntansi. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat pergeseran posisi antara ilmu profesi dan ilmu pengetahuan yang seharusnya berjalan harmonis. Penempatan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan (*sains*) membawa konsekuensi bahwa teori akuntansi harus bebas dari pertimbangan nilai (*value-judgment*) dan bersifat deskriptif (Suwardjono 2005). Oleh karena itu, sekarang ini banyak sekali penelitian akuntansi yang membahas ilmu akuntansi secara mendalam dan ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada membahas mengenai standar akuntansi yang berlaku dalam praktik akuntansi. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi para praktisi yang memerlukan pertimbangan terhadap keputusannya.

Menurut Kinney dalam (Suwardjono 2005) menggambarkan tiga aspek yang merupakan dasar yang penting dalam pengembangan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu riset, pengajaran, dan praktik. Ilustrasi tiga aspek tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 tiga aspek dasar dalam pengembangan akuntansi (Sumber: Suwardjono 2005)

Ketiga aspek ini saling berinteraksi sehingga dapat mengembangkan akuntansi sebagai ilmu pengetahuan. Riset merupakan bagian terpenting yang mana mengolah teori deskriptif sebagai sebuah ide yang didapat melalui proses pengajaran, menjadi suatu solusi dalam memecahkan masalah praktik. Sementara itu, proses pengajaran didasari pada aturan maupun praktik, sementara praktik didasari oleh pengetahuan yang didapat melalui proses pengajaran. Jadi, ketiga aspek ini secara tidak sadar saling memberikan kontribusi satu sama lain.

1.4 Pengertian Teori

Teori mempunyai pengertian yang bermacam-macam tergantung dengan konteks dan persepsi dari masing-masing orang dalam mengartikannya. Sebelum membahas istilah teori akuntansi terlebih dahulu dibahas pengertian teori. Sebagai bahan pengayaan pemikiran dan tambahan wawasan

menurut Suwardjono (1989) ada 5 (lima) macam pengertian teori yaitu:

1. Teori Sebagai Lawan Praktik

Dalam pengertian yg paling sederhana teori adalah sesuatu yg tidak operasional atau sesuatu yg bersifat abstrak. Jadi teori adalah sesuatu yg ideal sebagai lawan dari sesuatu yg nyata yg dikerjakan dalam dunia yg nyata. Teori sering dianggap sebagai *Das Sollen*, apa yang seharusnya dan praktik sebagai *Das Sein*, apa yang senyatanya. Teori di sini berisi ketentuan atau aturan yg seharusnya bagaimana seseorang bertindak. Jadi teori bersifat normatif. Misalnya dalam mendapatkan SIM ada ujian teori (yang biasanya merupakan ujian tertulis) dan ada ujian praktik (yang biasanya dilakukan di lapangan dengan uji praktik keterampilan dan pemahaman peraturan mengemudi). Jadi teori diperlawankan dengan praktik.

2. Teori Sebagai Pembeneran (*Justification*)

Dalam konteks ini teori diartikan sebagai suatu penjelasan atau penalaran tentang fakta atau tindakan atau perbuatan yang merupakan praktik dalam kehidupan nyata. Teori berusaha untuk memberikan pembeneran (justifikasi) terhadap praktik. Justifikasi disini umumnya didasarkan pada reasonableness (kelogisan atau rasionalitas), sensibility (perasaan) dan obviousness (kejelasan). Dengan demikian pihak yang menerima penjelasan dapat menilai apakah praktik tersebut benar atau salah.

3. Teori Sebagai Penjelasan Ilmiah (*Scientific Explanations*)

Dalam konteks ini teori merupakan pernyataan-pernyataan tentang hubungan antara perilaku variabel-variabel alam atau variabel sosial yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala-gejala alam atau sosial.

Teori diwujudkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis hubungan antara variabel-variabel atau perilaku tiap variabel tersebut. Fungsi teori hanyalah menjelaskan hubungan variabel dengan gejala-gejala tersebut.

4. Teori Sebagai Model

Pengertian teori sebagai model artinya bahwa teori merupakan representasi atau abstraksi sesuatu yang terdapat dalam dunia nyata. Faktor penting yang diperlukan dalam merancang model adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam dunia nyata sehingga model yang dibuat akan dapat memprediksi apa yang akan terjadi seandainya model tersebut diwujudkan dalam praktik.

5. Teori Sebagai Penalaran yang Logis

Dalam konteks ini teori berarti suatu proses pemikiran atau penalaran dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan kelayakan prinsip atau praktik tertentu yang sudah berjalan atau untuk mendukung dan mengembangkan prinsip atau praktik yang baru atau yang diharapkan. Dalam hal ini teori berisi konsep-konsep maupun pemikiran logis hasil penelaahan yang mendalam.

Sejalan dengan pengertian teori yang terakhir disebutkan diatas, yaitu "teori sebagai penalaran yang logis" Hendriksen mengemukakan pengertian teori dengan mengutip dari Webster Dictionary seperti berikut: " Teori adalah seperangkat prinsip yang saling berkaitan, yang bersifat konseptual dan pragmatik yang membentuk rerangka referensi umum sebagai pegangan dalam suatu bidang tertentu yang diselidiki" (1982, p.1).

Kembali ke istilah proposisi, istilah ini dibagi dalam dua jenis yaitu: proporsi a priori dan proporsi a posteori. ***Proporsi a priori*** adalah sebuah pernyataan tentang konsep nilai kebenarannya ditentukan dengan penalaran murni dengan menganalisis dari kata-kata yang digunakan. ***Proporsi a posteori*** adalah sebuah pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya realitas di alam nyata.

1.5 Pengertian Teori Akuntansi

Istilah teori akuntansi seringkali untuk menunjuk seperangkat konsep-konsep akuntansi yang relevan, terpadu dan saling berkaitan. Sejalan dengan pengertian teori yang terakhir menurut Suwardjono teori sebagai penalaran yang logis dan pengertian teori dari Webster Dictionary, Hendriksen (1982) mengemukakan pengertian teori akuntansi sebagai berikut:

“Teori akuntansi adalah pemikiran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas (a set of broad principles) yang : (1) menyediakan suatu kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi, dan (2) merupakan pedoman dalam pengembangan praktik-praktik dan prosedur-prosedur akuntansi yang baru” (p.1)

Berarti teori akuntansi tidak terlepas dari praktik akuntansi. Oleh karenanya teori akuntansi dapat juga digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik yang ada untuk mendapatkan pengertian yang lebih baik terhadap praktik-praktik tersebut. Akan tetapi tujuan yang lebih penting dari teori akuntansi seharusnya adalah untuk menyediakan seperangkat prinsip-prinsip luas (*board principles*) dan logis yang saling berkaitan yang membentuk rerangka acuan umum

untuk pengevaluasian dan pengembangan praktik-praktik akuntansi yang sehat.

Teori dan praktik akuntansi yang dimaksud dalam pengertian diatas lebih menekankan pada disiplin akuntansi keuangan. Oleh karena itu dari sisi pengertian teori akuntansi sesuai dengan pengertian menurut Hendriksen maka sebenarnya “pengetahuan tentang akuntansi keuangan” oleh Suwardjono (1989) dapat digolongkan menjadi dua bidang yaitu:

- 1) Pengetahuan yang bersangkutan dengan proses pemikiran dan pemilihan konsep-konsep yang dipilih, dan
- 2) Praktik akuntansi yang berupa standar atau prinsip beserta pelaksanaannya sebagai produk model akuntansi tersebut.

Menurut Kerlinger (1964) tujuan utama teori akuntansi adalah menyediakan dasar peramalan dan penjelasan tingkah laku akuntansi dan peristiwa-peristiwa. Teori adalah seperangkat konsep-konsep atau gagasan-gagasan , definisi-definisi dan dalil-dalil yang menyajikan pandangan sistematik atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dengan mengkhususkan hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi kejadian-kejadian tersebut. Sedangkan Mathews dan Parera (1993) mengatakan bahwa tujuan utama teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembalian ide-ide baru dan menjadi referensi dalam proses pemilihan metode pengembangan akuntansi. Teori akuntansi memiliki karakteristik seperti berikut:

- a) Mempunyai *body of knowledge*
- b) Konsisten secara internal
- c) Menjelaskan dan memprediksi fenomena
- d) Menyajikan hal-hal yang ideal
- e) Acuan ideal untuk mengarahkan praktik
- f) Membahas masalah dan memberikan solusi

Dengan enam karakteristik tersebut pengertian teori di sini lebih mendekati pengertian teori sebagai penjelasan ilmiah (pengertian pada butir 3 menurut Suwardjono). Berdasarkan uraian diatas masih ada kesimpangsiuran para ahli akuntan dalam mengartikan teori akuntansi.

Dengan adanya kesimpangsiuran dan pengertian yang tidak baku tersebut, Bambang Sudibyo (1987) berpendapat bahwa para akuntan ingin konsekuen bahwa akuntansi sebagai ilmu maka seharusnya pengertian teori akuntansi mengacu ke pengertian teori yang baku yang dikembangkan berdasarkan metodologi baku sebagaimana metodologi buku menurut Kael Popper. Teori yang dikembangkan berdasarkan metodologi semacam itu adalah teori dari sebuah ilmu (ilmu murni). adapun karakteristik metodologi baku menurut Popper adalah sebagai berikut:

1. Teori adalah pernyataan hipotesis mengenai perilaku variabel yang diteorikan
2. Suatu teori tetap statusnya sebagai teori sepanjang tes-tes atau penyangkalan-penyangkala baik logis maupun empiris tidak berhasil membuktikan salah.
3. Teori tidak mungkin bisa dibuktikan kebenarannya
4. Tujuan teori ada dua yaitu: untuk menerangkan perilaku variabel-variabel yang diteorikan dan untuk meramalkan variabel-variabel dimasa yang akan datang.

1.6 Aspek Tataran Semiotika

Akuntansi biasa disebut sebagai bahasa bisnis yang berarti bahwa akuntansi menjadi sarana komunikasi bisnis sebagai hasil dari penyedia dan penyampaian informasi keuangan. Dalam ilmu bahasa, bidang komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu semiotik, linguistik, dan logika. Semiotika adalah bidang komunikasi yang memaparkan teori mengenai tanda-tanda linguistik. Sedangkan linguistik itu sendiri

memaparkan fonetik, gramatika, morfologi dan makna kata. Ketiga bidang ini menjadi dasar terbentuknya suatu komunikasi yang baik.

Semiotika sendiri kemudian membentuk tiga level terkait dengan informasi. Yang pertama adalah *sintaktika*, yang mengidentifikasi logika dan bahasa menjadi suatu hubungan yang logis. Yang kedua adalah *semantika*, yang mengidentifikasi hubungan antara kenyataan dengan tandatandanya. Dan yang terakhir adalah *pragmatika*, yang mengidentifikasi perubahan perilaku penerima yang berdampak pada keefektifan komunikasi.

1. Teori Akuntansi Semantik

Teori akuntansi semantik menjelaskan penyimbolan suatu fenomena menjadi suatu bentuk simbol akuntansi. Misalkan, kegiatan perusahaan yang dinyatakan ke dalam laporan keuangan. Atau dalam arti lain, teori ini menafsirkan makna dari setiap unsure yang ada di dalam laporan keuangan. Tujuannya agar pembaca dapat memperkirakan keadaan perusahaan yang sesungguhnya tersebut tanpa harus melihat dan terlibat langsung ke dalam kegiatan perusahaan tersebut. Informasi terbentuk dengan merumuskan tiga unsur, yaitu objek, ukuran, dan hubungan kedua elemen tersebut. Informasi yang terbentuk itulah yang menjadi komunikasi akuntansi yang efektif.

2. Teori Akuntansi Sintaktik

Bebeda dengan teori semantik, teori akuntansi sintaktik berorientasi pada perwujudan suatu informasi semantik menjadi suatu laporan keuangan. Teori sintaktik memberikan penjelasan mengenai apa saja yang harus dilaporkan, siapa saja yang dilaporkan, kapan harus dilaporkan, dan bagaimana cara melaporkannya.

3. Teori Akuntansi Pragmatik

Teori akuntansi pragmatik berorientasi pada perilaku pengguna laporan keuangan yang dipengaruhi oleh informasi keuangan. Teori ini menguji keefektifan komunikasi apakah informasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna laporan keuangan atau tidak dan apakah informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau tidak. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan pengujian manfaat informasi dari sisi pelaporan keuangan eksternal dan juga manajerial.

1.7 Verifikasi Teori Akuntansi

Prosedur verifikasi teori akuntansi dilakukan untuk meyakinkan validitas atau kebenaran suatu teori. Pendekatan untuk mengevaluasi validitas teori bergantung pada sasaran dan tataran teori yang diverifikasi. Teori akuntansi normatif diuji kebenarannya berdasarkan penalaran logis karena teori ini didasari pada kesepakatan asumsi-asumsi yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Valid atau tidaknya prinsip yang dihasilkan dilihat dari apakah asumsi yang digunakan masuk akal atau tidak.

Teori akuntansi positif diuji kebenarannya berdasarkan kenyataan fenomena akuntansi yang disesuaikan dengan teorinya. Pengujian kebenarannya menggunakan observasi fakta secara objektif yang diperoleh dari suatu metode ilmiah. Berbeda dengan verifikasi teori akuntansi normatif, verifikasi teori akuntansi positif menggunakan studi empiris.

Teori akuntansi sintaktik tidak berkaitan langsung dengan fakta sehingga verifikasi validitasnya hanya mengandalkan penalaran logis. Teori akuntansi semantik diverifikasi secara empiris dengan mengamati fakta. Sementara teori akuntansi pragmatik diverifikasi dengan melakukan penelitian empiris berdasarkan asumsi yang menyatakan bahwa informasi dapat bermanfaat dalam pengambilan

keputusan. Dalam memverifikasi suatu teori, ketiga teori akuntansi (semantik, sintaktik, dan pragmatik) dilibatkan bersama-sama karena sifatnya yang saling berkaitan. Dalam arti lain, teori harus diverifikasi validitasnya atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan pertimbangan nilai yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Carnegie, G. D. and C. J. Napier. 2012. "Accounting's past, present and future: the unifying power of history." Accounting, Auditing & Accountability Journal **25**(2): 328-369.
- Coetsee, D. 2010. "The role of accounting theory in the development of accounting principles." Meditari Accountancy Research **18**(1): 1-16.
- Macintosh, N. B. and C. R. Baker. 2002. "A literary theory perspective on accounting." Accounting, Auditing & Accountability Journal **15**(2): 184-222.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Waweru, N. M., et al. 2011. Determinants of different accounting methods choice in Tanzania A positive accounting theory approach. Journal of Accounting in Emerging Economies **1**(2): 144-159.

BAB 2

PENALARAN

Oleh Zul Azmi

2.1 Pendahuluan

Banyak kritik telah dilontarkan pada profesi akuntansi, mulai dari kegagalan dokumen akuntansi untuk mengungkapkan refleksi yang lebih akurat dari profesi akuntansi untuk memuaskan dan memperhatikan kepentingan publik dalam penentuan masa depan praktik akuntansi. Fokusnya adalah basis moral profesi dan praktik akuntansi, basis yang menampilkan nilai-nilai yang kontradiktif pada tingkat normatif, sedangkan pada tingkat empiris bukti yang tersedia masih memerlukan kajian. Konteks praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial yang lebih luas; yang dibentuk oleh perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas. Penalaran sebagai sebuah proses yang membangun pernyataan dalam konseptual akuntansi perlu dipahami sebagai pilar perkembangan akuntansi itu sendiri.

2.2 Pengertian Penalaran

Penalaran menggambarkan proses yang terjadi antara titik ketika para pemikir memperhatikan informasi yang menonjol dan bermakna (linguistik atau perseptual) dan ketika mereka menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan informasi tersebut (Khemlani, 2018). Penalaran menurut Peter A. Angeles merupakan proses yang menghasilkan simpulan-simpulan yang ditarik dari pernyataan-pernyataan (Walton, 1990). Penalaran pada dasarnya berasal dari preposisi ke preposisi, tetapi simpulan dari penalaran

dapat juga dari sebuah tindakan. Penalaran dapat dipahami melalui penggunaan suatu konteks. Penalaran dapat digunakan untuk beragam konteks tujuan seperti untuk menipu, untuk berargumen, untuk berdebat, untuk mempengaruhi, untuk merayu, untuk menyatakan, dan sebagainya. Tampak jelas bahwa banyak kegiatan yang disadari dapat dipengaruhi dan terstruktur oleh proses penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan (*belief*) terhadap suatu pernyataan atau asersi (*assertion*) (Suwardjono, 2010). Menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan valid (benar atau salah) sehingga pantas untuk diyakini atau dianut. Penalaran melibatkan proses penurunan konsekuensi logis dan proses penarikan simpulan / konklusi dari serangkaian pernyataan atau asersi. Struktur penalaran terdiri atas masukan, proses dan keluaran.

Pada konsep penalaran, terdapat dua hal esensial pembentuk penalaran yang menjadi dimensi pemikiran yaitu identifikasi bagian dari pemikiran dan menilai bagian pemikirannya (Paul & Elder, 1997). Semua penalaran memiliki tujuan, didasarkan pada asumsi, untuk menjelaskan sesuatu, dan untuk memecahkan masalah. Penalaran juga dibangun dengan perspektif tertentu, didasarkan pada data, informasi dan bukti. Penalaran juga diekspresikan melalui konsep atau gagasan. Penalaran dapat berisi inferensi atau interpretasi untuk menarik suatu simpulan, penalaran dapat menggiring pada sesuatu atau berimplikasi.

2.3 Komponen Penalaran

Penalaran merupakan sesuatu yang dilakukan sehari-hari dalam menyampaikan argumen. Seseorang yang sama sekali tidak dapat menilai klaim sampai pada kesimpulan, meyakinkannya dan bertindak dengan cara yang liar. Seseorang akan mengandalkan penalaran untuk memandu tindakannya dan mendasarkan keyakinannya. Meskipun setiap orang dapat

membuat suatu alasan penalaran, tetapi belum tentu dapat memberikan penalaran dengan baik dan berdasar. Kemampuan bernalar dapat berkembang melalui pengalaman, namun keahlian itu juga dapat berkembang melalui contoh-contoh dan petunjuk-petunjuk (Munson & Black, 2017).

Terdapat tiga konsep penting berkenaan dengan struktur bernalar, yaitu asersi, keyakinan dan argumen (Suwardjono, 2010). Hubungan ketiga konsep tersebut menghasilkan bukti rasional terhadap keyakinan mengenai suatu pernyataan. Lebih jauh asersi menjelaskan pernyataan (umumnya positif) yang menegaskan bahwa sesuatu benar adanya. Misalnya pernyataan suatu teori yang disampaikan. Jika seseorang mempercayai bahwa teori agensi yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen dijelaskan sedemikian rupa, maka pernyataan tersebut menjadi keyakinannya. Oleh karena itu, asersi dapat berfungsi ganda dalam penalaran yaitu sebagai elemen pembentuk argumen dan sebagai keyakinan yang dihasilkan oleh penalaran (berupa kesimpulan).

Kedua, komponen keyakinan. Keyakinan (*belief*) merupakan tingkat kebersediaan untuk menerima suatu pernyataan atau teori (penjelasan) mengenai suatu fenomena atau gejala (alam atau sosial) adalah benar. Seseorang menyematkan keyakinan atas suatu pernyataan karena ia telah melekatkan kepercayaan terhadap pernyataan itu. Ketiga, argumen yang merupakan serangkaian asersi yang membentuk hubungan dengan asersi lainnya dan hasil penyimpulan digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Dengan kata lain, argumen dibentuk dari serangkaian asersi yang saling mendukung satu samalain yang membentuk suatu pernyataan yang digunakan sebagai argumen. Dalam hal ini argumen merupakan unsur yang paling penting karena digunakan untuk membentuk, memelihara, atau mengubah suatu keyakinan.

2.4 Jenis Asersi

Asersi dapat diklasifikasi menjadi asumsi, hipotesis, dan pernyataan fakta (Suwardjono, 2010). Asumsi, merupakan asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti tentang kebenarannya secara meyakinkan. Kedua, hipotesis, merupakan asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian, sesuatu dinilai sebagai hipotesis karena asersi tersebut mengandung kemungkinan salah, karena jika asersi adalah benar maka asersi akan menjadi pernyataan fakta. Ketiga, pernyataan fakta, merupakan asersi yang bukti tentang kebenarannya diyakini sangat kuat atau bahkan tidak dibantah. Asersi merupakan bahan olah untuk membentuk argumen. Oleh karena itu asersi meliputi susunan premis -premis dalam kalimat dan konklusi. Bentuk konklusi diturunkan dari serangkaian asersi terlebih dahulu.

2.5 Identifikasi Argumen

Memberi argumen berarti mengajukan klaim dan menawarkan klaim lain sebagai alasan penerimaannya. Oleh karena itu, argumen merupakan seperangkat klaim, yang salah satunya dimaksudkan untuk didukung oleh yang lain (Munson & Black, 2017). Kesimpulan adalah klaim yang dimaksudkan untuk didukung oleh alasan yang ditawarkan dalam argumen. Premis adalah klaim yang diajukan sebagai alasan untuk sebuah kesimpulan. Dengan menggunakan istilah-istilah ini, kita dapat mengatakan bahwa argumen adalah aset klaim yang dapat dibagi menjadi kesimpulan dan satu atau lebih premis. Sebagai contoh; Gadis itu bersenjata tajam, Gadis itu berbahaya dan dan patut diwaspadai. Dalam hal ini “gadis itu bersenjata tajam” sebagai premis, dan “gadis itu berbahaya dan patut diwaspadai” sebagai konklusi. Suatu argumen bisa saja salah atau gagal karena beberapa alasan. Barangkali premis

yang dibangun mungkin salah atau tidak relevan atau tidak cukup bukti untuk mendukung simpulan. Misalnya: saya telah ikut bermain judi lotere bertahun-tahun dan belum pernah menang, oleh karena itu keberuntungan saya pasti sudah dekat. Pernyataan ini mengandung sesuatu yang tidak cukup bukti, karena lotere tidak dapat dipastikan atau bersifat spekulatif.

Argumen adalah kumpulan klaim, jadi sebagai aturan, pertanyaan, perintah, seruan, dan nasihat tidak dapat menjadi bagian dari argumen karena tidak membuat klaim. Argumen memberi tahu bahwa klaim yang merupakan premis dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan. Ini berarti bahwa argumen adalah masalah niat. Jika kalimat berikut “ hari ini adalah 5 Agustus, kemaren adalah 4 Agustus”. Jika premisnya adalah “hari ini adalah 5 agustus”, maka simpulannya bisa saja “kemaren adalah 4 agustus”, bisa saja sebaliknya dan bisa juga keduanya sebagai premis dengan tanpa simpulan. Tentu saja ini masalah niat. Dengan tidak adanya kata-kata indikator pada konteks di mana suatu argumen disajikan. Argumen sering kali berfungsi untuk memperjelas apa yang dimaksudkan dari pernyataan sebagai suatu premis dan asersi lainnya sebagai kesimpulan.

Argumen dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Argumen Deduktif, atau argumen logis merupakan argumen yang asersi konklusinya tersirat atau dapat diturunkan dari asersi-asersi lain yang diajukan.
2. Argumen Induktif, argumen ini lebih bersifat sebagai argumen ada benarnya. Akan tetapi dalam argumen ini konklusi tidak selalu benar walaupun kedua premis benar.

Bukti adalah sesuatu yang memberi dasar rasional dalam pertimbangan (*judgement*) untuk menetapkan kebenaran suatu pernyataan (*to establish the truth*) (Suwardjono, 2010). Dalam hal teori akuntansi, pertimbangan diperlukan untuk menetapkan relevansi atau keefektifan suatu

perlakuan akuntansi untuk mencapai tujuan akuntansi. Keyakinan yang diperoleh seseorang karena kekuatan atau kelemahan argumen adalah terpisah dengan masalah apakah pernyataan yang diyakini itu benar (*true*) atau salah (*false*). Dapat saja seseorang memegang kuat keyakinan terhadap sesuatu yang salah atau sebaliknya, menolak suatu pernyataan yang benar (*valid*). Pada pernyataan argumen, umumnya terdapat kata-kata yang mengisyaratkan suatu makna " dengan alasan bahwa", dan disamping itu terdapat kata-kata indikator argumen yang menunjukkan bahwa, menegaskan bahwa, membuktikan bahwa, mengakibatkan bahwa dan kata sejenisnya. Dalam kalimat argumen, kadang tidak secara eksplisit menunjukkan kata-kata indikatornya, sehingga perlu dicerna mana yang menjadi premis dan konklusi. Menurut Cederblom dan Paulsen dalam Suwardjono (2010) dinyatakan bahwa jika terdapat lebih dari satu interpretasi terhadap suatu argumen, argumen harus diinterpretasi sehingga premis-premis yang terbentuk memberi dukungan yang paling kuat terhadap dukungan simpulan. Singkatnya, argumen yang dipilih adalah yang paling logis.

Beberapa contoh kata indikator premis dan indikator konklusi sebagai berikut:

Tabel 2.1 Bentuk Indikator Premis & Konklusi

Indikator Premis	Indikator Konklusi
Oleh karena	Karena itu, jadi, maka
Dengan demikian, oleh karena itu	Karena, mengingat
Oleh karena itu, disimpulkan bahwa, sebagai akibatnya	Dengan asumsi bahwa, dengan alasan bahwa

Sumber: adaptasi Suwardjono, 2010

Pada konteks akuntansi, infrastruktur pengetahuan akuntansi perlu dibangun agar dapat menjadi dasar asumsi, prinsip dan konsep pengetahuan akuntansi. Dengan menjadikan infrastruktur ini ilmiah, para pihak dapat mempromosikan status akuntansi di antara ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, tanpa pembenaran, penalaran, dan argumentasi, pihak-pihak tidak dapat memiliki klaim ilmiah. Teori akuntansi pada akhirnya harus memungkinkan pembuat standar dapat menyimpulkan standar itu sendiri. Mempertimbangkan dampak teori akuntansi pada penetapan standar. Hal yang menjadi fokus adalah apakah jenis penalaran yang diterapkan dalam mengembangkan teori akuntansi dan penetapan standar akuntansi adalah argumen deduktif atau argumen induktif. Pada riset akuntansi argumen deduktif dan induktif dapat dilakukan untuk menguji teori dan standar akuntansi.

Teori-teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan simbol-simbol yang dalam filsafat pengetahuan dikenal sebagai semiologi. Semiologi terdiri dari 3 elemen teori, yaitu (a) Sintektik: berurusan dengan tata bahasa atau hubungan antara simbol dan simbol, (b) Semantik: menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. (c) Pragmatis: menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol pada seseorang (Lihat, Patti et al., 2021). Dalam konteks akuntansi, teori akuntansi erat kaitannya dengan aspek pragmatis, yaitu bagaimana konsep dan praktik akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang (Manullang, 2005).

2.6 Argumen Deduktif

Argumen deduktif merupakan penalaran yang valid dimana tidak mungkin untuk menerima premis tetapi menolak kesimpulan. Pendekatan deduktif dalam membangun teori akuntansi dimulai dengan menentukan tujuan (Zalaghi & Khazaei, 2016). Segera setelah tujuan ditentukan, definisi dan

asumsi harus diklarifikasi. Pada tahap selanjutnya, peneliti akan mengembangkan struktur logis berdasarkan definisi dan asumsi untuk mencapai tujuan. Metodologi ini biasanya bergerak dari umum ke khusus, karena peneliti perlu mengembangkan struktur logis untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada definisi dan asumsi. Validitas teori apa pun yang disimpulkan dari proses ini sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam mengidentifikasi berbagai komponen proses akuntansi dan keterkaitannya secara logis.

Karena argumen deduktif bergerak dari umum ke khusus, maka penelitian yang mendasarkan pada argumen deduktif akan menyusun hipotesis berdasarkan teori-teori yang ada dan mengkaitkan fenomena dengan asumsi umum untuk kemudian bergerak pada asumsi khusus. Oleh karena itu pendekatan deduktif menyimpulkan hasil dari premis-premis. Jika premis-premis diterima, maka penarikan simpulan yang dilakukan dapat diterima. Namun demikian, untuk mendapatkan simpulan, tentu harus melalui penggunaan metoda penelitian yang relevan. Jika sebuah argumen deduktif baik valid atau tidak valid namun tidak ada tingkat validitas, maka tidak ada pilihan atau keputusan dalam menerapkan argumen tersebut dan tidak ada penilaian yang diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. Penalaran deduktif dapat dicontohkan sebagai berikut:

Jika pasar properti perumahan lesu, maka pasar modal akan lesu. Pasar properti perumahan lesu. Oleh karena itu, pasar modal akan juga lesu.

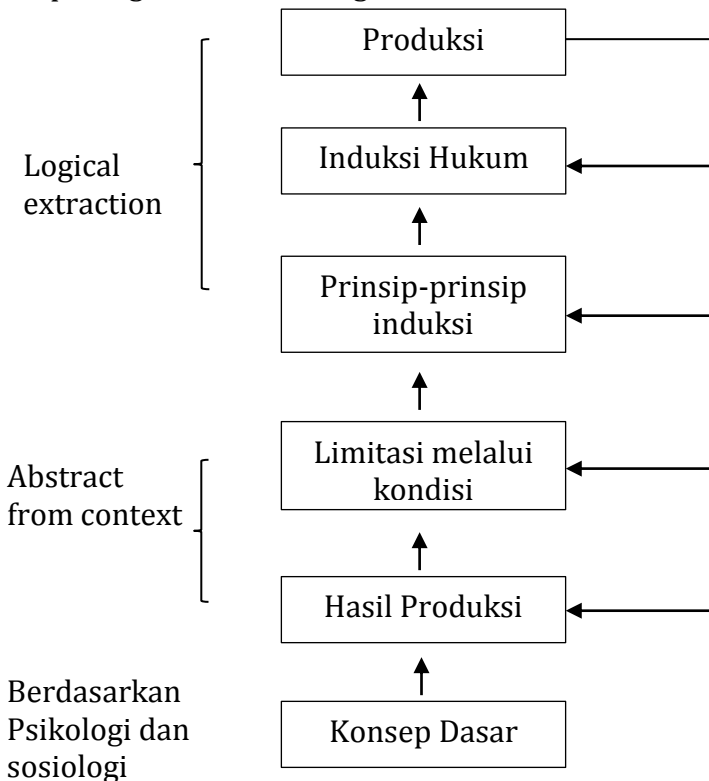
Pada bentuk penalaran deduktif, suatu penalaran itu dikenal sebagai silogisme. Silogisme terdiri atas premis mayor, premis minor dan konklusi. Pada silogisme, konklusi akan benar apabila kedua premis benar. Premis mayor menjelaskan kata anteseden dan konsekuen, sedangkan premis minor menegaskan anteseden atau menyangkal konsekuen. Misalnya: Premis mayor: Semua hewan herbivora mempunyai paru-paru

Premisi minor : Kambing hewan herbivora

Konklusi : Kambing mempunyai paru-paru

Pada kalimat "semua hewan herbivora" merupakan anteseden, dan "mempunyai paru-paru" sebagai konsekuen. Premis minor akan menegaskan anteseden maka " kambing hewan herbivora" maka simpulan menjadi " kambing mempunyai paru-paru".

Suatu teori akuntansi berdasarkan metodologi deduktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Teori Akuntansi Berdasarkan Metodologi Deduktif

Sumber: Iselin R. (1971) dalam Zalaghi & Khazaei (2016)

Pada tahap awal pembentukan suatu teori akuntansi dengan dasar deduktif adalah dengan memilih konsep dasar akuntansi. Pada tahap selanjutnya dengan melandaskan pada konsep dasar sebelumnya menyatakan tujuan akuntansi. Mengikuti tujuan-tujuan tersebut, kemudian postulat-postulat akan dijelaskan yang tentu bergantung pada tahap sebelumnya. Setelah itu, prinsip-prinsip, aturan dan prosedur ditarik dari prinsip yang terbangun dengan penalaran deduktif tersebut. Sedangkan aturan dan prosedur dapat digunakan untuk membentuk hasil. Hasil tersebut digunakan sebagai suatu uji teori fundamental. Dengan pendekatan ini, asumsi pada suatu teori harus secara jelas dinyatakan, sehingga hasil dapat diuji ulang dengan cermat. Konsekuensinya, jika hasil uji ulang ternyata ditemukan perbedaan maka akan mudah mendapatkan penyebabnya untuk perbaikan selanjutnya.

2.7 Argumen Induktif

Pada penalaran induktif, argumen dimulai dari pengamatan khusus yang kemudian ditarik simpulan yang digeneralisasikan. Singkatnya, induktif dimulai dari hal khusus ke umum. Pada pendekatan induktif, setelah memilih sejumlah observasi dengan tepat sesuai dengan metodologinya, seseorang dapat menggeneralisasi kesimpulan untuk semua atau kelompok kondisi dan situasi yang sama (Zalaghi & Khazaei, 2016). Generalisasi ini perlu diuji, beberapa di antaranya mungkin diverifikasi dan beberapa ditolak. Dengan demikian, semua prinsip yang diturunkan berdasarkan penalaran induktif secara teoritis dapat difalsifikasi. Dalam proses induksi, peneliti sebagai pengamat, harus jujur, tanpa prasangka dan bias, dan dengan pikiran yang tidak memihak, mencatat apa yang mereka amati. Kemudian pengamatan ini membentuk dasar di mana teori dan hukum dibangun yang membentuk pengetahuan ilmiah.

Pada bidang Akuntansi, proses induksi dimulai dengan pengamatan data akuntansi seperti penjualan, pembelian, rasio keuangan, arus kas, hutang, modal, dan lainnya. Pengamatan data keuangan dari sejumlah perusahaan kemudian dipelajari dengan cermat, dan jika data memiliki tren tertentu, maka berdasarkan data tersebut, peneliti dapat memprediksi misalnya pendapatan pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Khemlani, S. S. 2018. Reasoning. Stevens' handbook of experimental psychology and cognitive neuroscience, 3, 1-45.
- Manullang, L. 2005. Accounting Theory with Event Approach (Case Disclosure of Corruption). Speech on the Inauguration of Professors in Accounting Science was not published. Jakarta: STIE IBK.
- Munson, M. & Black, A. 2017. The Elements of Reasoning, Seventh Edition. Boston: Cengage
- Patty, T. F. Q. ., Lamawitak, P. L. ., Goo, E. E. K. ., & Herdi, H. . 2021. Positive And Normative Accounting Theory: Definition And Development. International Journal Of Economics, Management, Business, And Social Science (IJEMBIS), 1(2), 184–193
- Paul, R. & Elder, L. 1997. Foundation For Critical Thinking, Online at website: www.criticalthinking.org)
- Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi Perakayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit BPFE - Yogyakarta.
- Walton, D. N. 1990. What is Reasoning? What is an argument?. Journal of Philosophy, Vol. 87 Issue 8. Pp. 399-419.
- Zalaghi, H. & Khazaei, M. 2016. The Role of Deductive and Inductive Reasoning in Accounting Research and Standard Setting. Asian Journal of Finance & Accounting. Vol. 8 No.1: 227-241.

BAB 3

PEREKAYASAAN PELAPORAN KEUANGAN

Oleh Asriani Junaid

3.1 Laporan Keuangan Dan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan yang merupakan media utama untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum (PABU) terutama standar akuntansi, menentukan bentuk isi, dan susunan laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK no. 1) Penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*General pupose financial statement*) yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. ((IAI), 2018). Di Indonesia standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan terdiri dari SAK, SAK EMKM, SAK ETAP, SAK EP, SAK Syariah (Indonesia, 2018). Serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No. 71 tahun 2010.

Pelaporan keuangan memuat pengaturan, penyampaian informasi akuntansi dalam suatu masyarakat (Negara) untuk mencapai tujuan tertentu (sosial dan ekonomik). Lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan sangat kompleks karena

produk akuntansi adalah informasi, komoditas yang berpengaruh dan penting. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh pengguna informasi dimana tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap informasi, ada investor yang bereaksi positif terhadap informasi karena informasi tersebut dianggap membantu dalam memprediksi informasi perusahaan. Ada investor yang bereaksi kurang positif terhadap informasi karena dianggap tidak bisa diandalkan atau karena informasi tersebut bersifat historis. Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan sepenuhnya kepada pengguna laporan keuangan, dalam konteks ini, informasi yang relevan didefinisikan sebagai informasi mengenai prospek ekonomi perusahaan di masa depan, terutama terkait dengan deviden, arus kas dan profitabilitas (Scoot, 2015). (Belkaoui, 2012), pelaporan keuangan tidak hanya memuat laporan keuangan namun juga cara-cara lain dalam mengkomunikasikan informasi yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan informasi yang diberikan oleh sistem akuntansi yaitu informasi mengenai sumber daya, kewajiban, penghasilan perusahaan, dan lain-lain.

Tujuan laporan keuangan menurut (Hans, 2016) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan wujud pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Dengan demikian laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk tujuan khusus, misalnya dalam rangka likuidasi entitas atau menentukan nilai wajar entitas untuk tujuan merger dan akuisisi. Juga tidak disusun khusus untuk memenuhi kepentingan suatu pihak tertentu saja misalnya

pemilik mayoritas. Pemilik adalah pemegang instrumen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Akuntansi yang dipraktekkan di dalam suatu wilayah negara sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah tetapi dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan (social, ekonomi, politik) tempat akuntansi dijalankan. Oleh karena itu struktur dan praktik akuntansi akan berbeda Antara Negara yang satu dan lainnya. (Suwardjono, 2016)

3.2 Proses Perekrutannya

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekrutannya penyediaan jasa secara nasional berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Agar manfaat akuntansi dapat dirasakan, pengetahuan perekrutannya tersebut harus diaplikasikan dalam suatu wilayah (negara). (Suwardjono, 2016) Wujud aplikasi ini adalah terciptanya suatu mekanisme pelaporan keuangan (*financial reporting*) nasional yang dengannya unit-unit organisasi bisnis, nonbisnis, dan pemerintahan dalam suatu negara menyediakan data dan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan yang dianggap paling dominan dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan negara (khususnya tujuan ekonomik dan sosial).

Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomik (alam, manusia dan keuangan) secara efektif dan efisien untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Kebijakan dan regulasi pemerintah (dalam berbagai bentuk undang-undang, ketetapan, dan

peraturan) yang secara langsung mempengaruhi para pelaku dan sistem ekonomi Negara merupakan wahana dalam alokasi sumber daya ekonomik.

Akuntansi dapat menjadi wahana dan mempunyai peran yang nyata dalam alokasi tersebut kalau informasi yang dihasilkan sengaja dirancang agar dapat mempengaruhi perilaku para pengambilan keputusan ekonomik dominan untuk menuju ke keefektifan dan efisiensi alokasi sumber daya negara. Peran seperti ini dapat terjadi mengingat karakteristik akuntansi sebagai teknologi. Teknologi yang diterapkan harus dipilih dan dirancang dengan baik dan tidak selayaknya akuntansi dibiarkan berkembang secara alamiah atau bahkan liar tanpa haluan yang jelas. Definisi akuntansi menurut (Suwardjono, 2016) seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa secara nasional berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengembangan keputusan ekonomik.

Agar manfaat akuntansi dapat dirasakan, pengetahuan perekayasaan tersebut harus diaplikasikan dalam suatu wilayah (Negara). Wujud aplikasi ini adalah terciptanya suatu mekanisme pelaporan keuangan nasional yang dengannya unit-unit organisasi bisnis, nonbisnis, dan pemerintahan dalam suatu Negara menyediakan data dan menyampaikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan yang dianggap paling dominan dan pengaruh dalam pencapaian tujuan Negara (khususnya tujuan ekonomik sosial).

Akuntansi dapat dipandang apakah sebagai sains atau teknologi. Jika dipandang sebagai teknologi dengan seperangkat pengetahuan sebagai teknologi, orang akan mampu merekayasa suatu mekanisme pelaporan keuangan untuk suatu Negara. Salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan perekayasaan ini adalah akolasi sumber daya

ekonomik secara efektif dan efisien. Pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk mengendalikan alokasi tersebut secara otomatis dengan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan ekonomik yang dominan melalui informasi laporan keuangan. pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk pengendalian alokasi sumber daya secara otomatis melalui mekanisme sistem ekonomik yang berlaku. Pengendalian secara otomatis dicapai dengan ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan yaitu prinsip akuntansi berterima umum (*generally accepted accounting principles/GAAP*) termasuk didalamnya standar akuntansi (*accounting standards*). PABU menentukan bentuk, isi, dan susunan laporan atau statemen keuangan sebagai suatu medium utama atau ciri sentral (*a central feature*) pelaporan keuangan. Setelah menetapkan PABU, selanjutnya menerapkan PABU dalam lingkup mikro yaitu perusahaan secara individual. PABU merupakan cara tertentu (*a certain manner*) untuk melaporkan kejadian ekonomik yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Sehingga akuntansi pada tingkat mikro (perusahaan) yaitu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakuan, dan penyajian suatu objek pelaporan keuangan dengan cara tertentu untuk menyediakan informasi relevan kepada pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Perekayasaan pelaporan keuangan dalam pembahasan ini bukan 'strategic licik' yang dilakukan oleh oknum organisasi atau perusahaan tertentu baik di luar negeri maupun dalam negeri. Seperti kasus penomenal Enron & Worldcom, perusahaan raksasa tersebut telah melakukan kebohongan publik atas laba yang sebenarnya tidak ada (fiktif). Apalagi tujuannya bila bukan untuk menaikkan citra perusahaan. Bila citra perusahaan naik, harga saham di bursa juga akan naik karena kepercayaan publik meningkat. Bila hal tersebut terjadi,

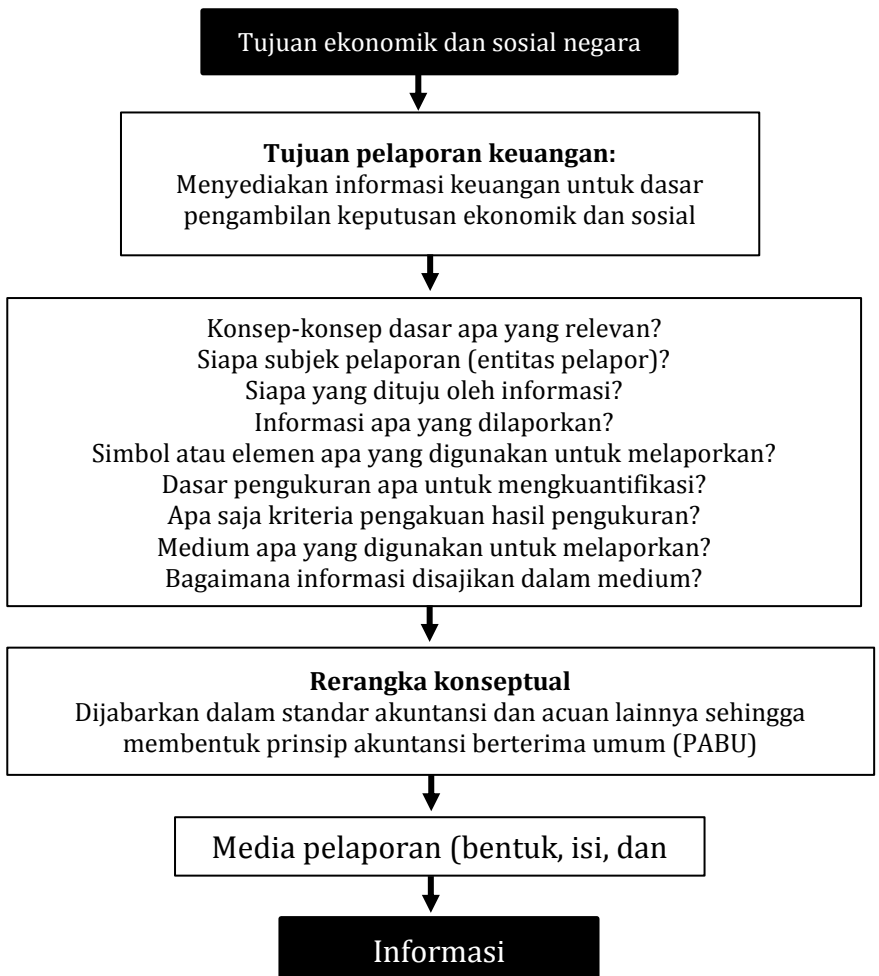
perusahaan akan meraup banyak keuntungan dari kebohongan yang mereka lakukan. Sama halnya dengan di Indonesia, hanya dengan berbekal “sedikit” merekayasa laporan keuangan, pihak manajemen perusahaan yang tidak bertanggungjawab bisa “mempercantik” wajah laporan keuangan menjadi lebih “enak” untuk ditampilkan di depan publik. Masyarakat (publik) akan menyangka bahwa perusahaan memiliki laba yang besar dan mereka akan terdorong untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Nyatanya, semua itu hanya omong kosong belaka. Laporan keuangan yang tadinya berfungsi sebagai alat informasi untuk pengambilan keputusan, seolah telah berubah menjadi bomerang yang mematikan. Bayangkan saja, tidakkah publik akan tergoda melihat laba perusahaan yang begitu tinggi. Meski pada kenyataannya semua itu hanyalah kebohongan semata

Perekayasaan pelaporan keuangan dalam pembahasan ini, adalah Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara. Secara umum perekayasaan pelaporan keuangan adalah proses terencana dan sistematis yang melibatkan pemikiran, penalaran, dan pertimbangan, (*exercise of judgment*) untuk memilih dan menentukan teori, pengetahuan yang tersedia (*available knowledge*), konsep, metode, teknik, serta pendekatan untuk menghasilkan suatu produk (konkret atau konseptual). Perekayasaan Pelaporan Keuangan ini mengikuti proses yang sama baik pada tingkat makro (nasional) maupun pada tingkat mikro (perusahaan). Hasil perekayasaan dalam hal ini dapat berupa seperangkat prinsip umum, (*a set of broad principles*), seperangkat doktrin, (*a body of doctrine*), atau suatu struktur/ rerangka konsep-konsep yang terpadu (*a structure or scheme of interrelated ideas*). Salah satu hal penting di dalam definisi

akuntansi adalah informasi keuangan. Sederatan angka dalam akuntansi belum tentu merupakan sebuah informasi jika angka-angka tersebut tidak mempunyai makna atau nilai bagi pembacanya. Nilai dari informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan. (Sujadi, 2011).

3.3 Perekayasaan Sebagai Proses Deduktif

Akuntansi keuangan yang dikenal luas sekarang ini dikembangkan atau direkayasa atas dasar premis bahwa investor dan kreditor adalah pihak yang dituju informasi. Efek komunikasi yang ingin dicapai adalah agar pihak yang dituju tersebut bersedia menanamkan dana kekegiatan ekonomik yang dibutuhkan publik melalui perusahaan. Karena perilaku investor dan kreditor menjadi sasaran pemengaruhan, pesan yang ingin disampaikan mengenai perusahaan misalnya likuiditas, profitabilitas. Dianggap pesan tersebut merupakan masukan dalam pengambilan keputusan investor dan kreditor. Pesan tersebut disampaikan melalui media laporan keuangan. Dengan demikian akuntansi dalam tataran semiotika sebagai model komunikasi bisnis dapat dikatakan bahwa akuntansi adalah Bahasa (Belkaoui, 2016). Perekayasaan akuntansi berkepentingan dengan pertimbangan untuk memilih dan mengaplikasikan ideology, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara teoritis dan praktis untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial bernegara dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomik, politik, dan budaya Negara. Proses perekaysaan akuntansi dapat dilukiskan dalam Gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1 Proses Prekayasaan
Sumber: Suwardjono (2016)

Ditinjau dari pendekatan penalaran, proses yang dilukiskan dalam Gambar 3.1 merupakan proses penalaran deduktif-normatif. Tujuan sosial dan ekonomik Negara dianggap telah disepakati atau sesuatu yang given dan menjadi

premis dalam penalaran Aspek pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan mengarahkan perekayasa agar menentukan siapa pihak yang dituju oleh informasi dalam lingkungan negara yang dipostulatkan. Dalam hal ini, pengambil keputusan ekonomik yang paling dominan/berpengaruh biasanya menjadi fokus pelaporan. Aspek evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak pemakai, biasanya dipertimbangkan sebagai pihak yang mempunyai tingkat kecanggihan tertentu dan bukan pihak yang awam. Menurut FASB, pemakai adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang kegiatan bisnis dan ekonomik dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang layak.

Aspek penentuan dan pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan, berkaitan dengan penentuan objek-objek dan kegiatan-kegiatan fisik perusahaan dan lingkungannya yang harus dilaporkan beserta maknanya yang relevan dengan pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Aspek evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian informasi, berkaitan dengan masalah bagaimana kegiatan fisik perusahaan diterjemahkan dalam mata uang yang bermakna. Dengan kata lain, aspek ini membahas pengembangan dan pendefinisian elemen laporan yang menjadi sarana untuk mengkomunikasi informasi tentang operasi suatu unit perusahaan dan lingkungannya.

(Hendriksen, 2014) menguraikan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan rerangka teoritis akuntansi, yaitu : 1. Pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha (entitas pelapor) dan lingkungannya. 2. Pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat. 3. Evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju (pemakai) dan kemampuan untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang disajikan. 4. Penentuan atau pemilihan tentang apa yang harus

dilaporkan 5. Evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian untuk mengkomunikasi informasi tentang perusahaan dan lingkungannya. 6. Penentuan dan evaluasi terhadap kendala – kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungannya. 7. Pengembangan dan penyusunan pernyataan umum yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dalam menyusun standar akuntansi. 8. Perancang bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi untuk menciptakan, menangkap, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi berterima umum.

Aspek penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran, adalah identifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif pendefinisian, pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Aspek pengembangan dan penyusunan pernyataan umum, merupakan penghubung antara proses pada tingkat makro dan mikro. Dalam langkah ini, hasil pemikiran dalam bentuk pernyataan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen. Atas dasar dokumen ini, suatu badan, komite, atau dewan dapat dibentuk dan disertai tugas untuk menjabarkannya dalam bentuk standar akuntansi. Apek perancang bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi, yang dipertimbangkan dalam proses pelaksanaan hasil perekayasaan di tingkat perusahaan mikro bila standar akuntansi telah tersusun.

3.4 Siapa Merekayasa

Akuntansi yang dipraktikkan dalam suatu wilayah negara tidak terjadi begitu saja secara ilmiah, namun dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Sehingga, struktur dan praktik akuntansi pada

setiap wilayah negara akan berbeda-beda. Untuk dapat mengembangkan suatu praktik akuntansi pada suatu wilayah negara, tidak hanya belajar praktik akuntansi saja melainkan terdapat gagasan-gagasan yang melandasi praktik tersebut yang membentuk bidang pengetahuan teori akuntansi. Teori akuntansi membahas perlakuan-perlakuan dan model-model alternatif yang dapat menjadi jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik. Pada dasarnya penerapan praktik akuntansi yang diterapkan di suatu negara adalah bentuk output/ hasil dari perencanaan dan pengembangan guna mencapai suatu tujuan sosial tertentu.

(Suwardjono, 2016) dengan pengembangan dasar pemikiran bahwa akuntansi merupakan teknologi. Akuntansi dipandang sebagai alat institusi sosial untuk menyediakan pedoman pengukuran dan metode untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku pengambil keputusan ekonomik yang dominan dalam lingkup perusahaan ataupun negara. Berdasarkan pandangan akuntansi sebagai teknologi maka akuntansi dipandang sebagai akuntansi normatif berisi tentang pernyataan atau penalaran yang dilandasi oleh pertimbangan nilai. untuk menilai apa yang sebaiknya dilakukan atau diputuskan untuk tujuan sosial dan ekonomik. Agar manfaat akuntansi dapat dirasakan, pengetahuan perencanaan tersebut harus diaplikasikan dalam suatu wilayah (negara). Wujud aplikasi ini adalah terciptanya suatu mekanisme pelaporan keuangan (*financial reporting*) nasional yang dengannya unit-unit organisasi bisnis, nonbisnis, dan pemerintahan dalam suatu negara menyediakan data dan menyampaikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan yang dianggap paling dominan dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan negara (khususnya tujuan ekonomik dan sosial).

Berangkat dari tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomik dan sosial maka proses proses perekayasaan bukan dilakukan perorangan tetapi tim yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut berdampak pada keputusan sosial ekonomi secara jangka panjang. Tetapi untuk idealnya penyediaan informasi diserahkan kepada profesi dan pelaku bisnis (disebut dengan pengaturan sendiri-self regulation), dengan asumsi bahwa profesi dan pelaku bisnis adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan pemakai informasi keuangan. Pihak manajemen suatu perusahaan atau suatu entitas siapa saja harus mengetahui pengguna informasi pelaporan keuangan dan keputusan apa yang akan di ambil dari informasi tersebut. Adapun pengguna informasi laporan keuangan adalah

1. Pihak Internal, adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan tersebut, yaitu:
 - a. Pemilik perusahaan, Pemilik perusahaan tentunya ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut maju atau tidak selama periode tertentu. Untuk melihat maju tidaknya perusahaan, pemilik perusahaan bisa melihatnya pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan.
 - b. Karyawan, Karyawan juga memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu untuk melihat laba perusahaan dari tahun ke tahun. Misalnya laba perusahaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan gaji mereka tak kunjung naik, mereka bisa mengajukan protes atau demo.
2. Pihak Eksternal
 - a. Investor, Sebagai pihak yang menanamkan modalnya ke perusahaan, investor tentu sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan. Investor tentunya ingin melihat apakah ia rugi atau untung telah berinvestasi di perusahaan tersebut. Bila laba perusahaan banyak, maka investor mungkin akan memutuskan untuk menambah investasi. Sebaliknya, bila perusahaan merugi, mungkin investor tidak akan berinvestasi lagi di

perusahaan tersebut. b. Pemegang Saham, Fungsi laporan keuangan terhadap pemegang saham adalah untuk melihat pembagian keuntungan yang akan mereka dapatkan berdasarkan laba perusahaan yang terkandung pada laporan keuangan. Kreditur, Hampir sama dengan investor, sebagai pihak yang meminjamkan modal, tentu kreditur ingin mengetahui apakah perusahaan tersebut laba atau rugi. Bagaimana prospek perusahaan ke depannya berdasarkan analisa laporan keuangan yang ia lihat. d. Pemerintah, Fungsi laporan keuangan untuk pemerintah tentunya adalah untuk menentukan besarnya pajak yang akan dipungut. e. Masyarakat Umum, Meski masyarakat pada umumnya, mungkin saja merupakan masyarakat yang awam dengan informasi yang terdapat pada laporan keuangan, namun mereka berhak tahu akan kondisi perusahaan terutama perusahaan yang telah go public. Setidaknya masyarakat bisa melihat tentang laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. begitu dahsyatnya fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan yang hanya terdiri dari 5 jenis tersebut (neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) nyatanya bisa memberikan informasi yang begitu luas kepada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Hanya dengan bermodalkan laporan keuangan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan bisa memutuskan, apa yang akan mereka lakukan terhadap perusahaan.

Jadi pihak yang melakukan perekayasaan pelaporan keuangan harus mengetahui apa kebutuhan pihak pengguna dari informasi keuangan yang telah disusun. Dengan keyakinan bahwa perekayasaan pelaporan keuangan yang dilakukan bukan untuk meyesatkan pengguna informasi, seperti hasil penelitian (Sujadi, 2011) Perekayasaan Pelaporan Keuangan ini mengikuti proses yang sama baik pada tingkat makro (nasional) maupun pada tingkat mikro (perusahaan). Hasil perekayasaan dalam hal ini dapat berupa seperangkat prinsip

umum, (*a set of broad principles*), seperangkat doktrin, (*a body of doctrin*), atau suatu struktur/ rerangka konsep-konsep yang terpadu (*a structure or scheme of interrelated ideas*). Salah satu hal penting di dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Sederatan angka dalam akuntansi belum tentu merupakan sebuah informasi jika angka-angka tersebut tidak mempunyai makna atau nilai bagi pembacanya. Nilai dari informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

3.5 Aspek Semantik Dalam Perekayasaan

Teori semantik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena dan istilah/ symbol yang mewakilinya. Teori ini menjelaskan mengenai definisi operasional praktik, walau dirumuskan secara logis harus bisa menggambarkan peristiwa yang terjadi secara empiris di dunia nyata.

Teori ini sebenarnya adalah bagaimana laporan keuangan akan memberikan arti bagi pemakai informasi akuntansi. Maka dilakukanlah pengujian melalui penelitian apakah informasi akuntansi yang dibuat oleh penyusun laporan keuangan dapat dipahami artinya oleh pemakai sehingga konsisten dengan teori tersebut. Hal ini terjadi karena angka dan klasifikasi variasi sesuai pemahaman pemakai yang terjadi, sehingga perlu dicari cara memperbaiki informasi akuntansi agar bisa diinterpretasikan sesuai dengan observasi dan pengalaman manusia. (Amin, 2018). Teori akuntansi semantik menekankan pembahasan pada masalah penyimbolan dunia nyata atau realitas (kegiatan perusahaan) ke dalam tanda-tanda bahasa akuntansi (elemen statemen, keuangan) sehingga orang dapat membayangkan kegiatan fisis perusahaan tanpa harus secara langsung menyaksikan kegiatan tersebut. Teori ini berusaha untuk menjawab apakah

elemen-elemen statemen keuangan benar-benar merepresentasi apa yang memang dimaksudkan dan untuk meyakinkan bahwa makna yang terkandung dalam simbol pelaporan tidak disalah artikan oleh pemakai. Teori ini berusaha untuk menemukan dan merumuskan makna-makna penting pelaporan keuangan. (Suwardjono, 2016). Secara konseptual, informasi akuntansi dalam laporan terefleksi dalam tiga unsur yaitu elemen (objek) yang menyimbolkan kegiatan, jumlah rupiah sebagai pengukur (*size*), dan hubungan (*relationship*) antar elemen. Objek, pengukur, dan hubungan itulah yang membentuk makna yang akhirnya menjadi informasi. Dengan kata lain, hubungan antara elemen merupakan informasi semantik. Oleh karena itu teori ini banyak membahas pendefinisian sebagai bahan pendefinisian makna elemen (objek). pengidentifikaasian atribut atau karakteristik elemen sebagai bahan pendefinisian dan penentuan jumlah rupiah (pengukuran) elemen sebagai salah satu atribut. Pendefinisian merupakan langkah penting dalam teori semantik karena kesalahan pemaknaan mempunyai implikasi penting dalam pengoperasian akuntansi, misalnya dalam pendefinisian aset, penguasaan (*control*) bukannya pemilikan (*ownership*) yang dijadikan kriteria karena kalau kepemilikan menjadi kriteria aset akan banyak objek yang tidak masuk sebagai aset. Dalam teori ini menjelaskan bahwa laba (*earnings*) atas dasar asas akrual merupakan indikator kemampuan mendatangkan kas di masa depan, laba bukan sekedar kenaikan kas dalam suatu periode.

Informasi semantik dalam pelaporan keuangan antara lain adalah likuiditas, solvensi, profitabilitas, dan efisiensi. Jadi, teori akuntansi semantik berkepentingan dengan pelambangan dan penafsiran objek akuntansi untuk menghasilkan informasi semantik yang bermakna bagi pemakai laporan. Agar komunikasi akuntansi efektif, penyampaian informasi semantik

(makna suatu objek) tidak dapat dipisahkan dengan informasi sintaktik (struktur akuntansi).

3.6 Proses Saksama

Proses perekrutan pelaporan keuangan membutuhkan kualitas yang tinggi mengingat informasi yang dihasilkan digunakan untuk pengambilan keputusan secara jangka panjang sehingga proses perekrutan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang saksama dan teliti. Proses saksama (*due process*) adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan rerangka konseptual maupun standar akuntansi yang mempunyai status sebagai pernyataan resmi yang memiliki tingkat keotoritatifan yang tinggi. Seperti lembaga pertama akuntansi di Amerika yaitu Financial Accounting Standar Board (FASB) melakukan proses saksama (*Due proses*) dimulai dengan melakukan evaluasi masalah, mencari masalah sebenarnya. Kemudian melakukan riset dan analisis yang menghasilkan Laporan Riset. Menyusun dan mendistribusi Memorandum Diskusi kepada pihak yang berkepentingan yang berisi analisis terinci semua aspek masalah yang telah disidangkan pada tingkat awal. Mengadakan dengar pendapat umum untuk membahaskan Memorandum Diskusi, menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas Memorandum Diskusi. Menerbitkan *Exposure Draft* (ED) untuk mendapatkan tanggapan tertulis. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis tentang ED. Memutuskan untuk melanjutkan menjadi statemen atau tidak. Menerbitkan statemen yang bersangkutan. Prosedur diatas membuktikan bahwa suatu pernyataan memerlukan waktu yang lama untuk dapat disahkan dan diterbitkan. Sama halnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan IAPI (Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, dalam melakukan

proses saksama membutuhkan waktu yang lama dalam menerbitkan suatu pernyataan (*statement*). (Suwardjono, 2016) menjelaskan dalam bukunya bahwa proses saksama yang dilakukan IAI (DSAK dan DSPAP) harus mengikuti proses sebagai berikut:

1. Sebelum suatu standar diputuskan untuk diberlakukan, konsep usulan (*exposure draft*) materi yang akan dijadikan standar tersebut harus disebarluaskan secara umum, termasuk kepada cabang-cabang dan anggota untuk dimintakan tanggapan, sekurang-kurangnya selama tiga bulan.
2. Dengan mempertimbangkan tanggapan yang diterima dari masyarakat, komite dalam rapatnya dapat mengambil keputusan untuk mengusulkan kepada Pengurus Pusat agar memberlakukan/mengesahkan standar tersebut.
3. Berdasarkan usulan ini, Pengurus Pusat memutuskan untuk memberlakukan atau mengesahkannya.

Setelah proses tersebut dilakukan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik berwenang untuk menentukan materi yang akan dibahas dan diusulkan untuk menjadi standar yang akan diberlakukan di Indonesia.

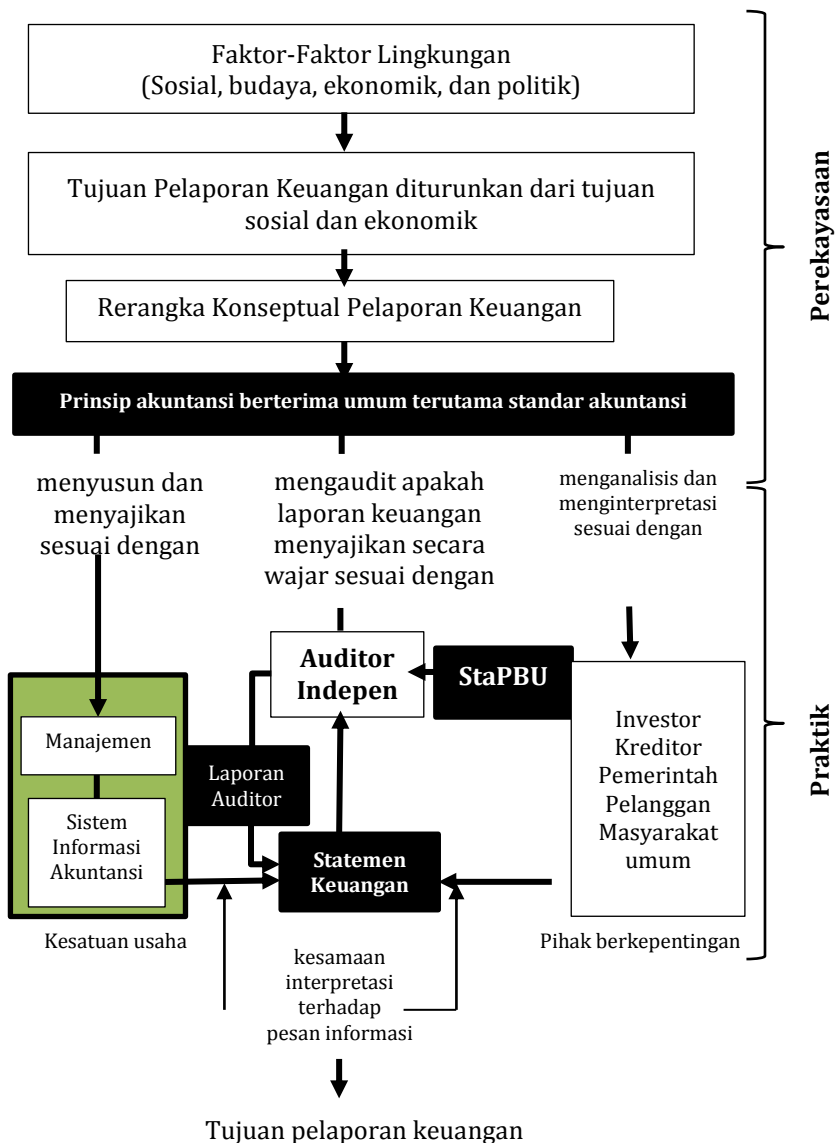
3.7 Konsep Informasi Akuntansi

Hasil Perekrayasaan pelaporan keuangan akan menjadi konsep-konsep dan dituangkan dalam dokumen resmi yang biasa di sebut dengan rerangka konseptual (*conceptual framework*). Kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren dari tujuan dan fundamentalis yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan akuntansi keuangan

dan laporan keuangan. Dimana kerangka konseptual akuntansi keuangan menjadi acuan dalam menyusun dan menerbitkan standar akuntansi keuangan. Organisasi akuntansi di Amerika (FASB) menjabarkan *conceptual framework* dalam bentuk standar pernyataan resmi yaitu *Statement of financial accounting concept* (SFAC) yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tujuan dari pelaporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pengguna di Amerika. Sama halnya di Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan DSAP dan DSPAP menuangkan dalam bentuk PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan). Sehingga sangat berguna dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas di Indonesia.

Jadi secara teoritis, rerangka konseptual seharusnya merupakan fondasi rerangka pedoman PABU (prinsip akuntansi berlaku umum) dan harus direkayasa terlebih dahulu sebelum standar. Oleh karena itu standar yang diturunkan atas dasar rerangka konseptual mestinya konsisten baik dengan rerangka konseptual maupun antar standar. Agar operasional dan efektif dalam mempengaruhi praktek, rerangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi sebagai pedoman dalam perlakuan akuntansi suatu objek atau elemen. Tiga pengertian penting yang perlu dibedakan dan dikenali dalam penjabaran rerangka konseptual adalah prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PABU.

Bila proses perekayasaan telah selesai dan diaplikasikan, rerangka PABU sudah ditentukan serta pelaporan keuangan telah berlangsung maka pengertian akuntansi dan teori akuntansi menjadilah struktur akuntansi seperti Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Struktur Akuntansi: Perekayasaan dari Praktik
(Sumber: Suwarjono 2016)

3.8 Simpulan

Pelaporan keuangan adalah Bagaimana informasi akuntansi dalam suatu masyarakat (negara) diatur, disediakan, dan disampaikan untuk mencapai tujuan tertentu (sosial dan ekonomik). Pelaporan keuangan yang berjalan merupakan hasil dari perekeyasaan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi struktur dan proses. Laporan keuangan merupakan media utama atau ciri utama pelaporan keuangan, dasarnya adalah Prinsip akuntansi berterima umum (PABU) yang berbentuk standar akuntansi, untuk menentukan bentuk, isi, dan susunan statemen keuangan.

Akuntansi dapat dipandang apakah sebagai sains atau teknologi. Jika dipandang sebagai teknologi dengan seperangkat pengetahuan sebagai teknologi, orang akan mampu merekayasa suatu mekanisme pelaporan keuangan untuk suatu Negara. Salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan perekayasaan ini adalah akolasi sumber daya ekonomik secara efektif dan efisien. Pelaporan keuangan nasional harus direkayasa secara seksama untuk mengendalikan alokasi tersebut secara otomatis dengan mempengaruhi perilaku pengambil keputusan ekonomik yang dominan melalui informasi laporan keuangan.

Siapa Merekayasa? Berangkat dari tujuan pelaporan keuangan yaitu menyediakan informasi keuangan untuk dasar pengambilan keputusan ekonomik dan sosial maka proses proses perekayasaan bukan dilakukan perorangan tetapi tim yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut berdampak pada keputusan sosial ekonomi secara jangka panjang. Tetapi untuk idealnya penyediaan informasi diserahkan kepada profesi dan pelaku bisnis (disebut dengan pengaturan sendiri-*self regulation*), dengan asumsi bahwa profesi dan pelaku bisnis adalah pihak yang paling tahu akan kebutuhan pemakai informasi keuangan.

Informasi semantik dalam pelaporan keuangan antara lain adalah likuiditas, solvensi, profitabilitas, dan efisiensi. Jadi, teori akuntansi semantik berkepentingan dengan pelambangan dan penafsiran objek akuntansi untuk menghasilkan informasi semantik yang bermakna bagi pemakai laporan. Agar komunikasi akuntansi efektif, penyampaian informasi semantik (makna suatu objek) tidak dapat dipisahkan dengan informasi sintaktik (struktur akuntansi).

Hasil Perekayasaan pelaporan keuangan akan menjadi konsep-konsep dan dituangkan dalam dokumen resmi yang biasa di sebut dengan rerangka konseptual (*conceptual framework*). Kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem yang koheren dari tujuan dan fundamentalis yang saling terkait yang dapat mengarah pada standar yang konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A., 2018. *Filsafat Teori Akuntansi*.
- Belkaoui, A., 2016. *Teori Akuntansi, Terjemahan*. Edisi 5 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Hans, T. N., 2016. *Teori Akuntansi*. Jakarta: UI Jakarta.
- Hendriksen, E. S., 2014. *Accounting Theory*. s.l.:Homewood III, : Richard D. rwin Inc.
- IAI, 2018. *Standar Akuntansi Indonesia*. Salemba Empat, Edisi 2020
- Scoot, W. R., 2015. *Financial accounting theory*. Edisi 7 ed. Canada: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication..
- Sujadi, H. d., 2011. FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. *JURNAL STIE SEMARANG*, Volume VOL 3, NO 2, Edisi Juni 2011.
- Suwardjono, 2016. *Teori Akuntansi*. cetakan kesembilan ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

BAB 4

ASET

Oleh Rita Dwi Putri

4.1 Definisi Aset

Dewan Standar Akuntansi Keuangan menginterpretasikan aset sebagai manfaat ekonomi masa akan datang yang dapat diterima atau dikelola perusahaan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa yang lalu. Sementara itu, Australian Accounting Standards Board menjabarkan aset sebagai potensi jasa/keuntungan ekonomi masa akan datang yang dipelihara oleh lembaga keuangan dan dilaporkan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa yang lalu. Definisi aset yang diberikan oleh dewan standar akuntansi dan *Australian Accounting Standards Board* cukup luas. Hal ini karena aset dianggap memiliki manfaat ekonomi dan tidak dianggap sebagai sumber daya ekonomi karena manfaat ekonomi yang tidak membatasi bentuk atau jenis pengetahuan atau sumber daya ekonomi yang dapat diklasifikasikan sebagai aset. Selain itu, dewan standar akuntansi dan *Australian Accounting Standards Board* tidak membatasi aset real, aset keuangan dan antara organisasi laba dan nirlaba.

Selain definisi aset di atas, Profesor John Cuning telah menyatakan bahwa kepentingan masa akan datang berupa uang, atau kepentingan masa akan datang yang dapat diubah menjadi uang, hak atas kepentingan tersebut secara hukum, atau karena keadilan bagi individu tertentu atau jaminan sekelompok individu tertentu. Keuntungan ini hanya bermanfaat bagi orang tersebut atau sekelompok orang.

Standar Akuntansi Bord Statement 4, di sisi lain, mendefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi entitas yang dapat diakui dan dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk biaya tangguhan yang bukan sumber daya. Berikut adalah contoh sumber daya ekonomi:

1. Sumber daya ekonomi produktif
 - a. Bahan mentah, tanah, peralatan, dan sumber daya lain yang digunakan untuk produksi
 - b. Hak kontraktual untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas lain seperti penggunaan bangunan, dll.
2. Product seperti barang jadi , barang dalam proses
3. Uang
4. Klaim
5. Hak Pemilik

4.2 Karakteristik Aset

4.2.1 Karakteristik utama aset

Secara umum, objek yang diklasifikasikan sebagai aset memerlukan tiga karakteristik utama:

1. Manfaat Ekonomi Masa Akan Datang

Aset harus menentukan manfaat ekonomi masa akan datang yang relatif. Misalnya, uang tunai mungkin memiliki keuntungan atau layanan karena memiliki daya beli atau perdagangan dalam kaitannya dengan mata uang. Apa pun selain uang harus memiliki kegunaan ekonomi untuk diubah menjadi uang, yang digunakan untuk memproduksi menghasilkan barang atau jasa atau untuk memenuhi kewajibannya. Pada kenyataannya, manfaat ekonomi ini dapat dibawa ke bisnis / perusahaan dengan cara:

- a) Mampu dipergunakan sendiri atau dalam kombinasi dengan aset yang lain
- b) Mampu ditukarkan dengan aset lain

- c) Mampu dipergunakan untuk melunasi utang
- d) Mampu diberikan pemilik perusahaan

2. Entitas yang Dikelola atau Dikelola

Aset harus dimiliki dan dikelola oleh entitas. Namun, konsep penguasaan atau control lebih penting daripada konsep kepemilikan. Manajemen di sini berarti kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh, mempertahankan, mempertahankan, menukarkan, atau laba dari laba ekonomis dan mencegah pihak lain memperoleh laba tersebut. Ini didasarkan pada konsep substansi, bukan bentuk. Kepemilikan hanya memiliki implikasi hukum atau hukum. Menurut Most (1982) dalam (Suwardjono 2014), kepemilikan atau penguasaan suatu benda dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

- a) Pembelian (pembelian)
- b) Pemberian (hadiah)
- c) Penemuan
- d) Persetujuan
- e) Produksi atau informasi
- f) Jualan / Penjualan
- g) Pertukaran
- h) Peminjaman
- i) Pengkonsignaan
- j) Dan transaksi komersil lain yang diakui hukum atau kebiasaan usaha

3. Disebabkan oleh transaksi masa yang lalu

Aset yang terjadi sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa yang lalu adalah kriteria pertama suatu objek dikatakan sebagai aset. Kepemilikan atau kendali atas suatu aset harus mendahului suatu transaksi atau peristiwa keuangan. *Financial Accounting standar Bord* memasukkan transaksi atau peristiwa ini sebagai basis

aset karena dapat mempengaruhi peningkatan atau penurunan aset. Contohnya termasuk kenaikan harga, fluktuasi suku bunga, depresiasi, pencurian, kecelakaan dan bencana alam. Berbagai transaksi, peristiwa, atau situasi lain yang dapat menimbulkan pengakuan atau penangguhan manfaat finansial dari objek tersebut.

4.2.2 Karakteristik aset yang didukung

Fitur dukungan lebih meningkatkan atau mengkonfirmasi keberadaan aset, tetapi kurangnya dukungan tidak mencegah objek memenuhi syarat sebagai aset. Sifat-sifatnya adalah:

1. Biaya

Akuisisi aset akan memerlukan biaya atau pengeluaran. Jika biaya merupakan hasil perolehan suatu benda melalui pertukaran atau pembelian, maka benda tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aset, tetapi nilai biayanya harus diestimasi secara akurat untuk digunakan sebagai dasar pengakuan awal. Esensi utamanya adalah nilai ekonomi yang akan dicapai di Masa Akan Datang. Unit bisnis biasanya mengkonsumsi atau mengorbankan sumber daya ekonomi untuk biaya. Biaya yang dikeluarkan bukan merupakan aset dalam hak mereka sendiri. Intinya adalah bahwa aset tidak dalam biaya, tetapi dalam kepentingan ekonomi Masa Akan Datang. Meskipun demikian, biaya yang dikeluarkan penting untuk menerapkan definisi biaya karena memberikan bukti perolehan aset dan merupakan ukuran yang cukup objektif dari karakteristik aset.

2. Ada Wujud

Ketika sumber daya ekonomi dianggap sebagai aset. Namun, keberadaan aset berwujud bukanlah standar baku untuk mendefinisikan aset. Benda-benda seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan *goodwill* dapat diklasifikasikan

sebagai aset tanpa bentuk fisik apapun. Ini dapat dikategorikan sebagai aset non likuid, umumnya dikenal sebagai aset tidak berwujud.

3. Dapat ditukar

Banyak yang berpendapat bahwa satu sumber daya ekonomi harus dapat ditukar dengan yang lain untuk memenuhi definisi aset. Klaim ini diusulkan untuk menetapkan tingkat manfaat ekonomi yang cukup pasti dan terukur ketika suatu aset memiliki nilai dan nilai tukar yang terukur. Konsep dan argumen ini telah dibantah karena utilitas ekonomi tidak hanya terletak pada kekuatan pertukaran tetapi juga pada kemudahan penggunaan produk. Misalnya, dalam kasus mesin, mesin mungkin tidak memiliki kekuatan perdagangan, tetapi dapat digunakan untuk membuat produk. Faktanya, aset yang paling berguna berasal dari penggunaan, bukan pertukaran. Seperti dikutip Kam (1990: 107) dalam (suwarjono(2014), Moonitz menyatakan bahwa "pertukaran tidak menciptakan nilai, itu hanya mengungkapkannya."

4. Terpisahkan

Syarat pertukaran aset adalah pemisahan atau kemandirian dari sumber ekonomi lain, tetapi pendapat lain bahwa separatisme dan pertukaran hanyalah syarat untuk mendapatkan keuntungan dari aset. sedang mengerjakan. Mengingat diskusi di atas, FASB tidak memasukkan keterpisahan sebagai kriteria untuk mendefinisikan aset.

5. Andal secara hukum

Manajemen aset tidak harus dilindungi secara hukum. Klaim piutang tidak perlu melampirkan dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum untuk memenuhi kriteria dalam mendefenisikan aset. Secara umum,

sanggupan perusahaan untuk mempertahankan kepentingan finansial berasal dari tuntutan hukum. Namun, hak-hak yang dipaksakan akan melekat pada tuntutan hukum bukanlah prasyarat untuk mengakui keberadaan suatu aset jika perusahaan dapat memperoleh dan mengelola laba.

4.3 Pengukuran dan Penilaian Aset

Pengukuran menurut Procházka (2011) adalah Penilaian pos-pos akuntansi merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan laporan keuangan, guna memberikan gambaran yang benar dan wajar atas kinerja ekonomi suatu unit akuntansi. laporan keuangan dapat diukur dengan berbagai atribut, sesuai dengan sifat item dan tujuan entitas memperoleh item tersebut. Keandalan dan relevansi atribut yang diukur merupakan poin kunci dalam mengukur aset, kewajiban, ekuitas, dan faktor lainnya”.

Kriteria pengakuan aset adalah manfaat ekonomi masa akan datang yang terukur (*measurable*). Mengukur di sini berarti menentukan jumlah rupiah yang akan melekat pada properti investasi pada saat pembelian. Ini berfungsi sebagai data dasar untuk melacak aliran fisik objek. Jika jumlah sumber daya yang diperoleh entitas tidak dapat diandalkan (*reliable*), sumber daya tersebut tidak dapat dipandang sebagai aset, tetapi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadi transaksi. Seperti arus informasi, biaya melalui tiga tahap akuntansi aliran material.

1. Penilaian awal, pencatatan dan klasifikasi akan dilakukan pada saat pembelian properti. Oleh karena itu, semua aktivitas dana pada fase ini disebut pengukuran saja.
2. Post-tracking untuk melacak aliran fisik kekayaan berupa alokasi, distribusi, dan pooling untuk manfaat

kepemilikan/administrasi atau *cost-benefit* barang. Mulai sekarang, semua operasi dalam langkah ini disebut jejak.

3. Beban pendapatan untuk periode saat ini atau Masa Akan Datang. Beban-beban yang bukan merupakan beban pendapatan (*expenses*) tetap dimasukkan sebagai aset perusahaan. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam fase ini disebut *billing for revenue*.

Penilaian suatu aset dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah yang digunakan untuk menentukan signifikansi ekonomi dari aset yang dicatat di laporan posisi keuangan. Tujuan penilaian aset adalah untuk mengukur pendapatan, memproses tampilan status aset, memberikan informasi dalam pelaporan keuangan, dan menyediakan informasi khusus yang dibutuhkan manajemen, investor, dan kreditur. Ada dua jenis harga atau nilai tukar yang tersedia:

1. Nilai keluaran / Nilai Output

Nilai output adalah nilai yang mencerminkan aliran uang yang akan diterima perusahaan di masa yang akan datang, berdasarkan harga tukar produk atau output perusahaan. Nilai output didasarkan pada jumlah uang tunai atau kompensasi lain (dalam bentuk barang) yang diterima unit bisnis ketika potensi aset atau layanan akhirnya meninggalkan unit bisnis karena pertukaran atau konversi. Umumnya, penilaian ini dikaitkan dengan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau diubah menjadi uang tunai daripada digunakan untuk aktivitas manufaktur.

1. *Current Output Price*

Jika produk perusahaan umumnya dijual di pasar yang terorganisir, harga pasar saat ini adalah dasar yang masuk akal untuk memperkirakan tingkat harga jual di Masa Akan Datang. Ada beberapa kelemahan yang mendasari penilaian ini

- a) Dasar penilaian hanya dapat diterapkan pada aset yang ingin dijual oleh pemiliknya. seperti Persediaan, surat berharga, fasilitas dan tanah tidak lagi digunakan dalam bisnis kami.
- b) Metrik ini merupakan pengganti harga jual di Masa Akan Datang, sehingga relevansi penggunaannya menimbulkan masalah. Harga jual saat ini menunjukkan jumlah yang dibayar oleh pembeli dan tidak perlu menunjukkan jumlah yang harus dibayar di Masa Akan Datang, kecuali dalam keadaan Keteris Palibus.
- c) Semua aset dapat dinilai berdasarkan harga jual saat ini, sehingga metode penilaian yang berbeda harus digunakan untuk menilai aset yang berbeda.

2. *Current Cash Equivalent*

Nilai sekarang dari setara kas menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dari penjualan setiap aset dalam keadaan normal bisnis. Nilai sekarang dari setara kas dianggap relevan karena mewakili keadaan perusahaan dalam hal beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Kesulitan utama dengan konsep ini adalah kebutuhan untuk secara individual menyesuaikan item yang tidak memiliki harga pasar saat ini, seperti opsi yang tidak dapat dijual seperti aset tidak berwujud. Kelemahan kedua adalah bahwa tidak ada aset yang dapat dikaitkan dengan nilai sekarang dari setara kas.

3. *Discounted futur cash receipts/service pontensials*

Pendapatan tunai atau potensi layanan masa akan datang yang didiskon atau nilai terrealisasi harapan adalah nilai sekarang dari kas masa akan datang yang akan diterima perusahaan ketika aset tersebut dijual.

Kriteria ini dapat digunakan ketika Anda dapat memperkirakan secara andal penerimaan kas/ekuivalen yang diharapkan dan jangka waktu penerimaan pembayaran cukup lama, tetapi tanggal dan waktu penerimaan pembayaran sudah pasti. Konsep penilaian memerlukan perkiraan jumlah yang akan Anda terima, tingkat diskonto, dan berapa lama Anda akan menerimanya. Meskipun metrik ini berguna dalam menilai investor, metrik ini memiliki beberapa kelemahan, terutama bila diterapkan pada aset individu. Alasannya adalah sebagai berikut.

- a) Pendapatan tunai yang diharapkan umumnya tergantung pada distribusi probabilitas, yang subjektif dan tidak dapat diverifikasi.
- b) Tarif diskon tersedia, tetapi menyesuaikan pengaturan diskon memerlukan penilaian administratif khusus yang mungkin sulit diterima oleh pemangku kepentingan.
- c) Dua atau lebih faktor, termasuk sumber daya manusia (dianggap sebagai aset fisik), berkontribusi pada produk perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan arus kas, tetapi ada atribusi logis yang memisahkan faktor potensial dari setiap layanan. Jika sulit.
- d) Anda tidak dapat menambahkan berbagai diskon arus kas untuk setiap aset untuk mendapatkan nilai total untuk bisnis Anda.

4. *Liquidation Value*

Nilai likuidasi sama dengan harga jual saat ini/nilai setara kas saat ini, dengan perbedaan nilai output yang diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai Likuidasi hanya digunakan dalam kondisi berikut:

- a) Jika produk/aset lain tidak ada manfaat secara normalnya sehingga menjadi usang atau tidak terjual.
- b) Jika unit usaha tersebut berencana untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh asetnya di pasar normal.

2. Nilai masukan/ Nilai input

Nilai input adalah nilai yang mencerminkan besarnya imbalan dalam hal jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset yang digunakan perusahaan dalam operasinya. Nilai input dapat menunjukkan nilai maksimal dari usaha atau produk dari usaha tidak memiliki harga pasar, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan nilai output. Dasar-dasar penilaian yang dapat digunakan untuk kategori nilai masukan adalah sebagai berikut:

a. Biaya Historis

Biaya adalah pengorbanan ekonomi dalam bentuk satuan moneter yang untuk memperoleh barang/jasa sampai siap digunakan untuk usaha. Hal yang baik tentang konsep ini adalah bahwa biayanya dapat diverifikasi, karena harga yang disepakati antara penjual dan pembeli di bawah persyaratan tidak terikat. Dasar penilaian ini kelemahannya adalah aset akan berubah nilainya dari waktu ke waktu, sehingga biaya tidak dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari aset tersebut. Kelemahan yang lainnya, harga semula tidak mengakui untung atau rugi untuk periode tertentu yang sebenarnya telah terjadi. Konsep historis lain dari biaya input:

1) Biaya bijaksana (*prudent cost*)

Biaya ini tidak tergolong dalam biaya yang mewakili anomali atau kebijakan seperti waste, manipulasi, mismanagement, manajemen yang tidak kompeten dan lain-lain. Biaya bijaksana secara luas digunakan untuk menentukan tingkat utilitas, untuk alasan kepentingan publik.

2) Harga asli (*original cost*)

Adalah biaya aset untuk bisnis ketika pertama kali digunakan dalam utilitas, seperti biaya diskresioner, biaya awal dikenal dalam konteks utilitas, terutama jika bisnis membeli aset dari peluang ke perusahaan publik lainnya. Dasar penentuan persentase biaya yang diperhitungkan adalah biaya awal dikurangi akumulasi penyusutan yang telah dilakukan perusahaan sebelumnya. Oleh karena itu, tarif utilitas harus ditentukan berdasarkan nilai buku sebelumnya dari catatan perusahaan, bahkan jika perusahaan membayarnya berdasarkan harga pasar yang berlaku.

3) Biaya standar (*standard cost*)

Biaya standar adalah biaya yang seharusnya terjadi dalam proses produksi hipotetis tertentu. Penetapan biaya standar terutama diterapkan untuk tujuan manajemen pengendalian internal, penetapan biaya standar dapat dianggap sebagai ukuran aset persediaan untuk mencerminkan biaya produksi di perusahaan, efisiensi operasi dan kapasitas normal. Biaya standar rendah tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya karena biaya standar didasarkan pada kondisi ideal.

Penggunaan utama ini menyebabkan penilaian aset yang terlalu rendah karena upaya menimbulkan biaya karena inefisiensi dan kapasitas yang tidak digunakan.

b. Biaya pertukaran

Biaya penggantian atau biaya kini atau biaya masukan sekarang adalah harga penggantian atau jumlah yang disepakati saat ini yang diperlukan untuk memperoleh aset serupa dengan persyaratan yang setara. Kriteria ini dapat digunakan bila ada bukti kuat untuk menentukan biaya input saat ini. Biaya input merupakan ukuran penting saat ini, terutama ketika memberikan informasi yang menunjukkan dampak inflasi terhadap bisnis. Pilihan lain yang termasuk dalam kategori nilai alternatif adalah

- 1) Nilai perkiraan
- 2) Nilai wajar
- 3) Nilai realisasi bersih dikurangi laba normal

c. Diskon biaya Masa Akan Datang

Dasar penilaian ini adalah nilai sekarang dari pengorbanan ekonomi masa akan datang jika potensi kinerja tertentu dicapai pada saat yang sama saat ini. Prasyarat untuk menggunakan penilaian ini adalah, antara lain, adanya kepastian, atau setidaknya perkiraan yang dapat diandalkan, tentang harga kemungkinan layanan di Masa Akan Datang.

4.4 Pengakuan Aset

Suatu nilai rupiah atau biaya diakui sebagai aset jika nilai rupiah tersebut terjadi sebagai akibat dari suatu transaksi,

peristiwa atau kondisi yang mempengaruhi aset tersebut. Secara umum, pengakuan aset terjadi pada saat yang sama dengan terjadinya transaksi, peristiwa, atau kondisi. Selain memenuhi definisi aset, aset juga harus memenuhi kriteria yang terukur, relevan, dan andal. Kaidadah pengakuan yang dinyatakan Belkaoui (1993: 194) untuk mendeteksi suatu aset menunjukkan kondisi perlu dan kondisi cukup yang merupakan test yang cukup rinci untuk mengakui aset adalah sebagai berikut:

1. Mengenali keberadaan aset (*detection of existence test*)
2. Sumber daya dan kewajiban ekonomi (*economic resources and obligation test*)
3. Terkait dengan perusahaan (*entity association test*)
4. Mempunyai nilai (*non zero magnitude test*)
5. Terkait dengan waktu laporan (*temporal association test*)
6. dapat diperiksa (*verification test*)

FASB No. 5 dari Konsep Akuntansi Keuangan menunjukkan bahwa pengakuan suatu item didasarkan pada empat kriteria:

1. *Defenition*

Definisi ini berarti bahwa jika hasil suatu transaksi termasuk dalam struktur dan memenuhi definisi suatu komponen laporan keuangan, maka akan ditampilkan dalam laporan keuangan.

2. *Measurability*

Keterukuran berarti suatu kejadian/peristiwa atau item tersebut harus memiliki makna tertentu yang relevan dan yang dapat diukur dalam jumlah dengan reliabilitas yang tinggi.

3. *Relevansi*

Biasanya informasi yang ada dalam kejadian/peristiwa atau item tersebut memiliki kemampuan untuk membuat

perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan.

4. *Reliability*,

Biasanya informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kondisi yang dideskripsikan atau diwakili, dapat diverifikasi (*verifiable*) dan netral.

Dalam PSAK No. 13 “Akuntansi Sewa” menyatakan bahwa kapitalisasi sewa (sewa) hanya dilakukan jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi:

- 1) Terjadi peralihan hak milik kepada pembeli (*lessee*)
- 2) Kontrak menyatakan bahwa ada opsi untuk membeli pada kondisi yang menguntungkan pembeli.
- 3) Jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari perkiraan sisa umur ekonomis pada saat kontrak ditandatangani.
- 4) Nilai kini dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% dari nilai pasar wajar aset sewaan sejak dimulainya kontrak.

Pada kenyataannya, banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu dan dapat dibagi menjadi beberapa kriteria. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara aturan pengakuan dan kriteria pengakuan. Aturan pengenalan menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu. Kriteria pengakuan adalah pedoman umum yang digunakan untuk mengembangkan aturan pengakuan. Beberapa kriteria yang diajukan oleh Cam adalah:

1. Berdasarkan hukum

Pengakuan suatu aset tergantung pada pendapat hukum dari aset yang bersangkutan. Kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan dan andal.

2. Penggunaan prinsip konservatif

Prinsip konservatif harus memprediksi kerugian, bukan keuntungan.

3. Kepentingan Transaksi / Konten Ekonomis

Ketika suatu transaksi dilakukan dalam hal signifikansi ekonomi, item tersebut segera diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Standar ini bertujuan untuk menentukan kepentingan ekonomi dari suatu transaksi yang terkait dengan pelaporan informasi yang relevan, dengan tetap memperhatikan faktor materialitas.

4. Kemampuan untuk mengukur aset

Jika seorang akuntan tidak dapat menentukan nilai suatu aset secara sewenang-wenang atau sebaliknya, aset tersebut tidak boleh diakui. Ukuran ini terkait dengan keandalan informasi.

4.5 Pengungkapan dan Penyajian Aset

Informasi, tentu saja, hilang ketika semua atau sebagian dari kepentingan diaktifkan. Oleh karena itu, pengungkapan dalam hal ini harus meningkatkan kredibilitas akun dan mencegah kesalahpahaman oleh pengguna. Agar laporan keuangan tahunan tetap bermakna, informasi berikut harus disediakan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan:

- 1) Jika beban bunga tidak dikapitalisasi, total bunga yang timbul selama periode tersebut dihitung sebagai biaya perolehan untuk periode tersebut.
- 2) Jika bagian dari beban bunga dikapitalisasi, jumlah total bunga yang masih harus dibayar adalah bagian yang dikapitalisasi.

Prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama praktik akuntansi, mengatur penyajian dan pengungkapan setiap aset. Aset sering diidentifikasi sebagai manfaat ekonomi masa akan datang yang dikelola oleh entitas aktual yang dihasilkan dari transaksi yang sah, tetapi setiap aset diidentifikasi secara lebih rinci berdasarkan sifat aset. kasus. Pengungkapan dan

penyajian aset harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kriteria yang mengatur setiap elemen. Prinsip akuntansi yang berlaku umum memberikan panduan tentang penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut:

- 1) Aset muncul sebagai akun di sisi kewajiban atau di sisi kiri pada laporan posisi keuangan, atau sebagai pernyataan di bagian atas laporan posisi keuangan.
- 2) Harta diklasifikasikan menjadi harta bergerak dan harta tetap
- 3) Aset diberi peringkat dalam urutan tampilan berdasarkan likuiditas atau fluiditas, dengan aset paling fleksibel pertama.
- 4) Kebijakan akuntansi terkait dengan item tertentu yang akan diungkapkan, misalnya metode penyusutan aset dan dasar penilaian persediaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui,Ahmed Riahi. 1993. *Accounting Theory*. Forth worth: The Dryden Press.
- Financial Accounting Standards Bord (FASB). 2001. *Original Pronouncements*. New York: John Wiley & Son.
- Procházka, D. 2011. *The Role Of Fair Value Measurement In The Recent Financial Crunch*. Prague Economic Papers 1(1): 71-88.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Yongkui, Z. 2013. *Financial Accounting Measurement Concept, Asset Specificity, and the Application of Fair Value to Ecotourism Enterprises*. Journal of Convergence Information Technology(JCIT) 8(1).

BAB 5

KEWAJIBAN

Oleh Rosanna Purba

5.1 Asumsi Dasar

Demi keberlangsungan usahanya, setiap perusahaan pada umumnya membutuhkan pendanaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pendanaan dapat bersumber dari pinjaman maupun penerbitan saham untuk menambah ekuitas. Kegiatan pendanaan baik melalui pinjaman maupun penerbitan saham merupakan bagian dari *financial decision* atau keputusan pendanaan.

Keputusan pendanaan perusahaan bergantung pada struktur pendanaan masing-masing perusahaan. Pendanaan melalui pinjaman merupakan pilihan pertama yang sering dilaksanakan oleh perusahaan karena biaya yang dikeluarkan relatif tetap dan risikonya lebih kecil apabila dibandingkan dengan pendanaan melalui penerbitan saham. Alasan lainnya melakukan kegiatan pendanaan melalui pinjaman dimana perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepemilikannya.

5.2 Definisi Kewajiban

Kewajiban sebagaimana layaknya elemen laporan keuangan lainnya seperti aset atau ekuitas, akan memiliki berbagai definisi yang diperoleh dari literatur yang berbeda pula. Pada umumnya istilah kewajiban lebih sering disebut dengan utang. Akan tetapi, pada saat ini dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan istilah yang digunakan adalah liabilitas sebagai terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu *liability*. Terdapat beberapa definisi kewajiban masing-masing menurut

Financial Accounting Standard Board (FASB) melalui SFAC No. 6, *International Accounting Standard Committee (IASC)*, dan Ikatan Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 57.

Menurut FASB (1985) pada SFAC No. 6 : Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan/ menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Menurut IASC (2001) : Liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi.

Menurut IFRS pada PSAK 57 tahun 2014 : Liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi.

Secara substantif, ketiga definisi di atas dapat dikatakan sama dimana sangat menekankan konsep kesatuan usaha untuk menunjukkan keharusan untuk melakukan pengorbanan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewajiban mempunyai tiga karakteristik utama yaitu:

1. Kewajiban kini perusahaan
Waktu kini atau sekarang merupakan tanggal pelaporan (neraca). Terdapatnya kewajiban pada tanggal neraca berarti perusahaan harus mengorbankan sumber ekonomi berupa transfer aset atau penyerahan jasa di masa yang akan datang atau dengan cara membayar kewajibannya.
2. Timbul dari peristiwa masa lalu
Peristiwa masa lalu yang dimaksudkan adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi.

Dalam hal ini diperlukan kriteria khusus yang menentukan apakah suatu kewajiban telah terjadi atau belum.

3. Penyelesaiannya untuk mewujudkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang

Kewajiban memuat tanggung jawab yang mengharuskan perusahaan untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain untuk memberikan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan datang.

5.3 Karakteristik Kewajiban

Menurut FASB (1985) pada SFAC No. 6, kewajiban mempunyai tiga karakteristik sebagai berikut:

1. Tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab untuk satu atau lebih unit bisnis yang mungkin melibatkan pemindahan atau penggunaan aset pada tanggal tertentu, sebagai tanggapan atas keadaan tertentu, atau atas permintaan.
2. Karena kewajiban atau tanggung jawab ini, korporasi harus membuat pengorbanan di masa depan tanpa banyak atau tanpa memikirkan bagaimana mencegahnya.
3. Kewajiban mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha yang memerlukan penyelesaian.

Selain karakteristik di atas masih terdapat beberapa karakteristik pendukung lainnya, yaitu:

1. Kewajiban timbul atas kesepakatan antar entitas usaha.
2. Terdapat keharusan untuk membayar dalam bentuk kas untuk sebagian besar kewajiban.
3. Identitas kewajiban terbayar harus jelas disertai dengan bukti pembayaran.

4. Semua kewajiban berkekuatan hukum sehingga dapat dipaksakan penyelesaiannya.

5.4 Pengelompokan Kewajiban

Pada dasarnya kewajiban dapat terjadi karena faktor penyebab yang berbeda. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya, terdapat tiga jenis kewajiban yang ditimbulkan. Adapun pengelompokan ketiga jenis kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban kontrak (*contractual liabilities*)

Persyaratan formal dalam peraturan hukum untuk memberikan uang atau menyediakan produk atau jasa kepada pihak tertentu menimbulkan kewajiban. Misalnya, utang bank, utang pajak, utang gaji, atau utang dagang. Kewajiban kontrak merupakan pemahaman yang sempit tentang utang.

2. Kewajiban konstruktif (*constructive liabilities*)

Sekalipun secara teknis dilakukan dengan penyajian secara tertulis untuk membayar jumlah tertentu di masa depan, kewajiban konstruktif dilakukan dengan sengaja karena alasan tertentu atau karena keadaan tertentu. Misalnya, program bonus yang akan ditawarkan kepada karyawan dapat dilihat sebagai utang masa depan.

3. Kewajiban demi keadilan (*equitable liabilities*)

Kewajiban ini dihasilkan dari keputusan yang dibuat oleh perusahaan atas dasar alasan etika dan merupakan praktik bisnis yang baik, seperti kewajiban memberikan donasi kepada masyarakat di sekitar pabrik untuk perbaikan jalan. Meskipun peristiwa tersebut tidak berlangsung melalui proses hukum formal, kedua belah pihak yang terlibat tetap dapat memandang tanggung jawab yang setara sebagai kewajiban. Kewajiban ini biasanya timbul hanya berdasarkan atas kesadaran praktik usaha yang

sehat yang mungkin tidak selalu didukung oleh aturan hukum. Sehingga apabila kewajiban ini tidak terpenuhi maka yang muncul adalah sanksi moral dan sosial.

4. Kewajiban bersyarat/kontigensi (*contingent liabilities*)

Kewajiban ini memiliki ketidakpastian pemenuhannya karena bergantung pada situasi dan kondisi atau kejadian di masa yang akan datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa yang akan datang. Misalnya utang garansi dimana kerusakan suatu produk belum tentu terjadi.

5.5 Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban yang diakui akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan PSAK No. 1 tahun 2019, kewajiban atau liabilitas terbagi menjadi dua yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kewajiban akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal.
2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan.
3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan.
4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas, sesuai dengan pilihan pihak lawan, tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut.

Bila suatu liabilitas tidak termasuk dalam kriteria di atas maka entitas mengklasifikasikannya menjadi liabilitas jangka panjang.

Terdapat beberapa jenis kewajiban jangka pendek seperti, utang dagang, utang wesel jangka pendek, bagian jatuh tempo dari liabilitas jangka panjang, kewajiban jangka pendek yang diekspektasikan untuk didanai, utang dividen, uang muka dan deposit pelanggan, pendapatan dibayar di muka, utang pajak penjualan, utang pajak pendapatan, dan utang gaji dan kewajiban imbalan kerja. Demikian juga kewajiban jangka panjang, terdapat beberapa jenis kewajiban jangka panjang seperti, kewajiban imbalan pascakerja, utang kredit bank jangka panjang, utang sewa pembiayaan, liabilitas pajak tangguhan, pinjaman subordinasi, obligasi subordinasi, dan surat utang jangka menengah.

Pengklasifikasian pos moneter dan non-moneter adalah klasifikasi lain yang sering digunakan terhadap aset dan kewajiban. Utang moneter adalah kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal, dan diselesaikan menurut nilai kontrak yang jumlahnya tetap, maka tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai utang. Laporan keuangan umumnya hanya menyajikan utang berupa utang moneter saja. Selain itu, utang non-moneter mengacu pada komitmen untuk menyerahkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu atau potensi layanan atau jasa dengan harga tetap walaupun yang diserahkan dapat berupa kas. Nilainya sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai uang. Misalnya, layanan gratis setelah penjualan, utang dengan jaminan diselesaikan dengan penyerahan jasa, pendapatan yang ditangguhkan, dan sebagainya.

5.6 Pengakuan, Pengukuran dan Penilaian

Kewajiban diakui dan diukur pada saat terjadinya. Kewajiban mengalami tiga tahap perlakuan yaitu: pengakuan, pengukuran dan pelunasan/penyelesaian.

Pengakuan

Pengakuan kewajiban berkaitan dengan saat dipenuhinya unsur kriteria pengakuan berdasarkan kriteria umum. Berdasarkan *SFAC No. 5* (1984), pengakuan kewajiban apabila memenuhi empat kriteria sebagai berikut: (1) memenuhi definisi suatu kewajiban; (2) dapat diukur; (3) relevan; dan (4) dapat diandalkan.

Secara teori, kewajiban terbentuk ketika kewajiban menjadi berkekuatan hukum sebagai akibat dari transaksi sebelumnya. Persyaratan mengikat harus dinilai berdasarkan aturan pengakuan. Definisi, relevansi, keterkaitan, dan kriteria terukur semuanya harus dipenuhi sebelum elemen laporan keuangan dapat ditentukan. Kriteria pengakuan adalah aturan yang lebih umum diterima untuk memenuhi karakteristik kualitatif informasi. Kaidah pengakuan diperlukan sebagai penjabaran teknis dari kriteria pengakuan umum karena kriteria umum ini tidak operasional. Kewajiban ditentukan berdasarkan aturan pengakuan yang menentukan kapan atau apa yang merupakan indikasi bahwa kewajiban dapat diakui.

Kam (1990) pada Suwardjono (2005, p. 317) mengajukan kaidah pengakuan kewajiban sebagai berikut:

1. Ketersediaan dasar hukum

Aturan ini berkaitan dengan ketergantungan dan penerapan informasi. Dasar hukum yang cukup meyakinkan untuk mengakui kewajiban disediakan oleh faktur pembelian (*invoice*) dan tanda terima barang. Ketersediaan landasan hukum yang dapat digunakan sebagai daya paksa hanyalah merupakan unsur pendukung dalam pengertian kewajiban. Hal ini berarti bahwa pengecualian terhadap aturan dapat dibuat apabila terdapat bukti substantif dimana terdapat keharusan secara konstruktif atau untuk alasan keadilan.

2. Keterterapan konsep dasar konservatisme

Standar keandalan secara teknis diuraikan dalam aturan ini. Konsep konservatisme mungkin dapat memicu pengakuan kewajiban tanggung jawab dalam situasi tertentu. Mengadopsi konsep konservatif memiliki konotasi bahwa kerugian dapat dilaporkan segera, sementara keuntungan tidak bisa. Demikian juga kewajiban dapat segera diakui sedangkan aset tidak.

3. Ketertentuan substansi ekonomik transaksi

Aturan ini membahas topik relevansi informasi. Meskipun tidak ada pengalihan kepemilikan selama transaksi sewa, utang sewa guna dapat diakui pada saat terjadinya transaksi. Jika sewa yang dimaksud secara substantif merupakan pembelian angsuran, maka kewajiban tersebut mungkin atau bahkan harus diakui karena memenuhi salah satu kriteria kapitalisasi.

4. Keterukuran nilai kewajiban

Salah satu kebutuhan untuk mencapai kualitas keandalan informasi adalah keterukuran. Kata cukup pasti yang digunakan dalam definisi kewajiban, mengacu pada jumlah rupiah selain kemungkinan terjadinya pengorbanan sumber ekonomik di masa depan.

Terkadang terdapat masalah teknis terkait kapan keempat kaidah pengakuan kewajiban di atas dipenuhi. Hal ini berkaitan dengan penentuan saat pengakuan kewajiban. Hendriksen dan Van Breda (1991) dalam (Suwardjono (2005, p. 318) menunjukkan saat untuk mengakui kewajiban yaitu:

1. Jika hak dan kewajiban pada saat penandatanganan kontrak itu mengikat secara hukum. Hak kontrak eksekutori tidak diakui sampai salah satu pihak menggunakan/mengendalikan manfaat yang disepakati atau menyelesaikan kewajibannya.

2. Jika barang dan jasa yang menjadi biaya tidak pernah dicatat sebagai aset sebelumnya, maka pengakuannya bersamaan dengan pengakuan biaya.
3. Bersamaan dengan pengakuan aset dimana kewajiban timbul ketika terdapat hak untuk menggunakan barang dan jasa.
4. Pada akhir periode karena prinsip akrual diterapkan melalui prosedur penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos kewajiban atau kewajiban.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, kewajiban diukur berdasarkan nilai wajarnya dikurangi biaya transaksi jika ada. Pada umumnya, nilai wajar saat pengakuan awal kewajiban sama dengan harga transaksinya atau harga jualnya, yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau yang diterima. Pengakuan dilakukan setelah kewajiban dapat diukur dengan pasti. Timbulnya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya.

Suwardjono (2005, p. 321) mengatakan bahwa penghargaan sepakatan (*measured considerations*) dalam transaksi merupakan ukuran paling objektif untuk menghitung biaya kewajiban pada saat terjadinya bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomis di masa yang akan datang. Ukuran ini berlaku untuk kewajiban jangka panjang. Jumlah rupiah liabilitas yang diakui setara dengan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik (kas) di masa yang akan datang untuk liabilitas jangka pendek, dengan asumsi biaya penangguhan dianggap tidak cukup material. Ukuran penghargaan sepakatan suatu kewajiban menunjukkan sejumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik jika kewajiban tersebut dilunasi pada saat terjadinya. Ini juga mencerminkan nilai setara kas atau nilai sekarang kewajiban.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran yang berkaitan dengan kewajiban, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kewajiban terkait pembelian kredit
Dalam pembelian aset secara kredit, dasar pengukuran yang objektif adalah biaya tunai atau kos tunai implisit. Kewajiban harus diukur dengan mengikuti pengukuran aset.
- 2) Diskon atau premium utang obligasi
Suatu kontrak dengan pokok pinjaman dan bunga periodik, pengukuran yang tepat adalah kos tunai implisit. Pembayaran di masa yang akan datang, terdiri dari dua unsur, yaitu: (1) nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi; dan (2) bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi. Pada saat penerbitan, diskon utang obligasi pada waktu penerbitan adalah suatu jumlah rupiah yang menunjukkan biaya bunga yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Diskon obligasi dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai pengurang nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi. Premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur jumlah rupiah utang perusahaan. Premium obligasi sendiri apabila belum diamortisasi merupakan utang.
- 3) Kewajiban moneter dan nonmoneter
Pada saat terjadinya, kewajiban nonmoneter jangka panjang diukur atas dasar nilai diskonan pembayaran kas masa datang. Tetapi untuk kewajiban moneter jangka pendek diukur atas dasar nilai nominal. Apabila pembayaran di muka penuh, kewajiban nonmoneter diukur berdasarkan pembayaran tersebut yang menunjukkan kesepakatan harga barang dan jasa.

Penilaian

Berbeda dengan pengukuran, pada saat terjadinya penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban tersebut. Semakin mendekati waktu jatuh tempo, maka nilai kewajiban akan semakin mendekati nilai nominal. Penilaian

mengacu pada penilaian keharusan sekarang pada saat terjadinya sampai dilunasinya kewajiban. Tujuan penilaian yaitu menentukan jumlah rupiah pengorbanan sumber ekonomik (kas) pada saat tertentu seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi.

Obligasi, misalnya, memiliki nilai sekarang yang dikenal sebagai nilai bawaan atau nilai pelunasan sekarang yang didasarkan pada nilai pasar obligasi. Demikian juga untuk amortisasi diskon atau premium obligasi menelusuri kewajiban untuk menetapkan nilai penyelesaian saat ini. Selain itu, nilai sekarang dari kewajiban moneter biasanya dihitung menggunakan arus kas keluar masa depan yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar yang berfungsi sebagai tingkat diskontonya.

Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Atribut penilaian kewajiban adalah:

- 1) Nilai pasar sekarang (*current market value*)
- 2) Nilai pelunasan neto (*net settlement value*)
- 3) Nilai diskunan aliran kas masa datang (*discounted value of future cash flows*)

Pada Tabel 5.1 berikut ini merupakan dasar atau atribut penilaian kewajiban.

Tabel 5.1 Dasar atau Atribut Penilaian Kewajiban

Basis (atribut) Penilaian	Keterterapan	Contoh Pos Yang Berpaut
Harga pasar sekarang	Berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga.	Kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban pedagang efek.

Basis (atribut) Penilaian	Keterterapan	Contoh Pos Yang Berpaut
Nilai pelunasan neto	Berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti tetap waktu pelunasannya tidak cukup pasti.	Utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek.
Nilai diskunan aliran kas masa datang	Kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti.	Utang obligasi, dan utang wesel jangka panjang.

Sumber: Suwardjono (2005, p. 329)

5.7 Pelunasan/Penyelesaian

Suatu kewajiban akan terus mengikat atau menjadi perlu setelah timbul sebagai akibat dari suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi yang mendorong entitas bisnis untuk mengakuinya sampai kewajiban tersebut dipenuhi melalui suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi yang berdampak pada entitas bisnis.

Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang disengaja yang dilakukan oleh perusahaan untuk melepaskannya dari kewajiban ini. Pelunasan biasanya penyelesaiannya melalui pembayaran kepada debitur. Pelunasan dapat menghilangkan, menyelesaikan atau langsung menghapuskan kewajiban. Karena pembatalan seluruh atau sebagian, kompromi, pengakuan kewajiban baru atau penggantian, pengambilalihan kewajiban oleh pihak lain, atau

restrukturisasi utang, beberapa kewajiban menjadi batal demi hukum atau perusahaan dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Menurut FASB (1996) pada SFAS No. 125, terdapat kriteria yang digunakan sebagai dasar hilangnya suatu kewajiban apabila memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

1. Debitur membayar kreditur dan terbebaskan dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Membayar kreditur mencakup penyerahan kas, aset finansial lain, barang, atau jasa atau penebusan utang oleh debitur untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasuri.
2. Debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditur.

Kewajiban yang berakhir yaitu ketika kewajiban yang diatur dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluwarsa, tidak lagi diakui sebagai kewajiban dan oleh karena itu dikeluarkan dari laporan posisi keuangan.

Transfer Aset Keuangan

Entitas dapat mentransfer aset keuangan, barang dagangan, atau jasa untuk memenuhi kewajiban. Penyelesaian biasanya dilihat sebagai bagian akhir setelah utang telah dipenuhi dengan mengirimkan uang tunai, barang, atau jasa kepada debitur. Jika aset keuangan diserahkan tanpa syarat dan dianggap sebagai penjualan, penyelesaian kewajiban dengan aset keuangan juga dapat dianggap selesai. Dengan kata lain, aset keuangan dianggap dijual dengan uang tunai, dan jumlah yang diperoleh dianggap digunakan untuk pembayaran utang.

Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Tidak akan ada perbedaan antara jumlah rupiah yang dibayarkan dan nilai nominal jika kewajiban dibayar lunas pada saat jatuh tempo karena nilai jatuh tempo (nominal) secara

otomatis akan mencerminkan nilai kini kewajiban (pada saat pelunasan). Karena proses amortisasi dari selisih antara nilai nominal dan nilai pasar pada saat utang diterbitkan, nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai penebusan kewajiban.

Jika pinjaman dilunasi lebih awal, perbedaan antara nilai bawaan dan nilai penebusan dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jumlah rupiah kredit yang mewakili suatu jenis kontribusi atau pemberian dari satu kelompok pemodal (kreditur) kepada kelompok pemodal dianggap sebagai keuntungan. Sebaliknya pengurangan hak atas laba ditahan dianggap sebagai kerugian. Untung dan rugi tersebut dapat dicatat sebagai pos biasa atau luar biasa. Untung atau rugi akan dikategorikan sebagai pos luar biasa apabila: (1) bukan berasal dari kegiatan operasional rutin perusahaan; (2) jarang terjadi; dan (3) tidak berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan.

Pada dasarnya karakteristik semua pelunasan utang dengan pendanaan sebelum jatuh tempo sama. Dalam kegiatan pelunasan melalui pendanaan, terdapat beberapa perlakuan alternatif atas selisih yang terjadi, sebagai berikut:

1. Selisih diamortisasi selama sisa umur utang lama yang ditarik kembali.
Selisihnya merupakan penyesuaian biaya atas utang yang ada selama sisa jangka waktu pinjaman karena perolehan utang baru,
2. Selisih diamortisasi selama umur utang baru yang diterbitkan. Pendanaan kembali utang dilakukan untuk memperoleh bunga yang lebih kecil dibandingkan dengan bunga atas sisa jangka waktu utang sebelumnya.
3. Selisih diakui pada saat penarikan dan dilaporkan pada laporan laba rugi periode terkait.
Pelunasan utang sebelum jatuh tempo melalui pendanaan kembali merupakan penarikan kembali utang lama dan

utang baru merupakan transaksi yang terpisah dengan yang sebelumnya.

Berdasarkan ketiga alternatif di atas, standar akuntansi keuangan menganut alternatif ketiga dimana diasumsikan bahwa semua kewajiban mempunyai karakteristik yang sama dimana pelunasan utang sebelum jatuh tempo sama dengan pelunasan utang pada saat jatuh tempo dengan atau tanpa adanya pendanaan kembali.

Utang Konvertibel

Salah satu instrumen keuangan yang biasanya sebagai kewajiban sekaligus sebagai ekuitas adalah hutang yang dapat dikonversi atau utang konvertibel. Selama hak masih berlaku, pemegang instrumen memiliki kemampuan untuk mengubah status instrumen dari hutang menjadi ekuitas setiap saat. Untuk mengatasi tingkat bunga nominal yang terlalu rendah dibandingkan dengan tingkat bunga umum, hak konversi digunakan untuk menarik investor.

Menurut Hendriksen dan Van Breda (1999) pada Suwardjono (2005, p. 337), berikut ini merupakan karakteristik obligasi terkonversi:

1. Tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara.
2. Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa.
3. Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham.

Utang konvertibel menimbulkan masalah akuntansi pada saat pengakuan, pengkonversian, dan pelunasan. Terdapat dasar pemikiran terkait pelaporan utang konvertibel sebagai kewajiban sekaligus ekuitas atau pelaporan utang konvertibel hanya sebagai utang saja.

1. Pelaporan utang konvertibel sebagai kewajiban sekaligus ekuitas.

Perspektif ini didukung oleh ide-ide berikut:

- a. Hak konversi mirip dengan sifat opsi atau waran karena memiliki nilai ekonomik.
 - b. Tidak ada kendala teknis untuk melakukan pemisahan pada saat penerbitan hak konversi atau nilai hutang obligasi biasa (tanpa hak konversi) dapat diukur dengan cukup akurat.
 - c. Pembiayaan dengan ekuitas adalah tujuan sebenarnya dari penerbitan utang konversi.
2. Pelaporan utang konvertibel hanya dianggap sebagai utang saja.

Perspektif ini didukung oleh ide-ide berikut:

- a. Karena obligasi konversi adalah sekuritas hibrida, mereka harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
- b. Karena kedua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, maka penilaian hak konversi akan bersifat subjektif (utang dan hak konversi).

Pembebasan Substantif

Jika utang telah dilunasi atau kreditur atau pengadilan telah memberikan pembebasan resmi, kewajiban dapat dianggap hilang. Ketika debitur menempatkan uang tunai atau aset lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian dan arus kas dari aset tersebut sudah dapat dipastikan cukup untuk menutupi pembayaran bunga dan pokok sampai pada saat jatuh tempo, maka kewajiban dapat dianggap hilang meskipun kewajiban tersebut belum jatuh tempo. Oleh karena itu, terdapat pembebasan substansial setelah tidak ada lagi tanggung jawab untuk membayar.

Pada standar FASB, ditegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus apabila tidak memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Hanya karena perusahaan menempatkan aset dalam kepercayaan, debitur tidak langsung dibebaskan dari kewajiban hukum.
2. Dana yang ditempatkan dalam perwalian bukanlah sumber pendanaan satu-satunya untuk pembayaran kewajiban. Walaupun perusahaan secara substantif mempunyai kemampuan untuk melunasi utang tidak dengan sendirinya utangnya terhapus.
3. Perwalian tidak dapat dibatalkan atau dihentikan oleh kreditur, dan mereka tidak diizinkan untuk menggunakan aset perwalian atas kebijaksanaan mereka sendiri.
4. Jika ternyata harta perwalian lebih besar dari yang diperlukan untuk menutupi pokok dan bunga pinjaman, maka debitur boleh menggunakan kelebihannya. Hal ini menunjukkan bahwa debitur masih memiliki kuasa terhadap aset tersebut.
5. Perjanjian pembentukan dana pembebasan utang tidak mengikat kreditur ataupun agennya.
6. Manfaat aset tetap terikat pada debitur dan di bawah kendali debitur karena kreditur juga tidak mengakuinya sebagai aset, dengan demikian pada hakekatnya harta tetap milik debitur.

5.8 Penyajian

Pada laporan posisi keuangan, kewajiban dicantumkan dalam urutan kelancaran yang sama seperti penyajian aset. Kewajiban terdaftar dalam urutan jatuh tempo sedangkan aset lancar terdaftar dalam urutan likuiditas. Menurut PSAK No. 1 tahun 2019, semua kewajiban yang tidak sesuai dengan kriteria jangka pendek harus dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Adapun kriteria tersebut sudah dijelaskan pada sub bab klasifikasi kewajiban.

Kewajiban tidak boleh langsung dikontrakan atau dikompensasikan dengan aset pada laporan posisi keuangan yang dianggap terhubung. Kecuali ada hak mengontra, pembayaran tidak selalu dapat dilakukan karena tergantung pada sifat transaksi antara debitur dan kreditur. Hak mengontra merupakan hak yuridis debitur, menurut syarat kontrak atau hal lainnya, untuk membatalkan seluruh atau sebagian utang kepada pihak ketiga dengan melakukan restitusi dari uang yang menjadi utang pihak ketiga kepada debitur.

Hak mengontra ada apabila semua poin berikut terpenuhi:

1. Kedua pihak kontraktual masing-masing berutang sejumlah rupiah tertentu kepada pihak lain.
2. Pihak pelapor memiliki opsi untuk mengkompensasi utang dengan uang yang terutang oleh pihak lain.
3. Pihak pelapor berniat untuk mengontra.
4. Hak mengontra terpaksakan secara hukum.

PT Unilever Indonesia Tbk
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	2020	2019
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank	2p, 13	3,015,000	2,920,000
Utang usaha			
- Pihak ketiga	2q, 14	4,123,391	4,322,771
- Pihak berelasi	2b, 2q, 14	154,226	194,183
Utang pajak			
- Pajak penghasilan badan	2r, 15d	703,410	256,609
- Pajak lain-lain	15d	259,179	342,553
Akrual	2o, 2x, 16	2,360,004	2,751,404
Utang lain-lain			
- Pihak ketiga	2e, 6, 17	1,669,573	1,293,017
- Pihak berelasi	2b, 7d	872,483	784,606
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang – bagian jangka pendek	2s, 18	87,084	73,986
Liabilitas sewa – bagian jangka pendek	2j, 10	113,186	126,179
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		13,357,536	13,065,308
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	2r, 15b	212,333	335,570
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang – bagian jangka panjang	2s, 18	1,180,591	1,047,816
Liabilitas sewa – bagian jangka panjang	2j, 10	846,804	918,815
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2,239,728	2,302,201
JUMLAH LIABILITAS		15,597,264	15,367,509

Sumber: Laporan Tahunan Unilever 2020

DAFTAR PUSTAKA

- (FASB). 1996. *SFAS No. 125*. Available at: <https://www.fasb.org/page/PageContent?pageId=/reference-library/superseded-standards/summary-of-statement-no-125.html&bcpath=tff> (Accessed: 13 August 2022).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi, dan Aset Kontijensi'. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2019. PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Financial Accounting Standard Board (FASB). 1985. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 6*. Available at: https://fasb.org/Page/ShowPdf?path=CON6_revised_11.28.2018.pdf&title=CON+6+%28AS+ISSUED%29&acceptedDisclaimer=true&Submit= (Accessed: 13 August 2022).
- IASC. 2001. *The IASC's Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*. Available at: <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/ias-8/ias-8-iasc-extract.pdf> (Accessed: 13 August 2022).
- SFAC No. 5*. 1984. Available at: <https://fasb.org/Page/ShowPdf?path=con5.pdf&title=CON+5+%28AS+ISSUED%29&acceptedDisclaimer=true&Submit=> (Accessed: 13 August 2022).
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

BAB 6

PENDAPATAN

Oleh Nanang Qosim

6.1 Pendahuluan

Perusahaan (*entitas*) adalah merupakan bagian dari unsur atau unit yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang sering digunakan oleh setiap manusia untuk meraih yang namanya kesejahteraan. Dalam Perusahaan (*entitas*), manusia adalah sebagai sumber daya yang paling utama yang tentunya akan menjalankan kegiatan *entitas* yang berorientasi pada pencapaian tujuan Perusahaan (*entitas*). Jika tujuan Perusahaan (*entitas*) sudah tercapai maka itu adalah merupakan sebuah indikasi bahwa telah tercapainya suatu tujuan setiap manusia dalam Perusahaan (*entitas*) tersebut, karena manusia sebagai motor penggerak akan mendapatkan hasil dari setiap pekerjaannya. Di dalam setiap Perusahaan (*entitas*), setiap manusia tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal menduduki posisi-posisi seperti manajemen puncak, manajemen menengah, atau bahkan manajemen bawah. Manusia itu sendiri mampu bekerja dalam segala fungsi, baik itu yang berhubungan dengan fungsi sebuah perencanaan, fungsi pelaksanaan, fungsi pengendalian, dan bahkan dalam hal pengambilan sebuah keputusan. Sejak sebuah perusahaan itu diresmikan, sampai kapanpun tidak akan ada penutupan atau dilikuidasi, terkecuali ada sesuatu yang terjadi diluar kendali manusia demikian prinsip *going concern*. Laba adalah merupakan sebuah faktor yang sangat penting yang pastinya harus dicapai oleh sebuah perusahaan agar Perusahaan

(*entitas*) untuk dapat mempertahankan kelanjutan hidup atau tidaknya perusahaannya. Dengan demikian, Perusahaan (*entitas*) harus mencapai pendapatan atau laba melebihi dari biaya operasional dan tentunya termasuk biaya-biaya lainnya yang masuk dalam pembiayaan perusahaan. Maka untuk menekan biaya secara optimal, Perusahaan (*entitas*) haruslah bekerja secara efisien dan efektif agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi, makna Efisien itu sendiri berarti Perusahaan (*entitas*) mampu meningkatkan setiap pendapatan (*output*) dan mampu mengurangi seluruh biaya (*input*) yang tentunya tetap dalam batas kewajaran. Sedangkan makna Efektif itu sendiri berarti, Perusahaan (*entitas*) mampu memaksimalkan realisasi akan pendapatan dan melebihi dari sebuah target diawal, dan meminimalisir seluruh biaya sesuai apa yang diharapkan yaitu target dapat tercapai. Namun sangat penting juga diingat, walaupun suatu input telah menurun, tetap selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas sebuah produk atau jasa tersebut harus menjadi perhatian untuk bagaimana mempertahankannya. Ketika kita tidak memperhatikan hal tersebut, sama halnya kita menurunkan upaya meminimalisir biaya yang selalu diikuti atau disertai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas hasil produk atau jasa perusahaan.

Capaian target perlu dibuat penetapannya lewat proses sebuah manajemen yang dimulai dengan tepatnya pengambilan sebuah keputusan keputusan yang baik, dalam sebuah penyusunan anggaran yang tepat, untuk melaksanakan anggaran yang tepat, selalu melakukan pengendalian yang efektif, dan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap adanya penyimpangan anggaran disetiap prosesnya. Informasi akuntansi yang akurat adalah alat yang baik dibutuhkan untuk meraih capaian efisiensi dan efektivitas, dalam proses manajemen tersebut informasi akuntansi dapat digunakan.

6.2 Pengertian Pendapatan

Dalam suatu perusahaan pendapatan adalah bagian dari sumber yang sangat penting dalam proses pembuatan sebuah laporan laba rugi. Banyak yang masih bingung tentang apa itu pendapatan. Penyebabnya adalah pendapatan adalah *revenue* dan bisa juga disebut sebagai *income*, atau dasar dari itu kata *revenue* disebut sebagai pendapatan penghasilan sekaligus keuntungan dan *income* juga bisa mengandung arti sebagai penghasilan.

Dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan, pendapatan memiliki pengaruh besar, ketika perusahaan memiliki pendapatan yang sangat besar secara langsung perusahaan tersebut dapat melakukan pembiayaan yang dibebankan kepadanya di seluruh kegiatan-kegiatan operasional perusahaan dan biaya-biaya lain diluar operasional perusahaan. Bukan hanya itu, perusahaan juga dapat menyajikan laba rugi yang dihasilkan dari pendapatan tersebut yang tersaji dalam setiap laporan laba rugi. Artinya pendapatan adalah sebagai darah kehidupan yang berada didalam perusahaan.

“Banyak pendapat yang mengemukakan tentang pendapatan diantaranya dalam kamus besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya)(1). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba”(2).

“Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi

adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik”(1).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebuah hasil dari penjualan barang dan jasa yang diterima dari pelanggan. Pendapatan adalah hasil berpindahnya barang dan jasa kepada pelanggan yang menghasilkan arus masuk aktiva atau pengurangan utang.

Pendapatan adalah penambahan modal atas proses transaksi penjualan barang dan jasa oleh perusahaan. Aktivitas Penerimaan jasa, Penjualan Produk, pengiriman barang dan aktivitas lainnya yang menjadi penyebabnya aliran kas masuk aktiva dan peningkatan lainnya atas kewajiban atau atas aktiva dan bisa jadi kombinasi dari keduanya.

“Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan berikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya”(3).

Ciri-ciri maju atau tidaknya suatu daerah dapat kita lihat dari tingkat pendapatannya. Ketika pendapatan daerah tersebut mempublikasikan atau memperoleh hasil yang relatif rendah, dapat diambil kesimpulan bahwa rendahnya kesejahteraan daerah tersebut serta dampaknya pada kemajuan daerah. Tingkat konsumsi masyarakat yang memiliki kelebihan pastinya akan ditabung di bank dan adapun tujuannya tidak lain adalah untuk mengantisipasi seluruh kemajuan disetiap bidang antara lain bidang Pendidikan, bidang produksi dan lain sebagainya yang juga mempengaruhi peningkatan tabungan masyarakat. Sebaliknya jika pendapatan masyarakat

yang lebih tinggi, maka dapat dipastikan kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut akan tampak meningkat.

“Pemerintah daerah juga dapat membantu pemerataan pendapatan di tiap daerah agar tidak terjadi kesenjangan dan konflik antar daerah. Peran yang sangat penting juga adalah pemerintah dapat menggunakan APBD dalam politik fiskal guna mencapai ekonomi yang lebih stabil dan pemerataan yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran atau biasa disebut kebijakan fiskal yang nanti akan berdampak pula terhadap pemerataan tingkat nasional dan meningkatkan nilai mata uang negara yang pada akhirnya semua elemen merasakan dampak yang baik dari hal tersebut”(4).

Pendapatan adalah Penurunan kewajiban dan peningkatan kenaikan aktiva pada proses aliran kas yang masuk melalui kegiatan-kegiatan normal sebuah perusahaan disetiap proses selesainya menciptakan produk barang atau jasa.

“Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga perunit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan”(1).

Oleh sebab itu, ukurannya adalah jika pendapatan masyarakat tinggi maka mempengaruhi konsumsi masyarakat, begitupun sebaliknya jika pendapatan masyarakat rendah akan mempengaruhi konsumsi masyarakat menjadi rendah pula.

Saling keterkaitan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang pastinya sangat penting didalam berbagai problematika ekonomi. Sangat ril kita lihat bahwa ketika tingkat konsumsi masyarakat meningkat itu artinya pendapatan mereka pasti meningkat, dan begitupun sebaliknya jika pendapatan masyarakat menurun, pengeluaran konsumsi pun akan menurun. Pengelolaan penerimaan atau penghasilan oleh masyarakat itu sangat penting, sebab hal tersebut dapat menekan tinggi rendahnya pengeluaran.

Distribusi Pendapatan adalah proses penyaluran atau belanja masyarakat untuk kebutuhan dalam hal konsumsi. Minusnya distribusi pendapatan dapat mengakibatkan daya beli masyarakat rendah sehingga akan terjadi beberapa faktor diantaranya tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan, tingkat kelaparan, tingkat ketidakadilan, dan lain sebagainya yang pastinya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah terhadap golongan yang memiliki pendapatan yang tinggi, selanjutnya akan menimbulkan kecemburuan social ditengah masyarakat.

“IAI (2015: PSAK 23) mengemukakan bahwa: Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Arus kas masuk terjadi karena ada penjualan secara tunai dan peningkatan aset lain terjadi karena penjualan secara kredit. Peningkatan aset yang dimaksud disini ialah piutang. Penurunan liabilitas dapat juga menimbulkan pendapatan karena perusahaan memperoleh pengurangan atau penghapusan utang dari kreditur. Semua kejadian yang menimbulkan pendapatan di atas berkaitan dengan pembuatan produk, pembelian barang atau bahan baku, karena pelaksanaan kegiatan utama dan dilakukan secara kontinyu.(5)”

6.2.1 Karakteristik Pendapatan

Pendapatan berasal dari manapun yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu dari hasil penjualan barang maupun jasa dan dari berbagai kelompok pendapatan yang lainnya, semua itu memiliki karakteristik yang sama dalam sebuah pencatatan.

Karakteristik pendapatan adalah:

- 1) Perolehan laba lahir di setiap kegiatan-kegiatan utama perusahaan.
- 2) Aktivitas produksi yang berkesinambungan disetiap kegiatan-kegiatan utama perusahaan

Beberapa penjelasan lain tentang karakteristik pendapatan antara lain:

1. Aliran masuk atau aliran aset
Jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, kenaikan laba ekonomi, aliran dana dari konsumen, laba penjualan aset.
2. Kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang terus menerus berproses atau berjalan
Merupakan pendapatan dari kegiatan normal perusahaan. Terkadang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama suatu perusahaan.
3. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban dimana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya
Misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan, pengirim barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan.
4. Suatu entitas
Pendapatan definisi sebagai kenaikan aset bukannya kenaikan ekuitas bersih meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih.

5. Setiap produk perusahaan dalam kegiatan aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tetapi bukan termasuk pendapatan itu sendiri.

Produk fisik yang telah dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut yang merupakan pendapatan. Produk merupakan hasil pencapaian dari tiap kegiatan produktif perusahaan. Pendapatan merupakan suatu aliran masuk aset (unit moneter) dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fisis atau moneter yang berupa penyerahan produk (*Output*) perusahaan.

6. Pertukaran produk, harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat kedalam sistem pembukuan.

Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen.

6.2.2 Jenis-jenis Pendapatan

Setiap aktivitas proses produksi yang termasuk dalam unsur pendapatan yang telah tertuang dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Diterimanya pendapatan dari dalam usaha utama oleh perusahaan.
2. Diterimanya pendapatan dari luar usaha utama oleh sebuah perusahaan.

Pendapatan operasional dan pendapatan non operasional adalah kegiatan dalam dunia perbankan, adapun penejelasannya sebagai berikut:

1. Pendapatan operasional, pendapatan yang diperoleh dari hasil langsung dari operasional perusahaan. Selanjutnya dalam Pendapatan operasional ada yang namanya pendapatan bersih dan pendapatan kotor.

- a. Pendapatan kotor, pendapatan dari nilai asli, nilai sesungguhnya dan faktor penjualan sebelum dikurangi dengan faktor *return* barang dan seluruh potongan penjualan.
- b. Pendapatan bersih, pendapatan diperoleh dari seluruh hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor *return* barang dan seluruh potongan penjualan.
2. Pendapatan non operasional, pendapatan yang secara otomatis langsung diterima tanpa adanya kegiatan, dan penjualan. Selanjutnya Pendapatan non operasional juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu dua bagian tersebut adalah perolehan sewa dan bunga.
 - a. Hasil sewa adalah hasil diperoleh setelah membentuk usaha jasa sewa suatu objek, misalnya menyewakan mobil, menyewakan rumah, atau bangunan gedung dll.
 - b. Bunga adalah hasil yang diperoleh setelah melakukan usaha jasa peminjaman uang kepada pihak lain.

6.3 Kriteria Pengakuan Pendapatan

Ada 4 (empat) kriteria sebuah pengakuan pada pendapatan yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan ketika terjadi penjualan
Ketika terjadi aktivitas yaitu proses serah terimanya pendapatan dalam hal ini penerimaan barang atau jasa telah sepenuhnya diterima konsumen maka itu artinya telah ada pengakuan pendapatan.
2. Pengakuan pendapatan sebelum adanya penyerahan
Ketika suatu perusahaan melakukan proses produksi dan diakhiri dengan selesainya produksi hal demikian adalah pengakuan pendapatan sebelum adanya penyerahan.
Contohnya: Sebuah sistem yang dibuat yang berhubungan dengan *purchase order* dan *purchase requisition* dalam bidang manufaktur dan retail.

3. Pengakuan pendapatan setelah adanya penyerahan
Karena sesuai dengan namanya, pendapatan yang satu ini nantinya akan diakui jika telah menerima uang pembayaran dari konsumen karena telah terjadi transaksi antara kedua belah pihak.
4. Pengakuan pendapatan atas suatu transaksi khusus
Pengakuan pendapatan yang satu ini di gambarkan dengan contoh penjualan waralaba atau *franchise*, serta barang konsinyasi.

Pada umumnya, ketika terjadi penjualan maka pada saat itu juga diakuinya pendapatan, baik proses penjualan tersebut dilakukan secara tunai maupun kredit. Jika prinsip penjualan dijadikan dasar dalam hal guna pengakuan pendapatan artinya entitas tersebut menganut accrual basis. Dengan dimulainya transaksi penjualan, penawaran harga dan barang terhadap penjual telah disetujui oleh keduanya baik penjual maupun pembeli. Selanjutnya dilain pihak, syarat-syarat pembayaran yang telah disetujui oleh pembeli yang ditawarkan oleh penjual. Contoh : 5/15, n/30. Ini memberikan gambaran bahwa selama 30 hari jangka waktu penjualan kredit, ketika pembeli menyelesaikan pembayaran selama 15 hari, maka pembeli tersebut akan memperoleh potongan tunai sebesar 5%.

Jika penjualan menjadi dasar dalam sebuah pengakuan pendapatan, maka itu adalah benar dan paling bagus dari metode pengakuan pendapatan selain dari hasil penjualan, alasannya sebagai berikut: (1) Berakhirnya proses produksi, (2) Setiap individu atau sebuah industri membeli sebuah produk yang siap digunakan. (3) Proses transaksi berdasarkan asas suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun (4) Telah terjadi penyerahan ke pembeli, baik itu asset atau produk dan penjual menerima hasil atau harga dari asset atau produk tersebut. (5) Transaksi pembayaran dilakukan oleh

pembeli atas apa yang telah diterimanya yaitu asset atau produk yang telah dibeli.

"Pada paragraf 22 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menyebutkan bahwa "Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan". Paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa "Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar".

Seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas adalah akuntansi berbasis akrual. Bukan hanya transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pendapatan saja yang dikatakan akuntansi berbasis akrual, namun seluruh aktivitas transaksi seperti contoh pencatatan transaksi beban.

6.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

Berikut dibawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan:

1. Modal

Modal pada posisi untuk keseluruhan pembiayaan, baik itu mulai produksi hingga sampai pada tahap pendistribusian. Jika perusahaan tidak memiliki banyak modal maka konsekuensinya akan sangat sulit bila menjual produknya,

apalagi produk yang akan dijual tersebut baru dalam pasaran artinya belum dikenal oleh masyarakat atau para calon pembeli atau bisa saja lokasi calon pembeli jauh dari tempat perusahaan.

2. Efektivitas Penjualan

Seluruh elemen penjualan belum bekerja maksimal dalam hal penjualan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Hal ini menjadi perhatian bagi manajer perusahaan untuk tetap mengontrol seluruh elemen yang terlibat pada bagian penjualan.

3. Kualitas Produk atau Jasa

Demi meningkatkan minat pembeli tentunya perusahaan selalu menjaga kualitas produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada para pembeli. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan volume pendapatan bagi perusahaan.

4. Promosi

Promosi juga menjadi bagian penting yang harus di upayakan secara massif untuk bagaimana memperkenalkan hasil produk dari perusahaan demi menambah peningkatan pendapatan.

5. Kepercayaan Pelanggan

Kepercayaan pelanggan juga harus dijaga dan dirawat, agar tidak berpaling sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan.

6. Opreasional Perusahaan

Operasional Perusahaan juga tentunya harus tetap jalan, aktivitas operasional adalah bagian dari proses untuk memperoleh pendapatan. Ketika opreasional macet atau tidak jalan otomatis pendapatanpun akan berkurang bahkan tidak ada sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemasaran Syariah Berbasis E-Marketing - Google Books [Internet]. [cited 2022 Aug 2]. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/PEMASARAN_SYARIAH_BERBASIS_E_MARKETING/IDx2EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- B. N. Marbun. kamus manajemen [Internet]. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; 2003 [cited 2022 Aug 3]. 203–458 p. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Kamus_manajemen/XNhhAAAACAAJ?hl=id&kptab=overview
- Pengantar Ekonomi Makro - Google Books [Internet]. [cited 2022 Aug 2]. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/PENGANTAR_EKONOMI_MAKRO/dpxxEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=Sadono+Sukirno,+Teori+Pengantar+Mikro+Ekonomi,+Rajagrafindo+Persada,+Jakarta,+2006,&pg=PA296&printsec=frontcover
- Meme Rukmini CAWN dkk. Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Tata Kelola Menuju Pemerintahan Yang Baik. SUWANDI, editor. Purbalingga: Cv. Eureka Media Aksara;
- Dr. Ibrahim Ingga MSi, CMA. Teori Akuntansi Dan Implementasi. Yogyakarta: Indonesia Pustaka; 2016. 1–201 p.

BAB 7

BIAYA

Oleh Renika Hasibuan

7.1 Pendahuluan

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak terlepas dari biaya, dimana dalam menghasilkan suatu produk perusahaan akan mengeluarkan biaya. Pada umumnya, tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Sehingga, perusahaan perlu untuk mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil untuk meningkatkan keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan informasi keuangan dalam mengambil keputusan yang tepat, baik pihak ekstern maupun intern, sehingga dalam membuat laporan keuangan diperlukan pemahaman mengenai konsep biaya dimana dalam menganalisis karakteristik dari setiap transaksi yang berhubungan dengan biaya.

Pengenalan batasan dari Karakteristik biaya atau yang berhubungan dengan biaya harus dipahami terlebih dahulu dalam menganalisis biaya. Dengan adanya pemahaman yang baik, maka transaksi yang berhubungan dengan biaya akan lebih mudah untuk diidentifikasi sehingga biaya dalam laporan keuangan dapat disajikan dengan benar. Menurut Hansen dan Mowen (2006) menyatakan bahwa biaya (*cost*) adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan atau dikonsumsi untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau masa mendatang. Supriyono (2000) mendefinisikan biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh

penghasilan atau *revenue* yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan Mulyadi (2001) mendefinisikan biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Ada dua konsep dasar yang melandasi pencatatan nilai biaya (*cost*) sebagai dasar pembebanan yaitu konsep upaya dan hasil (*efforts and accomplishment*). Atas dasar konsep tersebut *Cost* dapat dipisah menjadi dua, yaitu: *cost* yang masih menjadi potensi jasa (melekat pada aktiva), dan *Cost* yang potensi jasanya dianggap sudah habis dalam rangka menghasilkan pendapatan. Pembebanan *cost* satu periode akuntansi didasarkan pada kriteria penentuan habisnya manfaat *cost* tersebut. Pertama, apakah manfaat *cost* habis dalam rangka penyerahan produk/jasa, atau sering disebut biaya (*expenses*). Kedua, apakah manfaat *cost* habis karena sebab lain, yang digolongkan sebagai rugi (*losses*).

Dalam penyusunan laporan keuangan, pengukuran dan pengakuan biaya memainkan peranan penting. Kecermatan mengukur besarnya biaya akan mempengaruhi keakuratan informasi keuangan yang dihasilkan. Ketepatan saat mengakui biaya juga akan berpengaruh dalam penentuan besarnya laba/rugi perusahaan. Besarnya laba/rugi perusahaan dapat dilihat dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi yang disajikan secara wajar pada setiap periode akuntansi yang menjadi elemen utamanya adalah pendapatan dan beban. Pendapatan diharapkan dapat diperoleh maksimum guna mendorong aktivitas perusahaan sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan akan cepat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan beban diharapkan dapat dianggarkan secara tepat dengan memerlukan keputusan dan perkiraan yang tepat oleh pihak perusahaan, sehingga beban yang dikeluarkan tidak berlebihan.

Dalam pembuatan laporan laba rugi yang harus diperhatikan cara pengukuran, pengakuan dan prinsip penandingan (*matching principle*). Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara *cost* yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan.

Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut, agar dihasilkan besarnya laba yang tepat. Menurut Muqodim (2005) terdapat tiga metode penandingan beban terhadap pendapatan yaitu 1). berasosiasi atas dasar sebab akibat, 2). alokasi sistematis dan rasional, dan 3). serta pengakuan segera.

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk membuat makalah dengan judul "*Biaya (Expenses)*".

7.2 Pengertian Biaya

Biaya adalah suatu pengorbanan yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Namun, beberapa lainnya juga mengatakan bahwa biaya adalah sebuah bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pihak, baik itu individu maupun perusahaan untuk mendapatkan manfaat lebih dari tindakan tersebut.

Secara mudah dalam proses perdagangan atau sebuah transaksi, biaya merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa. Itu semua menyangkut hal yang memiliki

nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan dan lain-lain. Karena itu, biaya dijadikan pertimbangan dalam menentukan harga jual produk tersebut.

Pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut : Menurut Mursyidi (2008) biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.

Biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh sesuatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut (Raharjaputra, 2009). Hansen dan Mowen (2006) mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa mendatang bagi organisasi. Beberapa unsur pokok biaya yaitu :

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi atau yang akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

7.3 Karakteristik Biaya

A. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu relevant range aktivitas. Biaya tetap memiliki Karakteristik sebagai berikut::

Controllability

Secara umum biaya tetap dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan, artinya secara umum manajemen perusahaan dapat mengendalikan (sebagian besar) biaya tetap. Meskipun biaya penyusutan pada umumnya dalam jangka pendek tidak dapat dikendalikan (*non controllable*), tetapi untuk jangka panjang ia merupakan biaya yang dapat dikendalikan (*controllable*). Sedangkan biaya tetap yang lain (misalnya gaji) betul-betul merupakan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan.

Hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan

Biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Selama suatu perusahaan memiliki kapasitas tersebut, maka perusahaan tidak dapat menghindari adanya unsur biaya tetap. Sebagai contoh biaya depresiasi (penyusutan) akan tetap membebani perusahaan tanpa memandang beberapa bagian dari kapasitas yang menganggur (tidak digunakan).

Relevant range

Relevant range menjadi batas sampai sejauh mana biaya-biaya betul-betul bersifat tetap. Pada umumnya, biaya-biaya tersebut akan bersifat tetap pada suatu relevant range tertentu dan akan berubah di luar range tersebut. Hanya sedikit biaya yang betul-betul bersifat konstan dalam berbagai tingkat penggunaan kapasitas dari nol sampai kapasitas penuh.

Dasar pengukuran

Biaya tetap pada umumnya diperhitungkan berdasarkan satuan waktu, umpamanya bulan atau tahun. Kedua satuan tersebut lebih lazim digunakan. Gaji karyawan misalnya ditentukan atas dasar bulanan.

Konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata

Biaya ini secara total tidak berubah untuk suatu periode waktu tertentu, namun biaya ini bersifat variabel yakni cenderung menurun seiring meningkatnya jumlah kegiatan (*output*), atau meningkat seiring penurunan jumlah kegiatan. Dapat dibebankan kepada departemen-departemen berdasarkan keputusan manajerial atau menurut metode alokasi biaya Tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif daripada penyelia operasi.

B. Biaya Variabel

Merupakan biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan *output* atau aktifitas.

Ciri-ciri biaya variabel:

- 1) Perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume.
- 2) Biaya perunit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan.
- 3) Dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat.
- 4) Dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu.

C. Biaya Semi Variabel

Merupakan biaya yang jumlahnya bertambah besar dengan semakin besarnya tingkat kegiatan di dalam perusahaan, namun pertambahan jumlah biaya ini tidak sebanding dengan pertambahan tingkat kegiatan yang ada. dapat diartikan bahwa biaya semi variabel mengandung unsur-unsur biaya yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel.

Ciri-ciri biaya semi variabel:

- 1) Meskipun tidak ada aktivitas biaya ini tetap ada.
- 2) Total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah.

Beberapa karakteristik yang tercermin dalam biaya dapat berupa :

- 1) Uang : Biaya aktiva harus dinyatakan dengan uang.
- 2) Hak pemakaian: Perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.
- 3) Nilai: Biaya suatu aktiva mencerminkan nilai ekonomis yang nantinya tersebut akan digunakan oleh perusahaan.
- 4) Kondisi dan pembatasan: hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat dan jika aktiva tersebut milik perusahaan melalui pembelian maka hak perusahaan akan aktiva menjadi tidak dapat dibatasi.
- 5) Unsur Waktu: Jika aktiva memberikan waktu pemakaian yang lama maka akan mencerminkan biaya yang berbeda.
- 6) Berwujud dan tak berwujud: karena aktiva merupakan hak yang memiliki umur ekonomis.
- 7) Nilai Guna: kegunaan merupakan esensi dari biaya aktiva, tanpa nilai guna perusahaan tidak akan melakukan pengadaan (perolehan) aktiva.

7.4 Pengukuran dan Pengakuan biaya

A. Pengukuran Biaya

Sejalan dengan penilaian aktiva dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada :

1) Cost historis

Cost historis merupakan jumlah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas *cost historis*, dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti : gedung, peralatan dan sebagainya.

- 2) Cost pengganti / cost masukan terkini (*replacement cost / current input cost*)

Cost masukan menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama contohnya, penilaian untuk persediaan.

- 3) Setara kas (*cash equivalent*)

Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasikan dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini.

B. Pengakuan Biaya

Pada dasarnya *cost* memiliki dua kedudukan penting, yaitu :

1. sebagai aktiva (potensi jasa) dan
2. sebagai beban pendapatan (biaya).

Proses pembebanan *cost* pada dasarnya merupakan proses pemisahan *cost*. Oleh karena itu agar informasi yang dihasilkan akurat, bagian *cost* yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian *cost* yang akan dilaporkan sebagai aktiva (diakui sebagai biaya periode mendatang) harus dapat ditentukan dengan jelas. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan *cost* tersebut yaitu :

- 1) Kriteria yang digunakan untuk menentukan *cost* tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan.
- 2) Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa *cost* tertentu ditangguhkan pembebanannya.

Semua *cost* dapat ditanggihkan pembelanannya sebagai biaya, apabila *cost* tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva yaitu :

- Memenuhi definisi aktiva (memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu).
- Ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai.
- Besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal.

Dari uraian di atas, secara umum dapat dirumuskan bahwa berdasarkan konsep penandingan (*matching*), pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat tentang pengakuan biaya, biasanya badan berwenang mengeluarkan aturan tertentu untuk mengakui biaya. Menurut IAI (2017), dalam Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa beban diakui dalam laporan rugi laba kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

7.5 Konsep Penandingan

Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan. Sementara *cost* yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Paton dan littleton (1940) dalam Ghozali dan Chariri (2014) menyatakan bahwa masalah utama

dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Meskipun demikian harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling penting adalah kelayakan (*reasonableness*), bukannya pengukuran fisik.

Dalam praktik, ada tiga dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam satu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah (Kam, 1990): hubungan sebab akibat (*association of causes and effects*), alokasi sistematis dan rasional (*systematic and rational allocation*) dan pembebanan segera (*immediate recognition*).

1. Identifikasi Cost Produk

Sesuai dengan konsep penandingan, semua *cost* produksi harus dibebankan pada produk yang bersangkutan. *Cost* produk dapat dibagi menjadi dua. Pertama, *cost* produk yang melekat pada produk terjual dan nantinya akan dibebankan sebagai biaya. Kedua, *cost* yang melekat pada produk yang belum terjual (dilaporkan sebagai persediaan) dan dicatat sebagai aktiva sampai produk tersebut terjual.

Beberapa *cost* produk dapat langsung dihubungkan dengan produk tertentu, sementara *cost* yang lain hanya dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi dan dialokasikan pada produk berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. Disinilah pentingnya melakukan identifikasi untuk menentukan *cost* produk langsung (*direct product cost*) dan *cost* produk tidak langsung (*indirect product cost*).

2. Biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang, tetapi tidak masuk dalam *cost* produksi

Pada beberapa kasus, *cost* yang dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung dengan produk tertentu. Hal ini disebabkan *cost* tersebut tidak menunjukkan nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contoh dari kasus ini adalah biaya penjualan dan administrasi.

Biaya penjualan dan administrasi tidak harus ditandingkan dengan pendapatan di masa mendatang jika tidak ada jaminan yang rasional untuk menghubungkan biaya tersebut dengan pendapatan di masa mendatang. Meskipun jenis biaya tersebut tidak secara langsung menghasilkan pendapatan karena secara teknis sulit mencari hubungan sebab akibatnya, namun biaya tersebut harus tetap dibebankan sebagai biaya. Tidak diperolehnya pendapatan atau tidak adanya kemungkinan rugi pada periode berjalan, bukan merupakan alasan untuk menunda pembebanan biaya. Alasannya adalah apabila suatu *cost* barang dan jasa tidak memberikan manfaat pada periode sekarang dan juga bukan merupakan rugi, maka *cost* tersebut tentu akan memberikan manfaat masa mendatang. Oleh karena itu, *cost* tersebut harus dialokasikan pada periode mendatang agar dapat dilakukan penandingan antara biaya dengan pendapatan.

3. Biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui

Umumnya biaya yang berhubungan dengan pendapatan akan terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah penjualan. Apabila *cost* kegiatan

tertentu dapat ditaksir secara layak dan cukup pasti, maka *cost* tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi hubungan sebab akibat harus dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa pendapatan yang diakui memiliki hubungan sebab akibat dengan *cost* yang bersangkutan. Contohnya, jika suatu garansi diberikan selama penjualan pada periode tertentu, maka biaya atas jaminan tersebut mungkin saja terjadi pada masa mendatang.

Penandingan yang tepat akan memperlakukan garansi tersebut sebagai biaya pada saat penjualan dan mencatat hutang untuk menampung *cost* yang timbul dari garansi tersebut. Memang, *cost* ini belum tentu terjadi. Namun demikian, tidak ada alasan yang tepat untuk menunda pembebanan *cost* tersebut sebagai biaya. Apabila estimasi terhadap *cost* garansi yang mungkin timbul dapat ditaksir dengan layak dan cukup pasti, maka *cost* tersebut harus diakui sebagai biaya pada saat pendapatan diakui.

7.6 Basis Asosiasi Biaya

Basis Asosiasi dalam rangka menghubungkan biaya dan biaya, perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomi layak. Berbagai basis asosiasi diantaranya sebagai berikut. Asosiasi Sebab dan Akibat Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungan sebab-akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh Karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab-akibat.

7.7 Penyajian Biaya

Pendekatan ini digunakan untuk menilai sebuah bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru atau sebuah proyek baru yang nilainya dikurangi penyusutan. Terdapat langkah-langkah dengan penerapan pendekatan biaya : Untuk menentukan biaya bangunan untuk bangunan baru Dapat memperkirakan seberapa besar depresiasi atau penyusutan bangunan itu Agar mendapat nilai sebuah bangunan, biaya pembangunan untuk bangunan baru dengan cara di depresiasi (penyusutan). Dapat menentukan nilai tanah dimana sebuah bangunan itu akan didirikan Menambahkan nilai tanah dan nilai bangunan sehingga memperoleh nilai pasar wajar. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan sarana untuk itu adalah statemen laba rugi. Penyajian elemen pendapatan, untung, biaya, dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba.

DAFTAR PUSTAKA

- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Accounting Theory: Teori Akuntansi*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ghozali, Imam, dan Anis Chariri. 2014. *Teori Akuntansi (Edisi Keempat)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hansen dan Mowen. 2006. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mursyidi. 2008. *Akuntansi Biaya: conventional, just in time /RAD* Jakarta: Refika Aditama
- Muqodim, 2005. *Teori Akuntansi (Edisi 1)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Paton, W.A. and Littleton, A.C. 1940. *An Introduction to Corporate Accounting Standards (Ann Arbor, American Accounting Association Monograph No.3)*.
- Raharjaputra, Hendra S. 2009. *Panduan Praktis Manajemen Keuangan dan Akuntansi Untuk Eksekutif Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyono, R.A. 2000. *Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan (Edisi Kedua)*. Yogyakarta : BPFE.
- Suwardjono, 2005, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: BPFE
- _____, 2010, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Vernon Kam. 1990. *Accounting Theory (Second Edition)* Canada: John willey and Sons.

BAB 8

LABA

Oleh Rihfenti Ernayani

8.1 Pendahuluan

Laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Istilah lain yang digunakan untuk menggantikan kata laba adalah keuntungan atau *profit*. Salah satu tujuan utama perusahaan ingin mendapatkan laba dari hasil usahanya. Laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Laba yang dihasilkan dapat menentukan bagaimana kinerja dari suatu perusahaan, sehingga laba memegang peranan penting bagi sebuah perusahaan karena laba merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu usaha dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen ataupun investor. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan adalah mendapatkan laba yang tinggi karena hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh manajemen, karena semakin tinggi laba yang diperoleh, maka akan semakin tinggi bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pengelola secara langsung.

8.2 Pengertian Laba

Laba adalah hasil dari investasi. Salah satu definisi laba yang diterima lebih luas adalah jumlah yang dapat diberikan kepada investor sebagai hasil investasi dan kondisi perusahaan diakhir periode masih sama baiknya dengan diawal periode (Earl and Skousen, 2004:25). Laba merupakan tanggung jawab

inti dengan menghitung selisih pemasukan dan pengeluaran atau selisih dari pendapatan dan biaya (Halim & Supomo, 2005: 139). Laba sebagai selisih antara pendapatan dengan pengeluaran dan keseimbangan biaya-biaya pada periode akuntansi tertentu (Nafarin, 2007:788), sedangkan laba menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara total pendapatan dan total beban usaha atau imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa). Sebagai akibatnya laba akan meningkatkan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas.

8.3 Unsur-Unsur Laba

Unsur-unsur laba antara lain; (1) Pendapatan, (2) Beban, (3) Biaya, (4) Untung-Rugi, dan (5) Penghasilan.

Pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan kegiatan perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pendapatan dapat diperoleh dari kegiatan operasional berupa kredit atau penjualan barang dari perusahaan.

Beban. Unsur beban merupakan pengeluaran atau pemakaian aset dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas operasi, atau berkurangnya aset atau penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi, sehingga terjadi penurunan ekuitas.

Biaya. Unsur biaya adalah uang kas perusahaan yang dikorbankan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian hari akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Apabila ada biaya yang sudah kadaluarsa, maka biaya ini disebut sebagai beban.

Untung-Rugi. Keuntungan perusahaan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, namun bukan berasal dari pendapatan investasi pemilik perusahaan.

Penghasilan. Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam PSAK no.23 Ikatan Akuntan Indonesia 2007 paragraf 70 menyatakan sebagai berikut: Penghasilan "*Income*" adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya pada paragraf 74 dinyatakan: definisi penghasilan meliputi baik pendapatan "*revenue*" maupun keuntungan "*gain*". Penghasilan merupakan hasil akhir dari bisnis. Penghasilan inilah yang dapat digunakan untuk kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh laba yang tinggi.

Menurut Hanafi dan Halim (2012) ada tiga elemen pokok dalam laporan laba rugi yaitu: (1) pendapatan operasional, (2) beban operasional, dan (3) untung-rugi.

Pendapatan Operasional. Pendapatan didefinisikan sebagai aset masuk atau aset yang naik nilainya atau utang

yang semakin berkurang atau kombinasi ketiga hal tersebut, selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang atau memberikan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan. Pendapatan operasional adalah penghasilan yang didapat langsung dari kegiatan operasional perusahaan atau suatu bisnis. Contoh; pendapatan yang didapat dari hasil penjualan barang-barang hasil produksi.

Beban Operasional. Beban operasional bisa didefinisikan sebagai aset keluar atau pihak lain memanfaatkan aset perusahaan atau munculnya utang atau kombinasi antar ketiganya selama periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa atau melaksanakan aktivitas lainnya yang merupakan operasi pokok perusahaan. Beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban umum administrasi. Beban operasional ini menyangkut keseluruhan beban yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Untung atau Rugi. Untung atau rugi didefinisikan sebagai kenaikan modal dari transaksi yang bersifat insidental dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu, kecuali yang berasal dari pendapatan operasional dan investasi dari pemilik saham.

8.4 Jenis-Jenis Laba

Supriyono (2002:177) mengemukakan jenis-jenis laba dalam hubungannya dengan perhitungan laba yaitu:

- Laba kotor adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
- Laba dari operasi adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.

- Laba bersih adalah angka terakhir dalam perhitungan laba atau rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain dikurangi dengan beban lain.

Jenis laba menurut Kasmir (2011:303) ada dua yaitu: laba kotor (*gross profit*) dan laba bersih (*net profit*).

Laba Kotor. Laba kotor atau *gross profit* yaitu laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan, artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Laba kotor yang didapat belum bisa dihitung sebagai keuntungan perusahaan. Laba kotor didapat dari jumlah penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan.
$$\text{Laba Kotor} = \text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan (HPP)}$$

- Penjualan Bersih, adalah hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan penjualan: $\text{Penjualan} - \text{Distribusi} - \text{Retur Penjualan} - \text{Diskon Penjualan}$
- Harga Pokok Penjualan (HPP), adalah biaya yang berkaitan dengan barang hasil produksi yang akan dijual ke konsumen: $\text{Persediaan awal} + \text{Pembelian Bersih} - \text{Persediaan Akhir}$
- Pembelian Bersih, adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli segala kebutuhan berkaitan dengan proses produksi dan penjualan: $\text{Pembelian} + \text{Distribusi} - \text{Retur pembelian} - \text{Diskon Pembelian}$

Laba Bersih. Laba bersih atau *net profit* merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Laba bersih identik dengan laba perusahaan selama satu periode akuntansi. Cara menghitung laba bersih; sebelum menghitung laba bersih, hal yang pertama harus dilakukan adalah menghitung jumlah laba kotor yang didapat dalam periode

yang telah ditentukan. Setelah nilai laba kotor didapatkan, dihitung berapa jumlah atau nilai laba bersih pada periode yang ditentukan tersebut dengan rumus Laba Bersih = Laba Kotor – Beban Usaha

- Beban Usaha: Beban Operasional + Beban Non-Operasional
- Laba Sebelum Pajak, Bunga, Penyusutan Amortisasi (EBTIDA): Beban Bunga – Biaya Operasional
- Laba Sebelum Pajak dan Bunga (EBIT): EBITDA – Biaya Penyusutan dan Amortisasi
- Laba Sebelum Pajak (EBT): Beban Bunga + Pendapatan Bunga - EBIT

8.5 Faktor yang Mempengaruhi Laba

Faktor-faktor yang mempengaruhi laba antara lain: (a) biaya, (b) harga jual, dan (c) volume penjualan dan produksi. (Mulyadi, 2001:513).

Biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan. Biaya dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

Harga Jual. Harga jual merupakan harga yang diperoleh dari penjumlahan biaya produksi total ditambah dengan mark up yang digunakan untuk menutup biaya overhead pabrik perusahaan. Harga jual adalah harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya kepada pembeli. Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan.

Volume Penjualan dan Produksi. Volume penjualan adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya atau besarnya jumlah barang atau jasa yang terjual. Volume produksi adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari masukkan sumber daya menjadi output yang diinginkan, yang diproduksi oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Besarnya volume penjualan berpengaruh pada volume produksi produk atau jasa tersebut. Volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

8.6 Kegunaan Laba

Laba dengan berbagai interpretasi diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai (Suwardjono 2005: 456):

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yg tertanam dalam perusahaan yg diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi.
2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen.
3. Dasar penentuan besar pengenaan pajak.
4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara.
5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik.
6. Alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang.
7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus.
8. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan.
9. Dasar pembagian dividen.

8.7 Perubahan Laba

Perubahan laba merupakan naik atau turunnya laba perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan investasi para investor maupun calon investor yang akan menanamkan

modalnya ke dalam perusahaan (Pramono, 2015), sedangkan Harahap (2016) menyatakan bahwa perubahan laba adalah perubahan relatif atas laba yang diperoleh berdasarkan selisih antara laba pada suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya lalu dibagi dengan laba periode sebelumnya. Terkait dengan laba, para ahli ekonomi mendefinisikan laba sebagai kaitan dari kekayaan bersih (modal) dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain laba merupakan kenaikan dalam kekayaan bersih yang dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan pada akhir periode tanpa mengakibatkan berkurangnya jumlah kekayaan bersih yang ada pada awal periode bersangkutan (Ramadhani, Sari, 2014).

Prediksi perubahan laba perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan. Penilaian tingkat keuntungan investasi oleh investor didasarkan oleh kinerja keuangan perusahaan, dapat dilihat dari tingkat perubahan laba dari tahun ke tahun. Para investor dalam menilai perusahaan tidak hanya melihat laba dalam satu periode, melainkan terus memantau perubahan laba dari tahun ke tahun (Lusiana, 2008). Perubahan laba dapat digunakan untuk menilai bagaimana sebenarnya hasil dari kinerja suatu perusahaan yang dilihat dari sebuah laporan keuangannya. Perubahan laba dianggap sebagai sesuatu yang vital karena dengan mengetahui perubahan laba para pemakai laporan keuangan dapat menentukan apakah terjadi peningkatan atau penurunan produktivitas secara keseluruhan (Agustina dan Silvia, 2012).

8.8 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Laba

Perubahan laba dapat disebabkan oleh beberapa faktor (Hanafi dan Halim, 2005) yaitu: (a) besarnya perusahaan, (b)

umur perusahaan, (c) tingkat leverage, (d) tingkat penjualan dan (e) perubahan laba masa lalu.

Besarnya Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan laba. Riyanto (2015) mendefinisikan ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aset. Perusahaan besar umumnya memiliki total aset yang besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Total aset yang besar pun menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Sehingga, semakin besar ukuran perusahaan maka perubahan labanya juga akan semakin meningkat.

Umur Perusahaan. Mardiyanto (2013) mengemukakan bahwa perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan sudah mempunyai banyak pengalaman. Semakin lama umur perusahaan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Umur perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada. Hal ini akan memberikan pengaruh positif terhadap perubahan laba, sehingga semakin besar umur perusahaan maka perubahan labanya akan meningkat.

Tingkat leverage. Setiap perusahaan harus dikelola secara efektif dan efisien agar dapat terus bertumbuh. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit untuk membiayai aktivitas operasional perusahaannya. Kebutuhan dana tersebut

dapat dipenuhi salah satunya dari sumber dana eksternal perusahaan yaitu dengan hutang (Singapurwoko, 2011). Leverage merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana perusahaan mampu untuk mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan juga mampu untuk melunasi kembali utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka panjang (Fahmi, 2016).

Tingkat Penjualan. Tingkat penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Tingkat penjualan di masa yang akan datang yang meningkat dapat membuat perubahan laba semakin tinggi. Suatu perusahaan yang melakukan tingkat penjualan yang baik di dalam kegiatan operasional akan memperoleh hasil optimal, sebab hal ini sebagai hasil kerja sama yang baik antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan beserta para karyawan sebagai suatu sumber kekuatan produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan.

Perubahan Laba Masa Lalu. Semakin besar perubahan laba di masa lalu, maka semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

Laba Ditahan

Dalam dunia usaha istilah laba ditahan merupakan istilah untuk menyebut laba yang tak dibagi, yakni keseluruhan maupun sebagian laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu serta tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Laba ditahan adalah laba yang ditahan untuk digunakan dalam aktivitas bisnis (Donald, 2002:354). Sumber dasar laba ditahan adalah laba dari operasi. Pemegang saham menanggung risiko terbesar dalam operasi perusahaan dan memikul setiap kerugian dan keuntungan dari kegiatan perusahaan. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas. Sedangkan

Riyanto (2015:243) menyebutkan bahwa laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan.

Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan. Namun apabila belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan laba perusahaan, maka laba tersebut akan menjadi laba yang ditahan (*retained earnings*). Laba ditahan ini akan digunakan kembali oleh perusahaan sebagai penambah ekuitas untuk membiayai aktivitas perusahaan. Munawir (2004:29) mengungkapkan bahwa laporan laba ditahan suatu perusahaan disajikan dengan cara mengurangi laba ditahan tahun sekarang dengan laba ditahan tahun sebelumnya. Laba ditahan itu sendiri dapat ditentukan dengan rumus; Laba ditahan = Laba bersih setelah pajak – dividen.

Manfaat Laba Ditahan

Alasan suatu perusahaan melakukan penahanan laba adalah untuk stabilisasi, investasi dan untuk memperbaiki struktur finansial (Blom dalam Riyanto, 2015:210). Selain itu adanya laba ditahan memberikan manfaat bagi operasional perusahaan yaitu; (a) membiayai operasional perusahaan, (b) membayar utang perusahaan, (c) investasi perusahaan di masa mendatang, dan (d) modal cadangan.

Membiayai Operasional Perusahaan. Agar operasional perusahaan tetap lancar, tentu dana yang dibutuhkan harus cukup, termasuk dana yang ada di dalam kas kecil dan kas besar perusahaan. Tanpa adanya dana yang cukup, operasi perusahaan akan terhambat atau bahkan tidak bisa berjalan. Untuk itu adanya laba ditahan sangat berperan penting dalam menjaga kinerja perusahaan agar tetap bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan untuk berkembang lebih besar. Apabila perusahaan memperoleh laba dengan jumlah kecil, maka laba ditahan dapat diambil.

Membayar Utang Perusahaan. Manfaat kedua dari diambilnya laba ditahan adalah dapat digunakan untuk membayar utang perusahaan, terutama utang yang mendekati tanggal jatuh tempo. Dengan membayar utang tepat waktu, nama baik perusahaan akan terjaga dengan baik.

Investasi Perusahaan di Masa Mendatang. Suatu perusahaan tentu menginginkan adanya peningkatan dalam usahanya, sehingga tak jarang perusahaan melakukan investasi di bidang bisnis yang lainnya. Untuk melakukan investasi bisnis ini perusahaan dapat melakukan laba ditahan sebagai sumber dana mereka. Dengan penggunaan laba ditahan, diharapkan nantinya perusahaan dapat melebarkan sayap dan terus berinovasi, agar perusahaan tidak hanya berjalan statis atau bahkan menurun.

Modal Cadangan. Meski sebagai antisipasi, modal cadangan harus dipersiapkan agar suatu saat perusahaan kekurangan dana atau membutuhkan modal lain ada dana yang bisa digunakan. Dengan adanya laba ditahan ini, perusahaan tidak bersusah payah mencari modal jika sedang kesulitan finansial. Modal cadangan dari laba ditahan ini juga dapat menghindari perusahaan dari meminjam dana ke bank yang dapat menambah utang dan justru memberatkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhani, Sari. 2014. Pengaruh Rasio Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Indeks Kompas 100, Tahun 2011-2012. JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2 Oktober 2014.
- Agustina dan Silvia. 2012. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Volume 2, Nomor 02, Oktober 2012.
- Earl K. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen. 2004. Akuntansi Intermediate. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,. H.25.
- Fahmi, Irham. 2016. Pengantar Manajemen Keuangan, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Halim, Abdul dan Supomo, Bambang. 2005. Akuntansi Manajemen. Yogyakarta: BPFE, h. 139.
- Hanafi, Mamduh dan Halim, Abdul. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: (UPP) STIM YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2016. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 23. Jakarta.
- Kasmir. 2011. Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1, Cetakan 4. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. h.303.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2002. Akuntansi. Intermediate. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lusiana Noor. 2008. Analisis Kegunaan Rasio-rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiyanto, Handoyo. 2013. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Rajawali. Press.

- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat. h.513.
- Munawir. 2004. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan Jakarta: Salemba Empat, h.788.
- Pramono, T.D. 2015. Pengaruh Current Ratio, working capital to total asset, debt to equity ratio Terhadap Perubahan Laba, Jurnal Akuntansi Surakarta Vol 11.
- Riyanto, Bambang. 2015. Dasar-dasar Pembelanjaan, Edisi 4, Yogyakarta: BPFE.
- Singapurwoko, Arif. 2011. The Impact of Financial Leverage to Profitability Study of Non-Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange, European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, (32), pp: 136-148.
- Supriyono. 2002. Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan, Edisi II. Yogyakarta, h.177.
- Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. H. 456.

Bab 9

Pengungkapan dan Sarana Interpretif

Oleh Maryam Nurdin

9.1 Kualitas, Pengungkapan, dan Interpretasi dalam Laporan Keuangan

Pengungkapan memberikan gambaran luas tentang hal yang berkaitan dengan informasi akuntansi yang disajikan, perusahaan yang membuat dan menggunakannya untuk mengevaluasi karyawan, lebih lanjut orang-orang yang menggunakan informasi ini dalam mengalokasikan modal untuk kepentingan perusahaan, dan orang-orang yang menghasilkan, memverifikasi, mengatur dan menafsirkan informasi ini pada kepentingan tertentu. Hal inilah yang menjadi banyak diperbincangkan dalam menyajikan informasi laporan keuangan (Healy and Palepu, 2001).

Teori keuangan mengemukakan bahwa pemegang saham secara khusus mengoptimalkan kebijakan pengungkapan, tata kelola perusahaan, dan insentif manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pilihan ini melibatkan pertukaran pengurangan komponen asimetri informasi dari biaya modal yang dihasilkan dari peningkatan kualitas pengungkapan terhadap biaya pengurangan insentif (Evans and Sridhar, 1996), biaya litigasi (Skinner *et al.*, 1994), dan biaya kepemilikan (Verrecchia, 1990). Untuk perusahaan tanpa peluang pertumbuhan (*growth*), pengungkapan yang diamanatkan mungkin memiliki kualitas yang cukup tinggi

untuk menghasilkan asimetri informasi yang rendah. Karena perusahaan ini tidak memerlukan keuangan eksternal dan memiliki biaya litigasi, insentif, dan kepemilikan yang rendah, perusahaan ini memiliki sedikit kebutuhan untuk pengungkapan sukarela. Untuk perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi (*high performance*), pengungkapan yang diamanatkan adalah kualitas yang rendah dan asimetri informasinya cenderung lebih tinggi. (Watts and Zimmerman, 1986) mengemukakan bahwa tidak semua manipulasi akuntansi manajerial akan dapat dihilangkan. Mungkin terlalu sulit untuk menghilangkan semua manipulasi semacam itu. Namun di pasar tenaga kerja dan modal yang dicirikan oleh ekspektasi rasional, manajer rata-rata tidak akan mendapatkan keuntungan dari manipulasi semacam itu.

Kaitannya dengan pengungkapan laporan keuangan (Harahap, 2011) menyatakan bahwa teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan merupakan tempat terjadinya hubungan kontraktual dengan manajemen, pemilik, kreditur dan pemerintah. Begitupun dengan hal yang dikemukakan oleh (Halim and Abdullah, 2006) bahwa hubungan *principal-agent* merupakan pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik. Penerapan kebijakan publik terkait dengan informasi simetris, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Teori keagenan biasanya digunakan untuk dapat mengidentifikasi kombinasi atau campuran dari kontrak kerja dan sistem informasi. Dengan demikian, dapat meningkatkan fungsi keuntungan prinsipal serta hambatan perilaku yang muncul dari kepentingan agen itu sendiri (Raharjo, 2007).

Dalam teori lainnya yaitu teori institusional, organisasi menghadapi tekanan institusional, dan mereka merespon tekanan tersebut (Arifin and Destriana, 2016). Respon yang dimaksud dapat berupa praktik dan struktur yang dapat diterima secara sosial sebagai pilihan organisasi yang tepat

untuk memperoleh legitimasi dari konteks kelembagaannya. organisasi lain yang telah berhasil mengadopsi dan memperoleh legitimasi. Tekanan dari organisasi lain memiliki efek yang kuat. Dengan demikian, organisasi yang merespons memiliki ketergantungan yang besar (*isomorfisme koersif*).

Konsep materialitas dalam pelaporan keuangan memiliki aspek kuantitatif dan kualitatif. Meskipun akuntansi perusahaan dan perusahaan dapat menggunakan ambang numerik seperti 5% dari pendapatan sebelum pajak penghasilan atau 10% dari akun tertentu keseimbangan, penentuan apa yang material harus mencerminkan baik besaran maupun sifat suatu barang.

Definisi materialitas dan interpretasi telah berkembang selama beberapa dekade. Pembuat standar dan regulator telah mengumumkan panduan materialitas untuk digunakan oleh perusahaan dan auditor di negara Amerika Serikat. Organisasi internasional telah menerbitkan aturan dan peraturan serupa. Semuanya cukup umum dan "berdasarkan prinsip" dalam arti bahwa mereka tidak memberikan panduan berbasis numerik khusus tentang cara menentukan apakah suatu item material. Namun, pedoman umum ini ada dalam seperangkat standar akuntansi yang jelas, baik Prinsip Akuntansi yang Diterima Secara Umum AS (U.S. GAAP) atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang sejatinya membantu memberi makna pada pedoman umum. Pedoman ini juga mendapat manfaat dari fakta bahwa pedoman tersebut diumumkan secara resmi oleh badan pengatur yang pada akhirnya mendapat dukungan undang-undang. Berikut ini adalah definisi yang paling penting dari materialitas untuk pelaporan keuangan:

Informasi adalah material jika menghilangkan atau salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna atas dasar informasi keuangan entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi

spesifik entitas berdasarkan sifat atau besaran item yang terkait dengan informasi dalam konteks laporan keuangan entitas individual. Akibatnya, Dewan (pemilik/pemegang saham) tidak dapat menentukan ambang kuantitatif yang seragam untuk materialitas atau menentukan sebelumnya apa yang bisa menjadi material dalam situasi tertentu (Whittington, 2008).

Dalam menafsirkan undang-undang sekuritas federal, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menyatakan fakta bahwa sesuatu disebut material jika ada "kemungkinan besar bahwa ... fakta tersebut akan dilihat oleh investor realistis secara signifikan mengubah 'total ' dari suatu informasi yang telah tersedia khususnya di laporan keuangan." Seperti yang telah dicatat oleh Mahkamah Agung, penentuan materialitas memerlukan "penilaian yang cermat dari kesimpulan yang akan diambil oleh 'pemegang saham yang masuk akal' dari serangkaian fakta tertentu dan pentingnya kesimpulan tersebut baginya (King and Case, 2014).

Materialitas adalah aspek relevansi spesifik entitas berdasarkan sifat atau besaran (atau keduanya) item yang terkait dengan informasi dalam konteks laporan keuangan entitas individual (Eccles et al., 2012).

Baik organisasi sektor publik maupun swasta telah mengeluarkan pedoman tentang materialitas untuk informasi nonkeuangan. Secara umum, definisi materialitas untuk informasi keuangan dengan menggambarkannya dalam istilah yang relevan dengan pengambilan keputusan, menempatkannya dalam konteks informasi lain, dan menilai kepentingan kualitatif dan kuantitatifnya sehubungan dengan informasi lain dan pengambilan keputusan ini. Namun, lebih banyak penekanan ditempatkan pada mendefinisikan pengguna informasi, biasanya digambarkan sebagai "pemangku kepentingan" daripada "pemegang saham," dan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari tidak memberikan informasi. Akuntabilitas LSM dan Inisiatif

Pelaporan Global (GRI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa semuanya telah menawarkan definisi materialitas untuk informasi nonkeuangan. Hanya GRI, melalui Suplemen Sektornya, yang mempertimbangkan masalah pendefinisian materialitas berdasarkan sektor (del Mar Alonso-Almeida, Llach and Marimon, 2014).

Oleh karena itu perubahan akan regulasi dan ketentuan khusus dalam proses penyediaan laporan keuangan terus berlanjut. Untuk mengilustrasikan bagaimana pilihan perusahaan atas kebijakan dan prosedur akuntansinya memengaruhi ketepatan sistem pelaporan keuangannya, melalui pertimbangan pilihan pengakuan pendapatan perusahaan. Perusahaan memilih kebijakan pengakuan pendapatan tertentu dari satu set yang mencakup metode persentase penyelesaian, metode angsuran, dan metode pemulihan biaya. Satu metode mungkin lebih mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan untuk suatu periode daripada metode lain.

Sejauh perusahaan memilih metode yang tidak cukup menangkap kinerja ekonomi untuk periode tersebut, maka kita dapat melihat sistem keuangan perusahaan menghasilkan informasi keuangan yang kurang tepat. Misalnya, anggaplah bisnis perusahaan sedemikian rupa sehingga pengakuan pendapatan setelah penjualan paling mendekati kinerja ekonomi perusahaan untuk periode tersebut. Dalam keadaan ini, jika perusahaan memilih untuk mengakui pendapatan pada titik penjualan, maka kebijakan pengakuan agresif ini dapat menyesatkan investor jika ada banyak ketidakpastian tentang uang tunai yang akan dikumpulkan, atau, paling banter, itu akan menghasilkan hasil yang kurang tepat.

Ukuran pendapatan perusahaan karena itu akan meminta perusahaan untuk memperkirakan kas masa depan yang tidak pasti. Sebagai contoh lain, pertimbangan kebijakan pengeluaran perusahaan. Prinsip pencocokan mensyaratkan

bahwa pengeluaran harus dicocokkan dengan pendapatan. Berkenaan dengan aset berumur panjang, misalnya, perusahaan biasanya menggunakan kebijakan alokasi "rasional dan sistematis" di mana biaya aset dialokasikan selama masa manfaat aset. Perusahaan dapat mendepresiasi aset dengan menggunakan metode garis lurus, metode dipercepat, atau metode aktivitas. Misalkan sebuah perusahaan menggunakan metode garis lurus. Metode ini paling tepat untuk aset yang memberikan kontribusi pendapatan secara merata selama masa manfaatnya. Namun, jika suatu aset tidak menghasilkan pendapatan secara merata selama masa pakainya, maka kita dapat melihat sistem keuangan perusahaan yang menggunakan metode garis lurus menghasilkan informasi keuangan yang kurang tepat daripada yang lebih sesuai dengan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan aset.

Oleh karena itu kualitas laporan keuangan (*Financial Reporting Quality / FRQ*) yang dikemukakan oleh (Choi and Pae, 2011), tujuan mendasar dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. FRQ telah didefinisikan sebagai kepastian informasi yang disampaikan oleh proses pelaporan. Di sisi lain, menurut (Jonas and Blanchet, 2000), pelaporan keuangan bukan hanya hasil akhir, namun kualitas proses ini tergantung pada masing-masing bagian, termasuk pengungkapan transaksi perusahaan, informasi tentang pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan pengetahuan tentang pertimbangan yang dibuat.

Proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan pajak, dividen, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan kebutuhan informasi dari penyedia modal eksternal (Ball and Shivakumar, 2005; Burgstahler, Hail and Leuz, 2006). FRQ mengharuskan perusahaan untuk secara sukarela memperluas cakupan dan kualitas informasi yang

mereka laporkan, untuk memastikan bahwa pelaku pasar mendapat informasi lengkap untuk membuat keputusan yang beralasan tentang investasi, kredit, dll. Informasi berkualitas tinggi ini memfasilitasi transparansi yang lebih besar.

Menurut otoritas terkemuka pada evaluasi pelaporan keuangan (seperti FASB, SEC, atau komite Jenkins), karakteristik utama yang diperlukan adalah relevansi, keandalan, transparansi, dan kejelasan (Jonas and Blanchet, 2000; Wu *et al.*, 2016). Telah ditegaskan bahwa informasi akuntansi berkualitas tinggi adalah sarana yang berharga untuk menangkal asimetri informasi (Chen *et al.*, 2011). FRQ dapat memberikan efek positifnya dari sudut pandang keuangan, dengan berkontribusi untuk mengurangi risiko informasi dan meningkatkan likuiditas (Enz and Lambert, 2012).

Informasi keuangan harus memiliki relevansi dan keandalan ganda. Namun, kualitas informasi pada transparansi, pengungkapan informasi yang lebih tepat dan tepat waktu adalah yang sifatnya terbuka (Mohammadi and Nezhad, 2015). Pengungkapan hingga penyampaian informasi, namun terdapat pula reaksi terhadap pengungkapan akuntansi sehingga tidak mengherankan pengungkapan kadang terbatas pada informasi keuangan dalam laporan keuangan. Akan tetapi perusahaan biasanya memiliki seperangkat pengungkapan informasi non-keuangan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pengguna diantaranya adalah transparansi yang merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi daya tarik perusahaan bagi investor dan tata kelola perusahaan adalah salah satu elemen kunci dalam sistem. Tingkat transparansi tergantung pada kemauan dan kemampuan manajemen untuk mengoreksi setiap perbedaan yang informatif bagi pelaku pasar. Dalam jangka panjang, pasar modal hanya akan berkembang melalui pembentukan lingkungan informasi yang transparan. Dalam lingkungan ini, transparansi informasi

keuangan merupakan peran penting. Bahkan, perusahaan yang gagal memenuhi standar transparansi, manajer risiko memiliki reputasi tinggi yang menaungi mereka. Dalam hal ini, dengan mengurangi kepercayaan investor dan pemegang saham menghadapi perusahaan tersebut mengakibatkan kerugian pasar modal dan pengurangan kredit perusahaan berdiri dan mengurangi likuiditas pasar. Di sisi lain manfaat dan pentingnya pengungkapan sukarela adalah untuk menciptakan sistem yang transparan. pengungkapan sukarela informasi dan transparansi pelaporan keuangan dalam jangka panjang membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Transparansi diukur dalam tiga kategori yaitu: (1) mengukur kualitas pelaporan, termasuk ukuran penilaian, ketepatan waktu dan keandalan pengungkapan perusahaan (yaitu, kualitas audit), (2) ukuran untuk memperoleh informasi pribadi, termasuk analisis dan tabel umum dari gabungan kegiatan investasi domestik dan komersial, dan (3) mengukur kualitas informasi yang disediakan dan dimiliki oleh swasta atau publik, termasuk media (dengan tujuan menginformasikan dan terlibat dalam publik).

Informasi lainnya adalah pada saat angka pendapatan yang menurun kemudian menyebabkan saham perusahaan jatuh, maka semakin banyak perusahaan yang berfokus pada keputusan untuk melakukan pengakuan pendapatan "*proforma*" untuk mendukung beberapa faktor yang mendistorsi informasi laporan keuangan. Ini seharusnya memberi investor pandangan yang lebih jelas tentang operasi perusahaan, tetapi karena tidak ada pedoman peraturan untuk pendapatan *proforma*, maka kebanyakan perusahaan semakin menggunakannya untuk membuat pendapatan mereka terlihat lebih baik.

Praktik yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pengungkapan ukuran pendapatan non-GAAP (sering disebut *proforma*) yang mengecualikan biaya

tertentu (Bradshaw and Sloan, 2002). Alasan yang diakui untuk penyesuaian dalam pengungkapan laba proforma adalah untuk mencerminkan keadaan khusus yang tidak terkait dengan prospek jangka panjang perusahaan, seperti biaya sekali pakai, misalnya, biaya restrukturisasi item yang tidak berulang, item luar biasa, operasi yang dihentikan, atau perubahan kebijakan akuntansi (Barbash, 2001; Easton, 2003).

Pada pembahasan bab ini juga ingin mengungkap contoh bagaimana persyaratan-persyaratan yang ditekankan oleh beberapa negara tertentu terkait peraturan dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk meletakkan dasar untuk apa yang mungkin diharapkan dari perusahaan sehubungan dengan pengungkapan berdasarkan persyaratan domestik. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa hal-hal yang diperlukan oleh kerangka kerja domestik sebenarnya disajikan dalam laporan keuangan misalnya pada situs web perusahaan ataupun secara tertulis. Persyaratan tersebut akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk perbandingan. Artinya, apabila informasi yang disajikan di situs web perusahaan telah sesuai atau tidak berbeda dengan hard copy dalam hal tanggung jawab terhadap pelaporan keuangan, maka dapat dikategorikan sebagai pengungkapan yang transparan dan berkualitas (Khan, 2007).

Misalnya pada negara Australia.

Undang-undang Korporasi memiliki persyaratan pelaporan untuk perusahaan (Xu *et al.*, 2003), yaitu Perusahaan berpemilik besar (yang memenuhi dua dari tiga kondisi yaitu pendapatan lebih besar dari \$10 juta, aset kotor lebih dari \$5 juta, dan lebih dari 50 karyawan) harus menyiapkan dan mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit ke ASIC (*Australian Securities & Investments Commission*) dalam waktu empat bulan sejak tanggal pelaporannya.

Entitas pengungkap adalah entitas terdaftar atau skema terdaftar, yang mengumpulkan dana dalam prospektus, yang menawarkan sekuritas selain surat utang sebagai pertimbangan untuk akuisisi saham di perusahaan target atau yang sekuritasnya diterbitkan berdasarkan kompromi atau skema pengaturan. Mereka diharuskan untuk mematuhi persyaratan pengungkapan berkelanjutan, melaporkan ke ASX atau ASIC (lembaga di negara Australia) dalam waktu 90 hari dari akhir tahun. Mereka juga perlu menyiapkan laporan akhir semester dalam waktu 75 hari dari akhir tahun.

Untuk perusahaan yang terdaftar, ada persyaratan terperinci untuk setiap bagian direktur dalam ekuitas bisnis, serta pengungkapan detail kontrak yang mungkin menguntungkan direktur, sebagai bagian dari laporan direktur. Aturan yang wajib dilengkapi meliputi:

1. Tinjauan operasi dan hasil operasi
2. Detail dari setiap perubahan signifikan pada entitas
3. Kegiatan utama dan setiap perubahan signifikan di dalamnya
4. Setiap hal atau keadaan setelah akhir periode pelaporan, yang mungkin secara signifikan mempengaruhi atau telah mempengaruhi, operasi atau hasil keadaan pada periode pelaporan mendatang
5. Perkembangan dalam kegiatan operasi dan hasil yang diharapkan dari operasi tersebut dalam periode pelaporan masa depan, kecuali jika material tersebut kemungkinan besar menimbulkan prasangka yang tidak wajar. Pernyataan bahwa informasi yang merugikan belum diungkapkan.
6. Rincian kinerja terkait regulasi lingkungan.

Contoh aturan yang diterapkan oleh negara Australia mungkin berbeda dengan negara lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya lingkungan bisnis, kondisi alam, kondisi politik, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, L. and Destriana, N. 2016. Pengaruh firm size, corporate governance, dan karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba', *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 18(1), pp. 84–93.
- Ball, R. and Shivakumar, L. 2005. Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness', *Journal of accounting and economics*, 39(1), pp. 83–128.
- Barbash, F. 2001. Hypothetically, pro forma may be a mirage. *Washington Post*. 4(29), p. 1.
- Bradshaw, M. T. and Sloan, R. G. 2002. GAAP versus the street: An empirical assessment of two alternative definitions of earnings. *Journal of Accounting Research*. 40(1), pp. 41–66.
- Burgstahler, D. C., Hail, L. and Leuz, C. 2006. The importance of reporting incentives: Earnings management in European private and public firms. *The accounting review*, 81(5), pp. 983–1016.
- Chen, H. *et al.* 2011. Effects of audit quality on earnings management and cost of equity capital: Evidence from China. *Contemporary accounting research*. 28(3), pp. 892–925.
- Choi, T. H. and Pae, J. 2011. Business ethics and financial reporting quality: Evidence from Korea. *Journal of business ethics*, 103(3), pp. 403–427.
- Easton, P. 2003. Discussion of “The predictive value of expenses excluded from pro forma earnings”, *Review of Accounting Studies*, 8(2), pp. 175–183.
- Eccles, R. G. *et al.* 2012. The need for sector-specific materiality and sustainability reporting standards', *Journal of applied corporate finance*, 24(2), pp. 65–71.
- Enz, M. G. and Lambert, D. M. 2012. Using cross-functional, cross-firm teams to co-create value: The role of financial

- measures. *Industrial Marketing Management*. 41(3), pp. 495–507.
- Evans, J. H. and Sridhar, S. S. 1996. Multiple control systems, accrual accounting, and earnings management', *Journal of Accounting Research*, 34(1), pp. 45–65.
- Halim, A. and Abdullah, S. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), pp. 53–64.
- Harahap, S. S. 2011. Teori Akuntansi edisi revisi 2011. *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Healy, P. M. and Palepu, K. G. 2001. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of accounting and economics*, 31(1–3), pp. 405–440.
- Jonas, G. J. and Blanchet, J. (2000) 'Assessing quality of financial reporting. *Accounting horizons*, 14(3), p. 353.
- Khan, T. 2007. Internet financial reporting: disclosure about companies on websites. *Journal of Business Systems, Governance and Ethics*, 2(2), pp. 37–46.
- King, D. L. and Case, C. J. 2014. Sarbanes-oxley act and the public company accounting oversight board's first eleven years. *Journal of Business and Accounting*, 7(1), pp. 11–23.
- del Mar Alonso-Almeida, M., Llach, J. and Marimon, F. 2014. A closer look at the 'Global Reporting Initiative'sustainability reporting as a tool to implement environmental and social policies: A worldwide sector analysis', *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 21(6), pp. 318–335.
- Mohammadi, S. and Nezhad, B. M. 2015. The role of disclosure and transparency in financial reporting. *International Journal of Accounting and Economics Studies*. 3(1), pp. 60–62.
- Raharjo, E. 2007. Teori agensi dan teori stewardship dalam

- perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1).
- Skinner, C. *et al.* 1994. Disclosure control for census microdata', *JOURNAL OF OFFICIAL STATISTICS-STOCKHOLM-*, 10, p. 31.
- Verrecchia, R. E. 1990. Information quality and discretionary disclosure. *Journal of accounting and Economics*, 12(4), pp. 365–380.
- Watts, R. L. and Zimmerman, J. L. 1986. Positive accounting theory.
- Whittington, G. 2008. Fair value and the IASB/FASB conceptual framework project: an alternative view. *Abacus*, 44(2), pp. 139–168.
- Wu, Y.-C. *et al.* 2016. The impact of earnings management on the performance of ASEAN banks. *Economic Modelling*, 53, pp. 156–165.
- Xu, H. *et al.* 2003. Key issues of accounting information quality management: Australian case studies. *Industrial Management & Data Systems*.

BIODATA PENULIS



Dini Haryati, S.E., M.Ak

Dosen tetap di IAI Nusantara Batanghari

Penulis lahir di Kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, tanggal 01 Januari 1992. Penulis menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi (S.E) di prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2013. Kemudian, penulis menyelesaikan studi Magister Akuntansi (M. Ak) di prodi Akuntansi Universitas Jambi tahun 2017. Penulis memiliki gelar non akademik dengan aktif mengikuti training Performance Management Professional (CPMP), Strategic Entrepreneurial Mindset (CSEM), Professional Handwriting Analyst (CPHA), Advanced Professional Handwriting Analyst (APHA). Penulis memiliki kepakaran di bidang akuntansi, pengauditan dan perbankan. Sebagai Dosen tetap di IAI Nusantara Batanghari dengan jabatan Asisten Ahli.

Dengan Pengalaman mengajar 3 (Tiga) tahun yang bersangkutan telah menghasilkan beberapa karya ilmiah baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal nasional tidak terakreditasi dan juga aktif dalam menulis beberapa buku dibidang akuntansi, statistik, transformasi digital,

kepemimpinan, dan perilaku. Selain seorang Dosen, yang bersangkutan juga aktif di di bidang Keuangan dan Perbankan. Email Penulis: Diniharyati@iainbatanghari.ac.id, dan diniharyati14@gmail.com

*I don't want to miss out on the chance and keep
spirit having work for future*

BIODATA PENULIS



Zul Azmi

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Riau

Penulis lahir di Duri Kabupaten Bengkalis Riau. Saat ini penulis menjadi dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Pernah belajar di bangku kuliah pada Universitas Riau, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Sumatera Utara. Penulis menekuni bidang studi akuntansi. Selain sebagai dosen, ia juga tergabung pada organisasi seperti ADAI, MES, IAI dan lainnya.

BIODATA PENULIS



Rita Dwi Putri, S.E,M.Si

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok

Penulis lahir di Kota Padang Sumatra Barat , 13 Agustus 1984. Menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 2006, Setelah menyelesaikan Pendidikan S1 penulis mengawali karir sebagai pegawai honorer di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang Tahun 2006 dan Melanjutkan Pendidikan S2 Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Andalas Padang Pada tahun 2012. Tahun 2010-2014 Penulis menjadi Dosen tetap di program Studi Akuntansi STIE Perbankan Indonesia Kota Padang. Tahun 2014 sampai Sekarang Penulis adalah Dosen Tetap program studi Akuntansi sejak tahun dan telah lulus sertifikasi dosen 2017.

BIODATA PENULIS



Rosanna Purba, S.E., M.Si
Dosen Program Studi Akuntansi
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Penulis lahir di Simalungun, Sumut pada tanggal 13 April 1982. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Sari Mutiara Indonesia pada Program Studi Akuntansi. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 pada Magister Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta.

BIODATA PENULIS



Nanang Qosim

Dosen Universitas Alkhairaat

Penulis lahir di Beka, 18 Februari 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Alkhairaat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat dan S2 pada Program Studi Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti palu. Penulis menekuni bidang Manajemen, Manajemen Keuangan.

Pada tahun 2021 menjadi editor pada Jurnal Ilmu Manajemen (JIM) sampai sekarang. Selanjutnya pada tahun 2022 saya berkesempatan menjadi *peer reviewer* pada jurnal APTISI Transaction on Management (ATM). Saat ini penulis memegang jabatan struktural Kepala Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Alkhairaat, penulis juga telah banyak menulis buku dan selalu mengikuti seminar nasional tentang metode penelitian serta seminar yang berhubungan dengan bidang keahlian, penulis juga sebagai Sekretaris Yayasan Al Ikhlas Kota Palu berfokus kepada Pengabdian Pada Masyarakat dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang dan Sekretaris Yayasan Mitra Sejahtera Kota Palu yang berfokus pada Penelitian serta Pengabdian Pada Masyarakat mulai Tahun 2011 sampai dengan sekarang.

BIODATA PENULIS



Renika Hasibuan, S.E.,M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS)
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Penulis adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi. Lahir dari Desa Lumbanrau, 29 Agustus 1985. Mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Praktikum Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Perpajakan. Aktif di berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain aktif menjadi dosen, Alumni S-1 Akuntansi Universitas Darma Agung (lulus 2009) dan S-2 di Universitas Sumatera Utara (lulus 2013) ini juga menjadi konsultan accounting di STTBM sampai sekarang, sebelumnya Ibu dari dua anak ini juga pernah berkarir sebagai Auditor di Kreston Internasional, dan merintis bisnis jual beli perabot dengan nama Tania Perabot. E-mail : renikahasibuan2016@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Rihfenti Ernayani

Dosen PNS Dpk pada Universitas Balikpapan

Penulis lahir di Balikpapan, 26 Desember 1974. Lulus Sekolah Menengah Atas jurusan IPA dari SMA Negeri 5 Balikpapan pada tahun 1993. Setelah lulus SMA penulis bekerja di perusahaan swasta yang ada di Balikpapan hingga tahun 1997. Penulis memutuskan untuk melanjutkan kuliah Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Balikpapan pada tahun 1997 dan lulus tahun 2001. Tahun 2002 merupakan Dosen Luar Biasa di Universitas Balikpapan. Mengikuti test PNS Dosen pada bulan Desember tahun 2004, lulus dan diangkat sebagai PNS Dpk Kopertis Wilayah XI Kalimantan sejak Januari 2005. Penulis melanjutkan program S2 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Jurusan Akuntansi masuk tahun 2007 lulus tahun 2009. Mengikuti Program Pascasarjana (S3) di Universitas Airlangga (UNAIR) Jurusan Ekonomi Islam, masuk tahun 2010 lulus tahun 2013. Saat ini penulis merupakan Dosen PNS Dpk yang di tugaskan di Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan sejak tahun 2005.

Email: rihfenti@uniba-bpn.ac.id

BIODATA PENULIS



Maryam Nurdin SE., M.Si. AK. CA.

Dosen Tetap Yayasan Fajar Ujung Pandang

Penulis lahir di Makassar pada tanggal 5 Mei 1970. Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan Fajar Ujung Pandang sekaligus auditor pada Kantor Akuntan Publik Usman & Rekan. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Universitas Hasanuddin Makassar.